

FORUM DISKUSI **DENPASAR 12**

# **BERHADAPAN DENGAN KETIDAKPASTIAN**

**Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.**  
Wakil Ketua MPR RI

FORUM DISKUSI **DENPASAR 12** BERHADAPAN DENGAN KETIDAKPASTIAN

# BERHADAPAN DENGAN KETIDAKPASTIAN

**Penggagas:**

Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.

Cetakan Agustus 2024

UU 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**Tim Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.:**

Arief Adi Wibowo, S.Si., M.T.

Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum.

Drs. Muchtar Luthfi Mutty, M.Si.

Arimbi Heroepoetri, S.H., LL.M.

Luthfi Assyaukanie, Ph.D.

Sadyo Kristiarto, S.P.

Anggiasari Puji Aryatie, S.S.

Dr. Irwansyah, S.Sos., M.A.

Dr. Radityo Fajar Arianto, S.E., M.B.A.

## Sekapur Sirih

---

---

**B**UKU ini berisi hasil diskusi mengenai berbagai topik dengan pokok pikiran besar bagaimana kita menghadapi ketidakpastian akibat pandemi covid-19.

Bab I berisi skenario pemulihan ekonomi berbasiskan postulat bahwa perlu stimulus untuk menggerakkan ekonomi yang lumpuh.

Pertumbuhan ekonomi paling parah diskenariokan mencapai -0,4%. Sekalipun demikian, ada optimisme pertumbuhan 0%. Di sini kepada pembaca disajikan pandangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perdagangan RI periode 2016-2019, Rosan Roeslani, Ketua Umum Kadin Indonesia, Shanti Shamdasani, Presiden & CEO ASEAN International Advocacy & Consultancy, Martin Manurung, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, dan jurnalis senior Suryoprato.

Bab II berisi langkah meramu jalan kebangkitan perekonomian. Selain pandangan Enggartiasto dan Shanti Shamdasani, juga dipaparkan pandangan Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bustanul Arifin, Professional Fellow at the International Center for Applied Finance and Economics of Bogor Agricultural University (Inter-CAFE IPB), Shinta Witoyo Dhanuwardoyo, CEO/Founder *Bubu.com* & Angel Investor, Doni Kris Puriono Presiden Komunitas Tangan di Atas (TDA) dan sekjenjnya, Wisnu Dewobroto, dan Usman Kansong, Ketua Dewan Redaksi Media Group.

Bab III berisi kebangkitan industri kreatif, mengakselerasi proses

digitalisasi industri kreatif. Di sini berbicara Wishnutama Kusubandio, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2019-2020, Ananda Sukarlan, pianis-komponis, Harry Koko Santoso, promotor *event*, Diana Sastra, seniman tradisional tarling dari Indramayu, Jawa Barat, Ki Dalang Warseno, serta Niluh Djelantik, *entrepreneur* industri *fashion* dari Bali.

Bab IV berisi upaya mengantisipasi gelombang baru covid-19. Di dalam perkara itu dikemukakan pentingnya disiplin menjalankan protokol kesehatan. Di sini dipaparkan pemikiran Tjandra Yoga Aditama, Guru Besar FKUI dan Direktur WHO SEARO 2018-2020, Felly Estelita Runtuwene, Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Dr. Windhu Purnomo, pengajar Departemen Biostatistik dan Kependudukan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, dr. Ivan Virnanda Amu, M.Kes., Sp.PD. dosen Program Studi Kedokteran Universitas Negeri Gorontalo dan anggota tim penanganan covid-19 dari Gorontalo, Wahyu Dhyatmika, Pemimpin Redaksi Majalah *Tempo*, serta Arief Suditomo, Direktur Pemberitaan *Metro TV*.

Bab V berisi topik upaya menyelamatkan anak Indonesia dan masa depan mereka di tengah pandangan yang menganggap anak bebas covid-19. Di sini berbicara Prof. dr. Bambang Supriyanto, Sp.AK., anggota Tim Pakar Satgas Percepatan Penanganan Covid-19, Retno Listiyarti, M.Si., komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Siti Nadia Tarmizi, Juru Bicara Kementerian Kesehatan untuk Vaksinasi Covid-19, Prof. Dr. Ni Nyoman Tri Puspaningsih, M.Si., Wakil Rektor Universitas Airlangga, Dieny Tjokrosuprihatono, anggota Dewan Pakar DPP Partai NasDem, Prof. Dr. Tjandra Yoga Aditama, dan Ahmad Arif,

wartawan *Kompas*.

Bab VI menyorot kaum muda dalam transformasi digital. Berbicara di sini Yose Rizal, Komisaris Telkomsel, Debbie R. Tampubolon, Founder INAmikro, Marcel Satria, Y-20 Indonesia 2022 Delegate Indonesia, Dr. Ing. H. Ilham Habibie, Ketua Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, Avanti Fontana, Ph.D., Founder CIS School of Innovation dan Planet Inovasi Foundation, dan Jakfar Sidiq, pegiat budaya/Wakil Sekjen DPP Partai NasDem.

Bab VII berisi perihal mengidentifikasi nilai-nilai kebangkitan nasional. Di sini berbicara Yudi Latif, M.A., Ph.D., mantan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Yose Rizal, Komisaris Telkomsel, Hadriani Uli Silalahi, Chair Women 20, Yulio S. Bulu, Direktur Operasional Pertamina Foundation, Najeela Shihab, pendiri Sekolah Cikal dan Sekolah.mu, Tita Djumaryo, pendiri Ganara Ary-Mari Berbagi Seni dan Pengurus Koalisi Seni Indonesia, Maria Kresentia, Direktur SPAK (Saya Perempuan Antikorupsi), Endang Suraningsih, Direktur SDM ID Food, Prof. Dr. Bachtiar Ali, anggota DPR RI 2014-2019 dari Fraksi Partai NasDem, dan Dr. Muhammad Rahmat Yananda, Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia.

Perbincangan di dalam Forum Diskusi Denpasar 12 itu dirangkum menjadi buku ini oleh Kleden Suban, Gantyo Koespradono, dan Hilarrius U. Gani. Seperti buku-buku yang telah diterbitkan, buku ini pun diperiksa secara kolektif melalui *Zooming* melibatkan ketiga penulis yang dikoordinasikan Ade Siregar.

Forum Diskusi Denpasar 12 terselenggara secara teratur berkelanjutan setiap Rabu berkat kerja tim yang solid. Topik diskusi, pembicara,

dan pembahas ditentukan Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M., bersama Arief Adi Wibowo, S.Si., M.T. dan Dr. Radityo Fajar Arianto, M.B.A., serta Staf Khusus Wakil Ketua MPR Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., dan Drs. Muchtar Lutfhi Mutty, M.Si., serta Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Arimbi Heroepoetri, S.H., LL.M., Luthfi Assyaukanie, Ph.D., Sadyo Kristiarto, S.P., Anggiasari Puji Aryatie, S.S., dan Dr. Irwansyah, S.Sos., M.A.

Teknis pelaksanaan Forum Diskusi Denpasar 12 secara virtual ditangani Tim Tenaga Ahli DPR, yaitu Shohibul Uman, S.E., Alma Costa, S.S., M.A., dan Affan Akbar Harahap, S.Sos. Tim Tenaga Ahli DPR ialah tim Lestari Moerdijat dalam kedudukannya sebagai anggota DPR RI.

Tim Tenaga Ahli lainnya, Naila Fitria, S.Si., Lia Eldest Sihotang, S.IP., M.A., dan Ahmad Nur Saeful, S.Pd., bertugas melakukan riset untuk keperluan diskusi serta menghubungi pembicara dan pembahas sesuai dengan otoritas ataupun kompetensi masing-masing.

Forum Diskusi Denpasar 12 berlangsung mulai pukul 14.00 WIB, didahului menyanyikan lagu *Indonesia Raya*, lalu dibuka dengan sambutan Lestari Moerdijat. Bergantung pada topik, diskusi dipimpin moderator Arimbi Heroepoetri, atau Luthfi Mutty, atau Luthfi Assyaukanie, atau Anggiasari Puji Aryatie, atau Radityo Arianto. Saur Hutabarat menutup diskusi dengan opini singkat.

Perancang sampul dan penata letak buku ini ialah Briyanbodo Hendro. Buku ini pun mendapat sentuhan editor bahasa Dony Tjiptonugroho agar bahasa Indonesia yang baik dan benar tetap terjaga dan terpelihara. ■

## Bangkit di Masa Sulit

---

---

**R**EGULASI atau kebijakan yang tepat disertai kekuatan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup saya yakini dapat membuat kita sebagai bangsa bangkit di masa sulit. Inilah pikiran besar yang berupaya dikemukakan berbagai pembicara dan dibahas di dalam buku ini.

Regulasi atau kebijakan yang tepat itu antara lain berupa skema insentif ke berbagai sektor riil. Nilai-nilai yang dimaksud antara lain gotong royong yang pada masa sulit membuat kita mampu melalui masa transisi memasuki kenormalan baru.

Pada masa sulit kita bersyukur bahwa ekonomi digital bertumbuh. Para seniman menemukan jalan untuk menyalurkan kreativitas mereka. Pendidikan tetap dapat berlangsung dari rumah. Yang tidak kalah penting ialah kita mendengarkan dengan saksama seruan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) bahwa rendahnya *test and tracing* pada anak-anak menjadi salah satu penyebab yang berkontribusi pada jumlah kematian pada anak dan balita. Kita mampu mengubah pandangan yang keliru bahwa anak-anak tidak akan terpapar oleh pandemi.

Ketika pandemi berlalu dan ruang gerak terbuka lebar, kiranya kita sebagai bangsa tidak lupa untuk terus mengembangkan kualitas kita sebagai bangsa untuk berkemampuan menghadapi perubahan-perubahan yang tidak terduga di masa depan.

Pergaulan global berkemungkinan membawa nilai-nilai yang nega-

tif. Saya berpendapat kita perlu duduk bersama dan memikirkan berubahnya pola tindak tanduk sosial yang membahayakan keutuhan kita sebagai sebuah bangsa.

Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber yang telah berbagi pemikiran. Kita bersyukur bahwa sebagai bangsa kita akhirnya dapat bangkit keluar dari krisis ekonomi dan kesehatan yang melanda dunia.

Jakarta, Juli 2023



**Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M.**

Wakil Ketua MPR RI

## Berpikir Pesimistis, Bertindak Optimistis

---

---

**K**ETIKA perekonomian tumbuh negatif dan kematian amat meningkat, kiranya lebih mudah menghibur diri bahwa kita sebagai bangsa harus tetap optimistis. Nyatanya krisis dan kematian sanak saudara tanpa bisa diantar ke permakaman membuat orang menjadi lebih mudah pesimistis ketimbang optimistis.

Karena itu, pilihan perlu dilakukan antara berpikir dan bertindak. Manakah yang lebih dipentingkan di antara dua kualitas manusia itu, yang lebih perlu untuk dihidupi spirit optimisme, manakah pula yang tidak bisa lain buat sementara waktu dengan sadar berselamatkan pesimisme.

Berpikir optimisme kiranya dapat menelurkan harapan yang bagus di atas kertas. Misalnya ekonomi masih dapat tumbuh positif 2,3%, di tengah berbagai negara tumbuh negatif, bahkan ada yang mencapai negatif 6,8%.

Optimisme pikiran itu berkemungkinan mendorong lahirnya kebijakan yang berbasiskan perkiraan risiko sosial yang lebih rendah dengan kesiapan anggaran yang juga senada.

Ketika kenyataan yang dihadapi jauh lebih buruk, terjadilah keputusan negara yang lebih berwatak improvisasi. Sebutlah keputusan buka tutup *lockdown* seperti semudah membalikkan telapak tangan. Akibatnya beberapa hari sekolah dibuka, harus ditutup kembali secara mendadak karena maut yang dibawa korona hanya reda 'sejenak', nyatanya masih bergentayangan, bahkan lebih kejam. Itu, misalnya,

terjadi di Prancis dan Korea Selatan.

Sebaliknya berpikir pesimistis kiranya menelurkan tindakan yang 'lebih *extra fooding*' untuk menghadapi kenyataan yang lebih buruk. Inilah bertindak optimisme karena menerima pikiran pesimisme, misal ekonomi tumbuh negatif 0,8%.

Kita tidak memilih kebijakan *lockdown*. Kita memilih praktik perekonomian yang tetap terbuka kendati amat sempit. Bahkan pilkada serentak tetap berlangsung di masa pandemi dengan protokol kesehatan yang ketat. Saya membacanya inilah contoh pilihan bertindak yang lebih prooptimisme disertai pilihan berpikir yang lebih propesimistis.

Semua itu pandangan spekulatif. Saya suka dikejutkan prediksi optimistis yang ternyata keliru besar. Saya tentu lebih bersukaria karena pikiran pesimistis berbuah kenyataan manis berkat tindakan-tindakan optimistis.

Jakarta, Juli 2023



**Saur Hutabarat**  
Wartawan Senior

# DAFTAR ISI

**Sekapur Sirih**

7

**Bangkit di Masa Sulit**

13

**Berpikir Pesimistis, Bertindak Optimistis**

17

## **SKENARIO PENANGGULANGAN COVID DAN PEMULIHAN EKONOMI**

24

1. Latar Belakang: Berbagai Skenario Hadapi Dampak Pandemi Covid-19
2. Perlu Stimulus untuk Gerakkan Ekonomi yang Lumpuh
3. Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Terus Bergerak Naik
4. Perlu Antisipasi Hadapi Kondisi Terburuk

## **MERAMU JALAN KEBANGKITAN PEREKONOMIAN BANGSA 2021**

48

1. Latar Belakang: Tatkala Dunia Masuk Babak Baru Resesi
2. Terus Bangkit di Masa Sulit
3. Kebiasaan Belanja Berubah, Bank BUMN Jangan cuma Cari Profit
4. Pertanian Menjadi Bantalan Pemulihan Ekonomi
5. Startup Solusi Mendorong Perekonomian Nasional
6. Menanti Orkestra Besar Tangan di Atas
7. Berdarah-darah, tetapi Ada Harapan

## **KEBANGKITAN INDUSTRI KREATIF**

96

1. Latar Belakang: Digitalisasi Jadi Tantangan
2. Kerja Besar belum Selesai
3. Memperkuat Bargaining Power
4. Tanpa Arah

## **IV**

### **DISIPLIN MENJALANKAN PROTOKOL KESEHATAN**

126

1. Latar Belakang: Antisipasi Gelombang Baru Covid-19
2. Pandemi Picu Kelelahan Fisik dan Mental
3. Kesadaran Melindungi Diri dan Sesama
4. Kuncinya Sosialisasi dan Komunikasi

## **V**

### **UPAYA MENYELAMATKAN ANAK INDONESIA DALAM PANDEMI**

160

1. Latar Belakang: Menyelamatkan Anak dan Masa Depan Mereka
2. Selamatkan Anak dari Turbulensi Pandemi
3. Tatkala Orang Tua Menganggap Anak Bebas Covid-19
4. Anak Rentan Terinfeksi, Orang Tua dan Guru tidak Digugu dan Ditiru
5. Orang Tua Sering Lengah
6. Virus itu Terus Bermutasi Menjadi Varian Baru
7. Mempersiapkan Masa Depan Anak secara Holistik
8. Upaya agar Kasus Covid-19 tidak makin Mencekam

## **VI**

### **KAUM MUDA DALAM TRANSFORMASI DIGITAL**

218

1. Latar Belakang: Dibayangi Kesenjangan
2. Panduan Etis
3. Tidak Mudah Diubah
4. Paling Menarik di Dunia
5. Industri Iklim
6. Menularkan Kelincahan

# VII

## MENGIDENTIFIKASI NILAI-NILAI KEBANGKITAN NASIONAL

254

1. Latar Belakang: Proses Identifikasi
2. Mengukuhkan Kembali Nilai-Nilai Keindonesiaan
3. Mulai dengan Membangun Nilai
4. Posisi Cukup Baik
5. Pemberdayaan Perempuan
6. Jangan Terjebak Romantisme Masa Lalu

**Catatan Moderator**

**292**

**Biodata Tim Ahli**

**308**



**Stay at Home!!**



Berdasarkan surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Badung nomor : 556/1997/Dispar/Sekret Perihal : penutupan sementara Obyek Wisata Tahap II

**PERINGATAN**

UNTUK MENGHENTIKAN PENYEBARAN PANDEMI COVID-19,  
PANTAI LEGIAN DITUTUP UNTUK UMUM

**WARNING**

TO STOP THE SPREAD OF THE COVID-19 PANDEMIC,  
LEGIAN BEACH IS CLOSED FOR PUBLIC

**Skenario  
Penanggulangan  
Covid dan  
Pemulihan Ekonomi**

# 1 Latar Belakang: Berbagai Skenario Hadapi Dampak Pandemi Covid-19

---

---

**D**ATA terakhir menunjukkan penurunan pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan pertama (Q1) 2020 di level 2,97% dari kuartal sebelumnya 4,97%. Beberapa catatan penting yang mewarnai awal tahun itu ditandai terjadinya kontraksi ekonomi di hampir seluruh dunia akibat pandemi covid-19.

Pertumbuhan ekonomi negara-negara yang menjadi mitra dagang terbesar Indonesia mengalami penurunan cukup signifikan akibat pemberlakuan kebijakan *lockdown* atau pembatasan aktivitas sosial, seperti Tiongkok yang mengalami penurunan mencapai -6,8%, Amerika Serikat 0,3%, dan Uni Eropa -2,7%.



MIM IRFAN

Mural edukasi dan sosialisasi protokol kesehatan (prokes) untuk pemberantasan penularan virus covid-19 terpampang pada tiang tol layang di Jalan Laksamana Yos Sudarso, Jakarta Utara, Kamis (8/7/2021). Tidak disiplin dan kurangnya kepedulian terhadap prokes menjadi salah satu penyumbang tingginya kasus positif terpapar oleh virus covid-19. Pemberlakuan kebijakan *lockdown* memengaruhi penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan negara lainnya.

Pemerintah sebelumnya sudah menyampaikan skenario-skenario yang akan diambil dalam mengantisipasi dampak pandemi terhadap perekonomian nasional dengan prediksi pertumbuhan ekonomi bakal menurun ke level 2,3%, dan pada tingkat paling berat perekonomian nasional diperkirakan mengalami kontraksi mencapai -0,4%.

Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut memberikan tekanan kepada dunia usaha sehingga mengakibatkan peningkatan angka pengangguran mencapai 2,92 juta hingga 5,23 juta orang. Selain itu, yang meresahkan ialah bertambahnya tingkat kemiskinan antara interval 9,15% dan 10,56% yang dapat menimbulkan masalah-masalah sosial baru.

Situasi di atas menjadi perhatian banyak pemangku kepentingan sehingga muncul banyak pertanyaan mengenai langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dalam mempersiapkan kenormalan baru yang aman secara epidemiologis, sekaligus menunjang pemulihan ekonomi nasional. Pasalnya, dunia usaha memiliki tingkat ketahanan keuangan yang terbatas. ■



Skema insentif ke berbagai sektor riil bisa menjadi kunci menghidupkan kembali ekonomi pascapandemi covid-19. Insentif didorong melalui regulasi atau kebijakan yang tepat.”

**Lestari Moerdijat**  
Wakil Ketua MPR RI

## 2 Perlu Stimulus untuk Gerakkan Ekonomi yang Lumpuh

**K**ITA memasuki masa kenormalan baru dalam situasi wabah covid-19 yang belum mereda. Banyak kritik tentang kebijakan penanganan wabah covid-19 yang berimbas pada terjadinya krisis ekonomi. Dalam menghadapi masalah tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa penanggulangan covid-19 berjalan seiring dengan upaya pemulihan ekonomi.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23/2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekono-

mian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

Kebijakan tersebut lazim disebut sebagai PP tentang Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Menurut Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie), aturan tersebut dirancang untuk menyelamatkan badan usaha milik negara, perbankan, dan dunia usaha. PP tersebut mengatur mekanisme pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dijalankan melalui empat skema, yaitu penyertaan modal negara (PMN), penempatan dana, investasi pemerintah, dan penjaminan.

“Skema insentif ke berbagai sektor riil bisa menjadi kunci menghidupkan kembali ekonomi pascapandemi covid-19. Insentif didorong melalui regulasi atau kebijakan yang tepat,” katanya dalam diskusi bertajuk Mempersiapkan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Pandemi Covid-19.

Sektor riil, kata Rerie, harus dihidupkan kembali, restrukturisasi harus dilakukan, dan yang jelas harus ada insentif atau stimulus di semua sektor padat karya. “Sektor riil tersebut dapat menarik kembali investasi baik domestik maupun asing,” jelasnya.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menurutnya, memang perlu lebih banyak mendapatkan insentif serta kemudahan berusaha. UMKM dapat menjadi peluang bisnis baik sebelum maupun setelah pandemi.

Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menyebutkan

bahwa UMKM ialah sektor yang memiliki potensi besar. Data Kementerian Koperasi dan UMKM menyebut sekitar 98,7% usaha di Indonesia merupakan usaha mikro dan mampu berkontribusi pada PDB Indonesia sebesar 36,82%.

Sistem insentif harus dirancang dan dibahas pemerintah secara holistik agar mampu memberi stimulus dan dukungan terhadap berbagai sektor seperti pertanian, UMKM, serta *startup* lokal.

Politikus Partai NasDem itu menyebutkan hal terpenting yang harus dilakukan pemerintah untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi ialah memberikan stimulus ekonomi untuk menggerakkan kembali roda pekonomian yang sempat lumpuh akibat wabah covid-19. ■



Untuk memenangi persaingan perebutan pasar baru, perlu kerja sama yang baik antara dunia usaha dan pemerintah. Tanpa kerja sama, kita sulit untuk merebut pasar ekspor yang baru.”

**Enggartiaso Lukita**

Menteri Perdagangan RI periode 2016-2019

## 3 Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Terus Bergerak Naik

DALAM diskusi yang digelar Forum Diskusi Denpasar (FDD) 12 itu, Menteri Perdagangan RI periode 2016-2019 Enggartiaso Lukita optimistis dalam waktu yang tidak terlalu lama pertumbuhan atau pergerakan ekonomi nasional akan segera bangkit.

Optimisme tersebut mengacu pada prediksi Bank Dunia yang menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 diperkirakan 0%. “Kita berharap lebih baik daripada itu dan jangan sampai berada di bawah nol,” kata Enggartiaso.

Ia mengakui selama ini Indonesia sangat bergantung pada ekspor bahan baku ke sejumlah negara atau dengan kata lain ekspor lebih didominasi sumber daya alam. “Kebiasaan ekspor ba-

han baku harus diubah dengan cara melakukan hilirisasi industri sehingga ekspor kita lebih mempunyai nilai tambah,” katanya.

Persoalannya, ujar Enggar, sapaan Enggartiasto, kita membutuhkan uang untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di masa pandemi covid-19 dan di saat yang sama kita harus berupaya melakukan hilirisasi agar produk-produk yang diekspor ke berbagai negara mempunyai nilai tambah yang signifikan bagi kepentingan bangsa dan negara.

Persoalan lainnya, imbuah politikus Partai NasDem itu, apakah ekspor yang kita lakukan hanya mengandalkan pasar-pasar yang sudah ada perjanjian perdagangan yang telah terbangun selama ini atau mencari dan membuka pasar-pasar ekspor yang baru?

Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan selalu mengingatkan semua pihak terkait agar senantiasa aktif dalam mencari dan merebut pasar-pasar ekspor baru. “Untuk memenangi persaingan perebutan pasar baru, perlu kerja sama yang baik antara dunia usaha dan pemerintah. Tanpa kerja sama, kita sulit untuk merebut pasar ekspor yang baru,” tegasnya dalam diskusi yang dipandu Luthfi Assyaukanie, Staf Ahli Wakil Ketua MPR RI.

Selain itu, imbuahnya, beberapa industri dalam negeri sedang dilanda persoalan yang sangat serius seperti industri penerbangan dan industri pariwisata. Meski demikian, kita tidak perlu khawatir dan putus asa karena dalam setiap masalah selalu ada peluang (*opportunity*). Berbagai peluang yang muncul di masa pandemi antara lain di bidang industri farmasi, industri kimia,



MIRAMDANI

Suasana sepi di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (24/4/2020). Pemerintah beberapa kali melalui Kementerian Perhubungan menghentikan aktivitas penerbangan komersial baik dalam dan luar negeri. Akibatnya industri penerbangan harus memutar otak untuk tetap bertahan akibat kebijakan pemerintah tersebut.

industri kesehatan, kebutuhan pokok, serta pendidikan.

Sekarang ini persoalannya ialah *supply and demand*. Kedua aspek itu sama-sama tinggi atau berlebih sehingga harus dihadapi dengan penuh kehati-hatian. Krisis kesehatan (pandemi covid-19) yang mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi dan keuangan jangan sampai mengarah ke krisis sosial dan politik. “Untuk itu, masalah pangan harus benar-benar diantisipasi karena urusan



MIRAMDANI

Wisatawan yang didominasi wisatawan lokal memadati pantai wisata Kuta, Bali, beberapa waktu lalu. Sektor pariwisata mulai bertumbuh kembali. Pertumbuhan itu didorong oleh tingkat vaksinasi yang tinggi, pelonggaran mobilitas, dan pengendalian kasus covid-19 yang relatif baik. Saat ini tingkat mobilitas masyarakat, terutama kunjungan ke daerah-daerah pariwisata, terus meningkat.

perut itu nomor satu. Jangan pernah kita mengambil risiko,” ucap Enggar mengingatkan.

Ia memberikan contoh, Vietnam baru membuka diri untuk ekspor pangan setelah mereka secara cermat menghitung ketersediaan pangan untuk konsumsi domestik. Langkah Vietnam tersebut menjadi gambaran bagi kita bahwa semua negara di dunia akan lebih mengutamakan kepentingan dalam negeri ma-

sing-masing sebelum memikirkan untuk membantu negara lain.

Rosan Roeslani, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, menyatakan berdasarkan prediksi Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi dunia pada 2020 terperosok ke kisaran -5,2%, sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di level 0,0%.

Menurut Rosan, tekanan ekonomi tersebut berdampak pada lonjakan jumlah tenaga kerja yang dirumahkan dan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dari waktu ke waktu semakin bertambah. “Sebagai contoh, karyawan perhotelan yang dirumahkan mencapai 430 ribu orang. Bahkan di daerah Jawa Barat banyak yang melaporkan perusahaan mereka sudah tutup,” ungkapnya.

Angka yang diterima asosiasi Kadin terdapat 6,4 juta orang yang dirumahkan. Konsekuensinya perusahaan harus membayar pesangon di saat pengusaha sedang dirundung masalah likuiditas.

Krisis ekonomi yang terjadi akibat pandemi covid-19 berbeda dengan krisis yang terjadi 1998. Pada 1998 UMKM menjadi ujung tombak ketahanan ekonomi, tetapi dalam krisis kali ini UMKM justru yang terkena dampak paling besar.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan sebanyak 5,94 juta debitur perbankan telah direstrukturisasi dengan baki debit (besaran sisa pokok pinjaman dalam periode tertentu) sebesar Rp609,07 triliun sampai dengan 2 Juni 2020. Jumlah tersebut terdiri dari restrukturisasi UMKM sebanyak 4,96 juta debitur dengan baki debit Rp282,64 triliun dan non-UMKM sebanyak 0,99 juta

debitur dengan baki debit sebesar Rp326,43 triliun.

Dengan melihat angka seperti itu, Kementerian Keuangan menyampaikan, apabila ada pengangguran baru lebih dari 5,2 juta orang, kita masuk skenario sangat berat. Artinya, pertumbuhan kita akan berada di level 0,0% atau -0,4%, dan angka kemiskinan baru akan bertambah menjadi 4,9 juta orang.

Pada April 2020, ungkapan Rosan, Kadin memberikan usul resmi kepada Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan bahwa setelah melihat kontraksi ekonomi yang begitu dalam, kita perlu menerapkan berbagai langkah antisipatif yang bisa dilakukan, mulai paket stimulus hingga strategi teknis yang melibatkan pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN), dan swasta. “Adanya pandemi covid-19 ini tentu mengharuskan kita melakukan manuver dengan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Shanti Shamdasani, Presiden & CEO S ASEAN International Advocacy & Consultancy dan Ketua Bidang Ekonomi DPP Partai NasDem, menyatakan, jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia punya potensi untuk *rebound*. Namun, bila melihat *performance* ekonomi Indonesia pada Q1, pertumbuhan ekonomi 2020 diproyeksikan berkisar di angka -2%.

Karena itu, perlu strategi jitu untuk bisa menaikkan posisi Indonesia supaya bisa keluar dari tekanan ekonomi yang ada.

Kita mengalami tekanan ekonomi antara lain karena *weak health care system* (sistem layanan kesehatan yang lemah) dan kalau nanti terjadi pandemi covid-19 gelombang kedua sementara-

ra sistem layanan kesehatan belum terbangun dengan baik, persoalan yang kita alami pada pandemi gelombang pertama akan terulang.

Tadinya, kata Shanti, kita beranggapan bahwa perusahaan-perusahaan farmasi bisa *survive* karena peluang terbuka lebar di masa pandemi, tapi ternyata tidak. Hal itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain. Banyak perusahaan farmasi yang gulung tikar karena rapuhnya sistem layanan kesehatan.

Tekanan ekonomi yang berat itu tentu tidak hanya dialami Indonesia, tapi juga terjadi di berbagai negara. Pertanyaannya, seberapa jauh pemerintah terus menyiapkan stimulus melalui bantuan sosial (bansos) dan bantuan langsung tunai (BLT)? Banyak yang bertanya apakah pada 2021 akan tetap mendapatkan stimulus dari pemerintah meskipun sudah tidak ada pembatasan sosial berskala besar (PSBB) lagi?

Mungkin tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu secara pasti karena harus melihat sampai akhir tahun, bagaimana proses *recovery* ekonomi akan berlangsung. ■



Jadi, setop dulu bicara soal investasi, setop dulu bicara soal ekspor, karena yang harus kita lakukan adalah bagaimana supaya bisa *survive*, bagaimana industri yang sudah ada bisa bertahan dan bergerak kembali.”

**Suryoprato**  
Jurnalis Senior

## 4 Perlu Antisipasi Hadapi Kondisi Terburuk

**S**ELAKU panelis dalam diskusi yang berlangsung 10 Juni 2020 itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NaDem, Martin Manurung, mengingatkan bahwa pandemi covid-19 dan dampak ekonomi yang ditimbulkan hendaknya tidak diukur hanya dengan melihat tinggi-rendahnya harga di pasaran. “Tidak semuanya harus dengan pertimbangan atau berdasarkan harga,” tegasnya.

Menurutnya, setidaknya terdapat tiga sektor yang harus dipacu, yakni sektor kesehatan, pangan, dan energi. Harga ketiga komoditas tersebut selama masa pandemi covid-19 bertumpu pada mekanisme pasar. Artinya, ketika kita ingin mencari yang murah, kita akan sulit mendapatkannya karena produsen belum tentu mau menjual. Hal itu terjadi karena setiap negara akan berupaya keras untuk mengamankan kepentingan nasional masing-masing.

Selanjutnya mengenai pertumbuhan ekonomi, ujar Martin, Menteri Keuangan mengatakan pertumbuhan ekonomi pada 2020 berada pada kisaran 0% hingga -0,4%. Namun, kita harus bisa mengantisipasi hal itu sampai ke angka yang lebih ekstrem, misalnya -5%. Artinya, ada proyeksi atauantisipasi tingkat keterpurukan ekonomi hingga ke angka yang lebih tinggi karena tidak seorang pun yang dapat memastikan kondisi sosial ekonomi ke depan selama masa pandemi. “Jadi, harus ada antisipasi untuk menghadapi kondisi terburuk yang berpotensi terjadi ke depan,” tegas politikus muda Partai NasDem itu.

Ia menilai kebijakan pemberian stimulus seperti BLT dan kartu prakerja tidak terlalu berhubungan dengan apa yang terjadi selama masa pandemi. “Mungkin kartu prakerja bagusya diberikan sebelum covid-19, ketika orang kehilangan pekerjaan dan punya waktu cukup untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan kerja. Sekarang bukan waktunya untuk itu,” tutur Martin.

Menurutnya, pada masa pandemi, orang kehilangan pekerjaan bukan karena persoalan *skill*, melainkan karena kehilangan *opportunity*. Oleh karena itu, *opportunity*-nya yang harus diciptakan, bukan mengasah *skill* melalui pelatihan-pelatihan *online*. “Jadi, kartu prakerja itu tidak perlu, triliun rupiah duit habis tanpa hasil konkret.”

Ia juga menyoroti kebijakan pemulihan ekonomi yang ditandai dengan munculnya istilah dana talangan yang tidak pernah ada sebelumnya. Dana talangan dinilai akan menimbulkan masa-

lah karena banyak BUMN penerima dana tersebut bukan 100% dimiliki negara. Itu berarti dana talangan juga dinikmati pemegang saham yang bukan dari unsur pemerintah. “Lebih tepat menggunakan skema penyertaan modal ke BUMN ketimbang dana talangan,” paparnya.

Panelis lainnya, jurnalis senior Suryopratomo (Tommy), menjelaskan pandemi covid-19 dan segala akibatnya telah membawa kita pada situasi yang lebih buruk daripada krisis ekonomi yang terjadi 1998 dan 2008. Bahkan, bisa dikatakan lebih buruk daripada Perang Dunia II. “Apa yang kita hadapi ini menerpa semua level, semua kelompok usaha, mulai mikro, kecil, menengah, hingga besar,” katanya.

Ia menyitir pernyataan Jack Ma bahwa dalam situasi seperti ini jangan bicara tentang untung dan tumbuh karena bisa *survive* saja sudah menjadi keberuntungan yang luar biasa. Oleh karena itu, kalau kita berbicara kurva, yang akan terjadi ialah kurva huruf V, yakni kita turun kemudian akan bisa tumbuh lagi pada 2021.

Jangan sampai kurva yang akan terjadi ke depan ialah kurva huruf L yang kita tidak tahu ujungnya sampai ke mana. “Jadi, setop dulu bicara soal investasi, setop dulu bicara soal ekspor, karena yang harus kita lakukan adalah bagaimana supaya bisa *survive*, bagaimana industri yang sudah ada bisa bertahan dan bergerak kembali,” jelas Tommy.

Sekarang jumlah pengangguran sudah mencapai 6,4 juta

orang. Hal itu terjadi karena 85% pilar ekonomi di bawah koordinasi Kadin, baik sektor mikro, kecil, menengah, maupun besar, sedang berada dalam kondisi yang sangat sulit. “Mereka sudah kehabisan tabungan, kehabisan modal, sehingga membutuhkan modal kerja untuk bisa bergerak,” papar Tommy.

Oleh karena itu, sebelum kita memikirkan upaya-upaya pemulihan ekonomi yang berorientasi jangka menengah dan jangka panjang, hal yang lebih penting dan mendesak untuk diatasi secepat mungkin ialah menyelesaikan persoalan-persoalan jangka pendek yang ada di depan mata.

Jurnalis senior Saur Hutabarat menyatakan tidakkah sebaiknya Indonesia memberikan dana kepada bisnis kecil seperti salon, cukur rambut, dan pijat kaki refleksi sehingga mereka tidak bayar sewa dan berbagai biaya lainnya yang memberatkan?

Apabila yang dibutuhkan ialah sebuah penyelamatan, kata Saur, dimulai dari menyelamatkan bisnis yang paling kecil, tidak hanya menyelamatkan pengangguran.

Apabila para pengusaha kecil yang jumlahnya sangat banyak itu dibantu dalam hal biaya pengeluaran selama tiga bulan, pengaruhnya sangat besar.

Apabila perspektif makro ditinjau, sudah sangat jelas minus pertumbuhan, tetapi jika bicara unit analisis terkait dengan tenaga kerja, unit yang paling kecil sebenarnya bisa menyerap tenaga kerja yang sangat besar. Itu memacu daya beli.

Memperhatikan bisnis usaha yang mampu secara cepat

menyerap tenaga kerja, dengan satuan-satuan kecil, tetapi bisa menggerakkan ekonomi secara langsung.

Tidak ada negara yang bisa sprint. Korona membuat negara memandang semua dengan cara maraton. Itu sebabnya kita tidak boleh tergesa-gesa memikirkan perubahan ekonomi akan berlangsung secara cepat.

Pandangan yang terlalu optimistis dalam berpikir itu berbahaya. Lebih baik berpikir pesimistis, tetapi bertindak optimistis. Dengan cara berpikir demikian, bisa disampaikan bahwa kabinet kita terlalu kering ekonom. Baiklah kita memulai dengan *small beautiful*, kecil-kecil, tetapi indah karena dapat bergerak maju. ■



# Meramu Jalan Kebangkitan Perekonomian Bangsa 2021

# 1 Latar Belakang: Tatkala Dunia Masuk Babak Baru Resesi

---

---

**D**ESEMBER 2019 dunia dikejutkan virus–belakangan diberi nama dan populer dengan sebutan covid-19–yang berawal dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok.

Virus tersebut mampu menyebar melalui interaksi antarmanusia dengan medium *droplet*. Interaksi semacam itu menyebabkan laju penularan virus itu demikian cepat.

Pada 13 Maret 2020, badan kesehatan dunia WHO mendeklarasikan covid-19 sebagai pandemi. Total warga dunia yang terdampak oleh virus tersebut mencapai 61 juta jiwa dan telah memakan korban jiwa sebanyak 1,5 juta orang hingga Desember 2020.

Sampai sedemikian jauh, saat itu belum ada tanda-tanda ke-



MIRAMDANI

Suasana salah satu pusat perbelanjaan atau mal di Jakarta, Minggu (25/10/2020). Pandemi covid-19 sangat memukul pengusaha ritel karena kerugian ekonomi yang ditimbulkan. Setidaknya omzet peritel turun hingga Rp200 triliun. Kondisi itu terjadi seiring dengan bayang bayang-bayang resesi dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

ganasan covid-19 melandai. Itu jelas fakta yang menakutkan dari banyak sejarah pandemi yang pernah terjadi di Planet Bumi ini.

Berbagai kebijakan diterapkan negara-negara di dunia, salah satunya ialah ‘mengunci’ mobilitas manusia guna mencegah interaksi antarmanusia, atau yang dikenal dengan istilah *lockdown*.

Berkurang drastisnya mobilitas manusia membuat sisi permintaan (*demand*) dunia anjlok. Kegiatan produksi pun demikian

sehingga rantai suplai dunia terganggu. Secara agregat, terganggunya persediaan dan permintaan membuat aktivitas ekonomi mandek dan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi dalam tempo singkat. Dunia masuk babak baru resesi yang sama sekali tidak terduga sebelumnya.

Indonesia sendiri resmi memasuki resesi pada triwulan ketiga (Q3) 2020 setelah dua kuartal berturut-turut terkontraksi: minus 3,49% (Q3) dan minus 5,32% (Q2).

Pemerintah sendiri telah mengambil kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang memberikan penekanan pada aspek kesehatan (pencegahan penyebaran covid-19) dan aspek pemulihan ekonomi secara simultan demi menahan dampak turunan dari pandemi yang sama-sama mencemaskan: tingkat pengangguran yang meledak, kemiskinan melonjak yang menyulit munculnya banyak masalah sosial lainnya, serta terhentinya agenda-agenda pembangunan yang dibutuhkan rakyat.

Dengan dilatarbelakangi realitas itulah, Forum Diskusi Denpasar 12 menganggap penting menggelar diskusi bertajuk Indonesia Economy Outlook (Meramu Jalan Kebangkitan Perekonomian Bangsa 2021). ■



Bank Dunia sudah membuat sebuah catatan yang diterbitkan pada Desember 2020 dan yang menarik ialah ekonomi Indonesia dinilai masih memiliki kesempatan untuk tumbuh lebih baik. Itu tentu menjadi harapan kita semua.”

**Lestari Moerdijat**  
Wakil Ketua MPR RI

## 2 Terus Bangkit di Masa Sulit

**K**ETIKA memberikan pengantar diskusi, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie) menjelaskan diskusi mengambil tema ‘Indonesia Economy Outlook – Meramu Jalan Kebangkitan Perekonomian Bangsa 2021’ karena kita berkeinginan meramu jalan agar kita bisa terus bangkit di masa sulit.

Sengaja topik itu dipilih menjadi topik bagi penutup diskusi 2020 karena kita tahu persis bahwa pada 2020 kita berhadapan dengan kondisi yang sangat luar biasa.

Kita diminta untuk beradaptasi, bertahan, dan mencari jalan keluar, termasuk mencari cara bagaimana kita melakukan sesuatu agar *survive*.

Posisi itulah yang harus kita terima dengan konsekuensi akan berpengaruh kepada kehidupan kita, bukan hanya terkait dengan masalah kesehatan, melainkan juga situasi yang menimbulkan krisis multidimensi.



MIBRIYANBODO HENDRO

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat memberi pengantar saat Forum Diskusi Denpasar 12, di Jakarta, Rabu (23/12/2020). Diskusi bertema 'Indonesia Economy Outlook – Meramu Jalan Kebangkitan Perekonomian Bangsa 2021'. Topik itu dipilih menjadi topik bagi penutup diskusi pada 2020 setelah pada tahun itu ekonomi Indonesia berhadapan dengan kondisi yang sangat luar biasa.

Catatan-catatan dari berbagai lembaga keuangan dunia, demikian digarispawahi Rerie, menunjukkan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan *gross domestic product* (GDP) dunia, mengalami tekanan dan kontraksi yang luar biasa.

Secara khusus terhadap Indonesia, Bank Dunia sudah membuat sebuah catatan yang diterbitkan pada Desember 2020 dan yang menarik ialah ekonomi Indonesia dinilai masih memiliki ke-

sempatan untuk tumbuh lebih baik. Itu tentu menjadi harapan kita semua.

Dengan begitu, pada 2021 kita tetap bisa berdiri tegak dan bertahan saat berhadapan dengan ketidakpastian. Harapan baru memang sudah kita lihat dengan adanya vaksin dan apalagi beberapa waktu yang lalu Presiden Jokowi sudah mengemukakan bahwa vaksin akan diberikan kepada seluruh rakyat tanpa terkecuali.

Pada kesempatan ini izinkanlah, “Saya menyampaikan selamat merayakan Natal kepada saudara-saudara, bapak, ibu hadirin yang merayakan dan juga selamat menyambut tahun baru 2021.”

“Semoga tahun depan kita semua diberi keberkahan, perlindungan dari Allah SWT Tuhan YME, dan kita diberi selalu hidayah sehingga kita mampu melalui semua kesulitan dan dapat berdiri tegak untuk bersama-sama menjadi bagian dari Indonesia dan membangun Indonesia maju dan sejahtera,” demikian Lestari. ■



Kalau kita berjalan dengan kebijakan moneter seperti ini dan fiskal kita juga baik, tidak mengganggu ekonomi dan bahkan mendorong pertumbuhan ekonomi, kita akan tumbuh dengan baik.”

**Purbaya Yudhi Sadewa**  
Ketua Dewan Komisiner LPS

## 3 Kebiasaan Belanja Berubah, Bank BUMN Jangan cuma Cari Profit

**E**NGGARTIASTO Lukita (Menteri Perdagangan RI 2016-2019) mengungkapkan pada 2020 Indonesia memang masih memiliki peluang bangkit, tetapi tidak untuk 2021.

Memasuki 2021, “Jangan terlalu berharap bahwa semua ini akan selesai dalam waktu singkat,” katanya.

Enggartiasto lalu mengungkapkan pertumbuhan ekonomi yang minus di sejumlah negara pada 2020. Berdasarkan data The World Economic Forum, *growth is objective at -4.9%*, AS mengalami pertumbuhan ekonomi -8%, sedangkan untuk negara-negara Eropa, pertumbuhannya rata-rata -10,2%, dan Jepang -6%.

Penemuan vaksin, menurut Enggar memang akan membantu, tetapi tidak bisa dalam waktu singkat menyelesaikan masalah. “Kita perlu lihat satu tahun lagilah dampaknya,” katanya.

Namun, Enggar memperkirakan, secara objektif, dua-tiga tahun lagi baru kelihatan pemulihan ekonominya dan dampaknya bagi Indonesia.

Enggar berpendapat, inilah pertama kali sejak 1930 dan pada zaman modern seperti saat ini covid-19 berdampak menjadikan kondisi ekonomi dunia terpuruk; *supply* dan *demand* terganggu.

Siapa yang menyangka, covid-19 menyebabkan 30 juta orang warga negara-negara di Asia Tenggara langsung kehilangan pekerjaan; 18 juta orang masuk jurang kemiskinan dan dari 18 juta itu, 3 juta di antaranya sangat-sangat miskin.

Enggar mengharapkan dan meyakini para menteri pembantu Presiden, khususnya Menteri Perdagangan, bisa membawa Indonesia untuk eksis di tengah pasar yang sekarang begitu kecil.

Enggar menegaskan, jangan pernah kita terlalu optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi kita tetap positif.

Mengapa? Karena hampir semua negara menghadapi masalah. Benar bahwa sejak Januari-September 2020, kita surplus US\$13,5 juta. Namun, perlu diingat, surplusnya itu disebabkan impor kita turun tajam, bukan karena ekspor kita naik.

“Jadi, sekali lagi jangan pernah kita merasa hebat karena kita surplus. Saya dalam waktu tertentu lebih memilih adanya defisit kalau itu diakibatkan impor barang modal dan barang bahan baku,” katanya.

Enggar mengamati cara berbelanja konsumen sejak covid-19 juga berubah. Sebelum covid-19, masyarakat masih datang ke mal



MIRAMDANI

Gedung perkantoran di kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu (25/3/2020). Pemprov DKI Jakarta melakukan pembatasan aktivitas di Ibu Kota sehubungan dengan meluasnya pandemi covid-19. Covid-19 menyebabkan 30 juta orang warga negara-negara di Asia Tenggara kehilangan pekerjaan.

dan pusat-pusat perbelanjaan untuk membeli pakaian, sepatu, alat-alat kecantikan, furnitur, dan barang-barang elektronik.

Sejak ada covid-19, menurut Enggar, masyarakat tidak lagi mengunjungi tempat-tempat itu. Realitas itu pasti berdampak pada sektor ritel tradisional karena masyarakat mengalihkan kebiasaan belanja ke *e-commerce*.

“Jadi, yang semula *offline* menjadi *online*. Ini harus menjadi

perhatian dan menjadi catatan untuk teman-teman yang ada di Komisi VI DPR. Bayangkan, konsumen yang berbelanja ke pasar tradisional turun sampai 30%,” kata Enggar.

Pola hidup yang berubah itu harus diikuti dengan kebijakan dari pemerintah guna membantu pedagang-pedagang di pasar tradisional. “Kalau tidak, mereka akan menjadi masalah tersendiri. Demikian juga dengan keberadaan supermarket dan hipermarket,” tambah Enggar.

Agar perekonomian tetap berputar, khususnya pelaku UMKM, Enggar juga menyoroti dunia perbankan, khususnya terkait dengan bunga pinjaman.

Bank-bank milik pemerintah sebaiknya memulai untuk menurunkan bunga pinjaman. Enggar minta agar anggota DPR mengingatkan bank-bank BUMN agar dalam situasi seperti ini jangan semata-mata mencari profit.

“Seharusnya mereka bisa juga menjadi *agent of development* untuk pertumbuhan ekonomi. Ini sangat penting,” demikian Enggartiasto.

### **Menumbuhkan Ekonomi dengan ‘Bahan Bakar’ Uang**

Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa mencoba menguraikan bagaimana ekonomi Indonesia saat ini hingga ke depan dan seperti apa peran LPS.

Ia sependapat dengan apa yang dikatakan mantan Mendag

Enggartiasto Lukita bahwa kecenderungan penularan covid-19 masih akan meningkat dan akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

Tidak hanya Indonesia, semua negara bakal mengalami tekanan yang cukup dahsyat seiring dengan merebaknya covid-19. “Hampir semua negara mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Kalaupun ada yang tumbuh positif, hanya sedikit,” kata Purbaya.

Dalam mengantisipasi dampak covid-19 di sektor ekonomi, menurut Purbaya, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan ekonomi yang diselaraskan dengan posisi keuangan dalam APBN, di antaranya terkait dengan pajak.

Pemerintah juga telah mengeluarkan Perppu No 1 Tahun 2020 yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah dan LPS untuk membantu menjaga stabilitas finansial.

Purbaya menjelaskan dana yang dikeluarkan pemerintah untuk menangani dampak covid-19 sudah cukup besar, yaitu Rp695,2 triliun dan diprioritaskan untuk sektor kesehatan dan perlindungan sosial, utamanya masyarakat kelas menengah ke bawah.

Langkah yang ditempuh pemerintah mungkin saja membuat masyarakat skeptis apakah akan membawa hasil atau sebaliknya. “Kalau menurut perhitungan kami, tanpa langkah ini, pertumbuhan kita yang negatif akan lebih besar daripada sekarang atau triwulan kedua tahun lalu,” kata Purbaya.

Hitung-hitungan di atas kertas, tambah Purbaya, “Dampaknya



MIRAMDANI

Maskot Mandiri Covid Rangers berjaga di dekat ATM Bank Mandiri, di Gedung Mandiri Plaza, Jakarta, Selasa (21/7/2020). Kehadiran maskot Mandiri Covid Rangers menjadi simbol dukungan Bank Mandiri pada upaya pemerintah memutus penyebaran covid-19. Bank-bank milik pemerintah disarankan untuk menurunkan bunga pinjaman dan jangan semata-mata mencari profit.

amat signifikan untuk ekonomi kita. Utamanya dalam mencegah kolapsnya *demand* secara berlebihan.”

Faktanya saat ini, kita mengalami penurunan *demand* yang sangat signifikan. Tanpa langkah pemerintah, *demand* kita bakal turun lebih dalam lagi.

Untuk mencegah covid-19, pemerintah Singapura melakukan *lockdown*. Jika Indonesia mengikuti Singapura, apakah kita akan

tenang? Purbaya lalu mengingatkan pengalaman buruk 1998.

Jadi, tegas Purbaya, pemberian stimulus fiskal amat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Selama ini pemerintah sudah melakukan pencegahan, paling tidak ekonomi tidak mengalami kontraksi berlebihan.

Purbaya mengungkapkan, pada awal Maret hingga April 2020, pertumbuhan ekonomi kita mengalami tren menurun. Pada waktu itu kita berkeyakinan bahwa jika kecenderungan itu kita biarkan, perekonomian kita akan terus macet dan pertumbuhannya semakin ke bawah.

Pada saat itu orang takut keluar rumah untuk berbelanja. “Jadi, yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun bank sentral adalah bagaimana cara menambah uang ke sistem perekonomian supaya kalau *demand*-nya jatuh, *nggak* jatuh-jatuh amat,” kata Purbaya.

Ia mengungkapkan, pada Maret, April, Mei, dan Juni 2020, dunia perbankan Indonesia sudah megap-megap. Ada beberapa bank yang mengalami kesulitan keuangan.

“Kami waktu itu agak khawatir kalau tidak segera dibereskan, *nggak* lama lagi kita akan mengalami keadaan yang sangat buruk. Untungnya, pemerintah mengerti betul apa yang sedang terjadi sehingga uang mulai di-*inject* ke sistem perekonomian dengan cepat,” ujar Purbaya.

Langkah seperti itulah yang membuat tiba-tiba sistem perbankan kita stabil. Likuiditas perbankan kita cukup. Itu juga yang

memberi ruang *recovery* pada triwulan ketiga 2020.

Fakta itu mengakibatkan ruang bagi perbaikan ekonomi kita tumbuh dan terbuka walaupun ada tekanan dari efek covid-19. Tidak bisa dimungkiri, gelombang ekonomi global memang akan mengganggu ekonomi Indonesia karena hampir semua bagian dunia terkena oleh dampak covid-19, terutama pasar ekspor.

Purbaya mengatakan 80% dari ekonomi kita ditopang *domestic demand*. Jadi, kalau instrumen ini, uang, fiskal, dan lain-lain disiapkan ke dalam sistem ekonomi dan dibiarkan tumbuh dengan ‘bahan bakar’ uang yang cukup, ekonomi kita masih akan tumbuh dengan lumayan.

Jadi, walaupun ekonomi global berpengaruh jelek ke Indonesia, “Saya masih percaya bahwa nasib kita berada di tangan kita sendiri. Kalau kita berjalan dengan kebijakan moneter seperti ini dan fiskal kita juga baik, tidak mengganggu ekonomi dan bahkan mendorong pertumbuhan ekonomi, kita akan tumbuh dengan baik,” katanya.

Dari bulan ke bulan, menurut Purbaya, permintaan akan barang dan jasa cenderung naik, sampai dengan Desember 2020 diperkirakan tumbuh 52%. Titik terburuk kita sudah lewat. Keyakinan konsumen pun sudah mulai meningkat sedikit pada bulan terakhir, November 2020. Indeks manufaktur sudah di atas 50%. Artinya tidak ada kontraksi. Bahkan sangat mungkin sektor manufaktur akan terus berkembang.

Purbaya menjelaskan kebijakan pelonggaran moneter dan

fiskal yang dibantu kebijakan fiskal dari segala sisi, baik yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun LPS, sudah bisa menurunkan suku bunga ke level yang cukup rendah.

Itu artinya, “Ekonomi kita sudah menunjukkan ke indikasi perbaikan meskipun kami menyadari bahwa perbaikan itu masih perlu diwaspadai. Ke depan kita akan fokus pada kebijakannya. Mendorong perbankan dan undang-undang kredit. Mendorong suku bunga kredit melalui sinergi kebijakan di setiap otoritas,” kata Purbaya.

OJK, BI, dan LPS harus berkoordinasi untuk menangani pandemi covid-19. Jangan sampai kebijakan satu daerah mengganggu proses *recovery* ekonomi yang telah dirancang pemerintah pusat.

Yang tidak kalah penting, menurut Purbaya, ialah mendorong intensifikasi peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan masyarakat bahwa menyimpan uang di bank masih dan tetap aman. ■



Perdagangan dari investasi untuk meningkatkan nilai tambah dan meningkatkan daya saing produk Indonesia akan mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia.”

**Bustanul Arifin**

Professorial Fellow at the International Center for Applied Finance and Economics of Bogor Agricultural University (Inter-CAFE IPB)

## 4 Pertanian Menjadi Bantalan Pemulihan Ekonomi

**B**USTANUL Arifin, Professorial Fellow at the International Center for Applied Finance and Economics of Bogor Agricultural University (Inter-CAFE IPB), menyoroti topik diskusi dari sudut pandang pertanian yang, menurut dia, mampu menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi di masa pandemi.

Ia menyebut pertanian ialah bantalan ekonomi yang terbukti mampu tumbuh 2,19% pada triwulan kedua 2020 dan 2,15% pada triwulan ketiga.

Bandingkan dengan sektor lain. Menurut Bustanul, serbuan covid-19 telah mengakibatkan naiknya angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebanyak 9,77 juta orang (7,07% angkatan kerja) pada Agustus 2020, atau naik signifikan dari 7,10 juta orang (5,23% angkatan kerja) pada Agustus 2019.

Pada awal covid-19, kata Bustanul mengutip data lembaga survei, pada awal 2020, pendapatan sektor informal naik. Namun, begitu memasuki April 2020 menurun menjadi sektor yang paling

terdampak.

Kalau dilihat dari pola, pengeluaran untuk hobi dan pembelian barang-barang elektronik langsung turun karena masyarakat takut bepergian untuk belanja.

Kunjungan ke restoran, menurut Bustanul, pada September 2020 mengalami peningkatan, tapi pada bulan berikutnya kembali mengalami penurunan.

Harga pangan relatif stabil. Bustanul menjelaskan, secara umum stok beras cukup aman karena produksi cukup baik. Stok gula sampai Februari masih aman setelah ada relaksasi impor.

Penyerapan beras oleh Bulog, menurutnya, berlangsung baik, stok cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 1 juta ton. Pasokan bawang merah hingga awal 2020 juga baik. Harga cabai sedikit naik karena musim hujan membuat produksinya rendah. Harga bawang putih relatif normal, stok impor masih ada.

Bustanul memperkirakan perekonomian Indonesia akan pulih pada triwulan kedua 2021 seiring dengan mulai membaiknya konsumsi rumah tangga dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) dan adanya restrukturisasi utang UKM.

Dari fenomena di atas, menurut Bustanul, sektor pertanian terbukti telah berfungsi sebagai bantalan untuk menghadapi resesi ekonomi.

Oleh sebab itu, saran Bustanul, petani harus dilindungi secara memadai. Pendistribusian bantuan sosial ke petani harus baik dan sampai kepada yang berhak menerima, begitu pula kebijakan



M/IRAMIDANI

Pengunjung makan di salah satu tempat makan yang sepi di pusat perbelanjaan, Jakarta, Sabtu (21/3/2020). Pembatasan dari pemerintah akibat penyebaran virus covid-19 berimbas pada sepihnya bisnis kuliner dan pusat perbelanjaan di Jakarta.

pemberian kartu tani.

Selain itu, perubahan teknologi, rantai nilai yang tangguh, *climate-smart*, bioteknologi modern, pengembangan digitalisasi, dan akses ke media sosial harus dikembangkan dengan melibatkan petani.

Investasi manusia dan aransemen kelembagaannya harus berkontribusi pada mekanisme penanggulangan dan pemulihan

agar ekonomi kembali normal dan pulih. Peningkatan produksi pangan, produktivitas, dan efisiensi juga harus dilanjutkan.

Upaya stabilisasi harga untuk menjaga daya beli masyarakat dan akses terhadap pangan harus terus dilakukan. “Perdagangan dari investasi untuk meningkatkan nilai tambah dan meningkatkan daya saing produk Indonesia akan mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia,” kata Bustanul.

Ketika menjawab pertanyaan peserta diskusi, Bustanul mengatakan, untuk memulihkan ekonomi, investasi menjadi sangat penting, kemudian infrastruktur yang mendukung revolusi digital. “Kalau ini tidak dilakukan, kita bakal menjadi penjual produk-produk orang lain.”

“Oleh sebab itu, saya minta DPR agar negara meningkatkan anggaran *research* dan *development*. Untuk diketahui, Tiongkok menginvestasikan dana mereka untuk riset dan pengembangan, juga inovasi,” kata Bustanul.

Ia melanjutkan, Tiongkok maju seperti sekarang dan menjadi *smart country* bukan dadakan dan melompat begitu saja. Pada 1980-1990-an negeri itu mengirim orang-orang *engineer* ke luar negeri. Setelah kembali, mereka membangun negara mereka. Itulah revolusi yang terjadi di Tiongkok. Tiongkok menjadi seperti sekarang bukan dengan cara sulap.

Covid-19 memang memukul ekonomi. Bustanul memperkirakan optimisme baru akan muncul pada triwulan kedua dan ketiga 2021. “Tapi ini juga bergantung pada bagaimana kita menghadapi-

nya pada akhir bulan ini sampai pada momentumnya,” katanya.

Bustanul mengusulkan proyek dan rencana-rencana untuk sektor-sektor yang memang bisa berpotensi positif sebaiknya dilanjutkan. “Bagaimanapun sektor pertanian dalam situasi seperti ini menjadi bantalan dalam mengatasi krisis ekonomi. Sektor tersebut selama ini menjadi tempat menampung orang-orang dari kota yang kehilangan pekerjaan, tetapi perlu diingat, ini *nggak* bisa selamanya,” katanya.

Menurut Bustanul, *startup* dan digitalisasi produk-produk pertanian juga bisa menjadi harapan mempertahankan perekonomian Indonesia. ■



Indonesia akan mendapatkan tambahan US\$135 triliun untuk *annual GDP* apabila kita bisa meningkatkan kesetaraan gender.”

**Shinta Witoyo Dhanuwardoyo**  
CEO/Founder *Bubu.com* & Angel Investor

## 5 Startup Solusi Mendorong Perekonomian Nasional

**S**ELARAS dengan Bustanul Arifin, CEO/Founder *Bubu.com* & Angel Investor, Shinta Witoyo Dhanuwardoyo, berpendapat guna mendorong ekonomi berbasis internet di Indonesia, *startup-startup* memang perlu didukung dan didorong.

Menurut Shinta, pertumbuhan internet ekonomi di Indonesia akhir-akhir ini sangat besar dan cepat. Kalau kita lihat dari segi *market* saja, Indonesia mendominasi pasar *e-commerce*, *online media*, *online travel*, *online transport*, dan *food delivery*.

Ada enam *startup* yang berbasis teknologi di Indonesia masuk kategori *unicorn startup* dari 13 di Asia Tenggara. “Jadi, kalau kita lihat *Traveloka*, *JD.Id*, *Tokopedia*, *OVO*, *Bukalapak*, dan ditambah *Gojek*, sebenarnya sudah masuk *decacorn*, bukan lagi *unicorn*, sebab nilainya sudah di atas US\$1 miliar, bahkan mungkin sudah US\$10 miliar,” kata Shinta.

Menurut dia, *marketplace* model *Tokopedia* bahkan sudah berkontribusi lebih dari 1,5% ekonomi di Indonesia dengan *gross merchandise value* (GMV) sebesar US\$15 miliar.

*Tokopedia*, masih menurut Shinta, ialah salah satu *e-commerce* terbesar di Indonesia dan *marketplace* itu sangat membantu terdorongnya ekonomi berbasis internet di Indonesia.

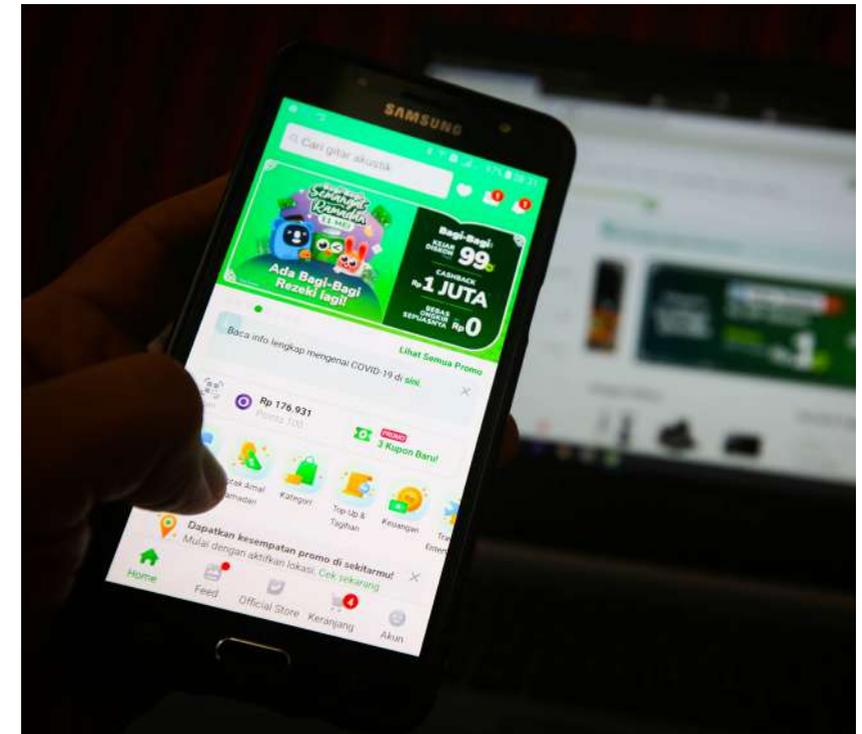
*Gojek* disebut Shinta sebagai *startup* terbesar di Indonesia yang cukup mengurangi *unemployment rate* sebesar 15%. *Gojek* mampu menciptakan banyak lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan sebesar 44% dan peningkatan 31% dalam pengeluaran (belanja).

Terhadap realitas tersebut, menurut Shinta, tidak berlebihan jika *startup* yang kini terus bermunculan dan berkembang perlu terus didorong.

Ia menjelaskan, pada akhir 2019 pihaknya meluncurkan *startup platform* yang diberi nama *Startupindonesia.co*. Hal itu dilatarbelakangi adanya ketidaksetaraan akses bagi para pelaku *startup* di Indonesia.

Shinta mengatakan kebanyakan *startup* yang mendapat pendanaan ialah mereka yang ada di Jakarta. “Kalau di luar Jakarta, mereka susah untuk bertemu dengan mentor dan investor. Makanya kami merasa penting dan perlu untuk membuat sebuah platform *online* sehingga kita bisa membantu pelaku *startup* dari mana pun. Kita bisa membantu memberikan akses setara dan sama untuk bisa bertemu dengan investor dan akses ke mentor.”

Pihaknya juga bisa membantu *startup* dari sisi konsultasi bisnis dan model-model bisnisnya. “Nantinya kita juga bantu me-



MIRAMDANI

Pengguna *Tokopedia* bertransaksi melalui gawai di Jakarta, Kamis (7/5/2020). *Tokopedia* ialah salah satu *e-commerce* yang membantu terdorongnya ekonomi berbasis internet di Indonesia saat pandemi covid-19.

reka bagaimana agar bisa melakukan *online pitching* kepada para investor. Kita *launch* baru pertengahan Desember dan sekarang kita sudah mempunyai lebih dari 10 ribu *user database*,” kata Shinta.

Langkah yang dilakukan, jelas Shinta, melakukan kurasi *startup-startup* di basis teknologi untuk bisa bertemu dengan *venture*

*capital* yang memang mencari *startup* setelah ada pandemi. “Para *venture capital* selama ini mengalami kesulitan untuk bertemu secara fisik dengan *startup*. Akhirnya mereka menggunakan platform kita. Kita lalu lakukan *speed dating*. Kita kurasi dulu data *startup*-nya. Kita terus kurasi. Setelah itu, baru kita siapkan pertemuan untuk berpartner dengan *venture capital* papan atas,” katanya.

Yang menarik, menurut Shinta, dari *startup-startup* yang dikurasi, 49% berasal dari luar Jakarta, 52% di antaranya mereka sudah *revenue stage*. Jadi, mereka sudah *monetize*. Sebanyak 21% dari *startup* yang dikurasi mendapat *second call* dari *venture capital*. Konkretnya, setelah bertemu sekali, mereka minta bertemu lagi.

Untuk standar industri, menurut Shinta, itu cukup tinggi karena biasanya kalau *venture capital* bertemu sendiri tanpa melalui platform *Startupindonesia.co*, mereka hanya sukses untuk bertemu kedua kalinya hanya 5%.

“Jadi, kita membantu kurasi agar dapat mendorong *venture capital* untuk bertemu dengan *startup* kedua kalinya. Beberapa *venture capital* merasa sangat terbantu dengan adanya platform kita,” tambah Shinta.

Guna menggalakan perekonomian digital, Shinta menjelaskan, pihaknya juga punya program baru bernama *Supergirls in Tech*. Itu ialah program inkubasi teknologi yang berfokus pada kesetaraan gender di dunia bisnis.

Program itu dilatarbelakangi fakta bahwa persentase perempuan pada angkatan kerja di Indonesia sebesar 38%, tapi kontribusi GDP-nya hanya 29%. “Indonesia akan mendapatkan tambahan US\$135 triliun untuk *annual GDP* apabila kita bisa meningkatkan kesetaraan gender,” jelas Shinta.

Melalui program *Supergirls in Tech*, pihaknya mengundang sekitar 100 mahasiswa tahun terakhir dari berbagai universitas di seluruh Indonesia untuk bisa berpartisipasi di inkubator bisnis itu yang memang dikhususkan buat kaum perempuan.

Lewat *Supergirls in Tech*, Shinta mempertemukan para perempuan dengan mentor. Diharapkan, mereka bisa membuat proyek-proyek bisnis yang dibantu teknologi sehingga mereka mau menjadi *entrepreneur* setelah proses pendidikan mereka di kampus selesai.

Lalu pelaku *startup* seperti apa yang sudah berhasil memanfaatkan *Startupindonesia.co*? Shinta menyebut nama *Jahitin*. Pemiliknya seorang perempuan bernama Asri.

*Startup Jahitin* mempekerjakan lebih dari 1.000 perempuan penjahit. “Selama pandemi berjalan empat bulan itu dia sudah mencapai Rp2,4 miliar dalam bentuk *revenue which is this is really helpful* untuk bisa *connecting* dengan para perempuan penjahit,” ujar Shinta.

Kesimpulannya, menurut Shinta, dengan mendukung *startup* di Indonesia, kita bisa membantu untuk mendorong perekonomian Indonesia. ■



**Kami selalu tekankan tentang makna TDA, yaitu tangan di atas. Artinya kita harus siap memberi. Saya pikir, pemerintah juga harus begitu.”**

**Wisnu Dewobroto**

Sekjen Komunitas Tangan di Atas (TDA)

## 6 Menanti Orkestra Besar Tangan di Atas

**T**IDAK bisa dimungkiri, peran UKM dalam menggerakkan roda perekonomian nasional memang tak bisa diragukan lagi. Kelompok usaha itulah yang jadi penopang kegiatan bisnis tetap berjalan.

Setidaknya realitas seperti itulah yang terjadi, sebagaimana diungkap Presiden Komunitas Tangan di Atas (TDA) Doni Kris Puriono dan sekjennya, Wisnu Dewobroto.

Doni mengungkapkan Komunitas TDA sampai sekarang mempunyai anggota kurang lebih 25 ribu UKM yang tersebar di 98 kota dan 6 negara.

Di enam negara? Ya, setidaknya mereka ialah para WNI yang bekerja di negara-negara itu dan menjadi anggota TDA. Menurut Doni, keberadaan TDA berkiprah membantu usaha UKM sudah 14 tahun.

Wisnu menambahkan, TDA ialah sebuah komunitas organik, mandiri, dan di dalamnya tumbuh UKM-UKM yang dinamis.

Yang dimaksud dengan dinamis ialah UKM-UKM anggota TDA

yang mau bertekad untuk terus bertumbuh berkiprah di dunia kewirausahaan.

Karena terus bertumbuh, ada UKM TDA yang sudah berada di level menengah dan besar. “Kalau kita bisa buat profilnya, mayoritas adalah usaha mikro *up to* Rp300 juta, kemudian Rp300 juta ke atas, dan ada yang di atas Rp50 miliar,” kata Wisnu.

Pandemi covid-19 menyadarkan anggota TDA akan pentingnya berkolaborasi yang akhirnya menjadi salah satu pilar utama yang harus dilakukan anggota TDA.

Wisnu mengungkapkan, ketika covid-19 datang dan WHO menetapkan sebagai pandemi, komunitas TDA semakin kuat. Para anggota saling membantu.

Agar TDA semakin *survive*, “Kami terus melakukan kolaborasi dan meluncurkan *TDA TV*. Ini adalah pusat literasi pendidikan kewirausahaan yang fokus ke praktik di lapangan,” kata Wisnu.

Melalui televisi itu, para pelaku UKM berbagi tip. Mereka berbagi bagaimana caranya mengembangkan bisnis melalui *Youtube*. “Target kami membuat 1.000 konten yang bisa diakses UKM di seluruh Indonesia dan berdampak signifikan bagi para anggota komunitas TDA,” tambah Wisnu.

Pada saat pandemi pengurus TDA langsung bergerak di bawah koordinasi Presiden TDA. Wisnu menjelaskan pihaknya memberdayakan apa yang dimiliki. Melakukan dan memulai dari apa yang dimiliki.

Semangat itu membuat anggota TDA semakin solid. TDA

mengumpulkan donasi 10 ribu *hand sanitizer*, alat pelindung diri (APD), dan lain-lain. Covid-19 waktu itu memang membuat pelaku UKM terpapar oleh virus tersebut. “UKM yang bergerak di bidang konveksi membuat APD tenaga medis. Kurang dari dua minggu terkumpul Rp1 miliar,” ungkap Wisnu.

Pada April 2020, untuk menggalang kekuatan, TDA mengadakan acara pesta wirausaha *online*. Lewat acara itu, para pelaku UKM diberi pemahaman tentang kondisi ekonomi yang sesungguhnya berdasarkan fakta. Bukan berita-berita yang kebenarannya diragukan yang banyak berseliweran di media sosial yang membuat pelaku usaha putus asa dan bimbang.

Melalui acara itu, “Kami memberikan aura positif. Kami menjelaskan bahwa *entrepreneurship* di Indonesia jauh lebih baik kalau dibandingkan dengan negara-negara lain,” kata Wisnu.

Pimpinan TDA juga menjelaskan kepada para anggota bahwa kebijakan pemerintah terkait dengan antisipasi dan penanganan covid-19 sudah baik. Begitu pula *government entrepreneurship*-nya juga lebih baik, termasuk *entrepreneur education*-nya.

Wisnu menjelaskan, dalam berbisnis, terutama yang tradisional, para pelaku UKM memang sudah jago-jago. Namun, Wisnu mengakui pada saat mereka jatuh karena ada turbulensi seperti pandemi, banyak di antara mereka yang belum siap.

Disebutkan, perlu banyak waktu untuk beradaptasi. “Mereka tidak bisa langsung berdiri. *Growth mindset*-nya masih kalah kalau dibandingkan dengan pelaku UKM negara-negara lain. Oleh



MIRAMIDANI

Pengunjung melihat produk UKM yang dipamerkan pada Festival Ekonomi Digital Keuangan Indonesia (FEDKI) 2022 di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali, Rabu (13/7). Para pelaku UKM di Indonesia sempat terpukul saat pandemi covid-19, tetapi perlahan mereka bangkit seiring dengan landainya kasus covid-19.

sebab itulah, TDA fokus berupaya bagaimana agar teman-teman UKM tidak mudah menyerah,” kata Wisnu.

Lalu bagaimana dan langkah apa yang dilakukan untuk membangun jiwa atau *growth mindset* tadi? Ternyata sangat sederhana. Wisnu mengungkapkan, karena orang Indonesia suka kumpul-kumpul, “Kami membuat acara sedekahan nasi bungkus, kongko bisnis, dan sebagainya.”

Wisnu menambahkan, para pelaku UKM mempunyai keinginan untuk bertumbuh bersama dalam sebuah ikatan emosional yang sama. “Kami selalu tekankan tentang makna TDA, yaitu tangan di atas. Artinya kita harus siap memberi. Saya pikir, peme-

rintah juga harus begitu.”

Dengan semangat itu, menurut Wisnu, UKM-UKM yang sudah bertumbuh besar berusaha mengangkat pelaku UKM yang posisinya masih berada di bawah mereka.

Wisnu mengatakan, jika dibandingkan dengan komunitas bisnis lainnya, komunitas TDA memang kecil. “Tetapi kesolidan kami yang membuat komunitas TDA bisa *survive* di era pandemi. Bahkan TDA juga sempat buka cabang baru di masa pandemi.”

Komunitas TDA, menurut Wisnu, bertumbuh secara organik dan di dalamnya ada ikatan emosional yang membuat mereka pantang menyerah. “Kami saling berbagi tanpa berharap apa pun yang kami bagi kembali.”

Lalu kendala apa yang dihadapi TDA dalam ikut ambil bagian berkontribusi membangun perekonomian bangsa di masa sulit seperti saat ini?

Wisnu mengungkapkan TDA masih mengalami kesulitan untuk berkolaborasi dengan komunitas-komunitas lain, “Karena kami merasa belum punya rumah besar di negara ini.”

TDA mengharapkan Kementerian Koperasi dan UMKM bisa menjadi pemimpin orkestra dan komunitas TDA ada di dalamnya sehingga TDA dan komunitas-komunitas lain bisa berkolaborasi.

Dengan begitu, kolaborasi tersebut menjadi satu orkestra besar yang begitu kompak mengalunkan lagu yang sama. Lalu tumbuh bersama. “*So if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together,*” demikian Wisnu. ■



Saya kira pemerintah dan perbankan mesti memastikan bunga kredit bank yang tidak memberatkan UMKM.”

**Usman Kansong**

Ketua Dewan Redaksi Media Group

## 7 Berdarah-darah, tetapi Ada Harapan

**S**HANTI Shamdasani (CEO S. ASEAN International Advocacy & Consultancy-SAIAC) menyebut kondisi ekonomi 2020 berdarah-darah.

Lalu bagaimana dengan 2021? Sangat mungkin 2021 kita cuma benjol-benjol, katanya. Namun, lanjut Shanti, dalam mengantisipasi kemungkinan seperti itu, “Bukan berarti kita tidak atau akan diam saja menerima pukulan-pukulan dari lawan.”

Pasalnya, menurut dia, Indonesia masih tetap akan menerima pukulan-pukulan, guncangan-guncangan ekonomi, karena covid-19 tidak akan berhenti sampai di sini.

Meskipun sudah ada vaksin, tambah Shanti, di depan kita masih ada tantangan-tantangan lain yang harus kita hadapi bersama-sama sebagai bangsa.

Ketika mengungkapkan hasil analisis yang dilakukan timnya di beberapa negara, Shanti mengatakan 2021 tidak selamanya membawa kabar buruk. Ada *good news*-nya.

Dia menjelaskan pertumbuhan GDP untuk 2021 memang ti-

dak tinggi, cuma 4%, tetapi ada angka paling bagus yang diberikan IMF, yaitu 6,1%. “Saya melihat ini cukup realistis meskipun saya melihat 6,1% mungkin agak terlalu optimistis. Perkiraan dari perusahaan saya berkisar antara 3% dan 4%. Menurut saya, ini angka realistis. Kami melihat ini yang bisa dicapai Indonesia di 2021,” katanya.

Shanti mengamati di sektor perdagangan 2020 sudah banyak *recovery*. Fakta di lapangan menunjukkan sektor industri pengolahan sudah bagus.

Shanti menyebut penjualan mobil pada November kelihatan sudah ada peningkatan. “Ini jelas *good sign* karena mobil harganya tidak murah,” katanya.

Sektor riil sendiri, menurut dia, juga sudah membaik. Belanja pemerintah juga sudah terealisasi 69,3%. Itu berarti hal tersebut sudah berada di tujuan dan arah yang benar.

Jasa finansial, tambah Shanti, juga cukup bagus, saham menguat 9,68%, investor naik menjadi 3,4 juta, kredit baru bertumbuh kurang lebih 30%, dan untuk permodalan likuiditas, rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio*/CAR)-nya berada di 23,7%, sebuah indikasi yang lumayan bagus.

Menurut perkiraan Shanti, sampai dengan Maret 2021, banyak negara, termasuk Indonesia, akan fokus bagaimana mengurangi penyebaran virus.

Namun, setelah itu, “Kami melihat ada hal-hal lain yang akan muncul dan yang paling dominan adalah upaya menyelamatkan



MIRAMDANI

Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 di ICE, BSD, Tangerang Selatan, Kamis (11/8). Sektor otomotif mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan bertumbuhnya daya beli masyarakat.

bisnis dan menyelamatkan pekerjaan,” katanya.

Maklum, yang paling ditakutkan pada 2020 ialah soal kehilangan pekerjaan dan penutupan bisnis-bisnis. “Apa yang kita takutkan memang akan terjadi pada 2021,” kata Shanti.

Shanti mengungkapkan pada 2020 industri yang tidak terpuak oleh covid-19 ialah yang bergerak di bidang teknologi, pertanian, *re-skilling*, dan *up-skilling*. Dari kenyataan itu bisa ditarik kesimpulan bahwa banyak orang yang akhirnya menyadari bahwa mereka tidak bisa hanya berhenti di tempat, tapi harus cepat untuk terus belajar.

Kenyataan itu dimanfaatkan sekolah-sekolah di luar negeri

untuk membuka kelas *online* masuk ke Indonesia, memberikan edukasi dan memberikan *skill* kepada orang-orang yang masih mau belajar.

Shanti mengatakan lebih 30% dari total penduduk Indonesia yang mengambil *up-skilling* atau *education online* sehingga memotivasi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka.

Shanti menegaskan kebanggaan produk buatan Indonesia harus terus digelorakan dan harus tetap didorong. Menurut dia, stimulus fiskal dari pemerintah yang sudah berjalan untuk UMKM perlu terus dilanjutkan. Memproduksi APD, masker, dan berbagai vitamin bisa dilakukan UMKM.

Menurut Shanti, tantangan yang paling berat dihadapi pada 2021 ialah sektor energi. “Saya ulangi, yang akan menjadi tantangan paling berat Indonesia di 2021 adalah bidang energi dan jasa.”

Tantangan itu lebih berat sebab ada tuntutan bahwa ke depan energi harus ramah lingkungan. Dalam soal ini kita berada di masa transisi.

“Transisinya agak susah, apalagi politik dan ekonomi Amerika, pembaruan energi menjadi salah satu agenda utama Presiden Joe Biden,” kata Shanti.

Indonesia, disebut Shanti, bisa masuk ke sektor itu. Peluang besar bagi Indonesia memasuki 2021 ialah bidang energi, tapi energi yang terbarukan (*renewable energy*). “Bagaimana kita bisa menarik FDI (*foreign direct investment*) atau berinvestasi di bidang ini?”

Terkait dengan kebijakan *fiscal spending* yang sudah dilaku-

kan pemerintah, Shanti menjelaskan 0,5%-nya memang difokuskan ke kesehatan karena memang itu sektor yang sangat membutuhkan perhatian.

Selebihnya, menurut Shanti, jika para menteri bisa melakukan program-program ekonomi yang *out of the box*, upaya untuk membangkitkan perekonomian bangsa pada 2021 pasti akan berjalan dengan baik.

Apalagi jika pemerintah bisa mewujudkan agenda-agenda perdagangan bilateral. Jika kita bisa melaksanakan agenda-agenda dan memainkan kartu perdagangan yang benar, ekonomi kita pasti akan tertopang.

“Jika kita bisa melakukannya dan menteri-menteri yang baru dipilih bisa melakukan ini semua, pertumbuhan ekonomi 5% bisa kita capai,” ujar Shanti.

Namun, jika covid-19 itu bermutasi menjadi varian-varian baru dan masuk juga ke Indonesia, menurut Shanti, kemungkinan terburuknya, GDP kita pada 2021 hanya akan tumbuh 3% atau 2,5%.

Shanti mengingatkan jika pemerintah konsisten melaksanakan berbagai kebijakan seperti insentif perpajakan dan anggaran, pada 2021 kita bisa melangkah dengan aman.

Kalaupun ada ancaman pada 2021, menurut Shanti, tidak saja Indonesia, tapi juga negara-negara lain akan mengambil utang dari IMF dan Bank Dunia. Konsekuensinya, “Kita akan punya utang yang sangat besar.”



ISTANA PRESIDEN/AGUS SUPARTO

Presiden Joko Widodo melihat ribuan mobil yang akan diekspor ke berbagai negara dari Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat, Selasa (8/3). Presiden optimistis Indonesia dapat mengekspor 180.000 mobil sepanjang 2022 dari Pelabuhan Patimban, Subang. Industri otomotif lokal memberikan lapangan pekerjaan yang besar dan sangat membantu perekonomian pascapandemi.

### Tetap Optimistis jika tidak Ada Gelombang Dua dan Tiga

Ketika menutup diskusi, Ketua Dewan Redaksi Media Group Usman Kansong mengatakan banyak lembaga memprediksi ekonomi Indonesia akan tumbuh positif pada 2021.

Angkanya 3,8% sampai 6,1%. Sebenarnya, kata Usman, bukan hanya Indonesia yang diprediksi ekonominya pulih, melainkan juga ekonomi dunia.

Berdasarkan perkiraan yang dilakukan majalah *The Economist* edisi *World in 2020*, ekonomi semua negara tumbuh positif pada 2021.

Di Indonesia sendiri, menurut Usman, arahnya memang sudah menunjukkan positif pada triwulan kedua. Ekonomi kita tumbuh 5,32%, triwulan ketiga minus 3,49%, sedangkan triwulan keempat 2020 ekonomi kita diperkirakan berada di antara -2% dan -0,6%.

Usman mencatat IHSG kita juga bagus. Akhir tahun ini di atas 6.000 meskipun sempat anjlok karena adanya berita tentang varian baru covid-19 di Inggris.

Purchasing Managers' Index manufaktur kita juga di level 50,6% pada November. Itu lebih baik jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang berada di angka 47%.

Pertanyaannya ialah apa yang mesti kita lakukan supaya prediksi pemulihan ekonomi itu menjadi kenyataan? Usman mengatakan, yang pertama-tama harus dilakukan tentu saja vaksinasi.

Paling tidak, menurut Usman, vaksinasi akan memberikan rasa aman kepada kita untuk melakukan berbagai transaksi

ekonomi. “Rasa aman itulah yang membuat kelas menengah mau membelanjakan uang mereka,” katanya.

Belanja pemerintah, disebut Usman, juga bakal menjadi andalan untuk memulihkan ekonomi 2021. Pemerintah mengalokasikan Rp2.750 triliun untuk menangani pandemi dan memulihkan ekonomi.

Pekerjaan besarnya, kata Usman, ialah penyerapan anggaran belanja pemerintah tersebut. Penyerapan anggaran 60% ke atas memang sudah baik, tetapi akan lebih baik jika ditingkatkan lagi. Faktanya anggaran pemulihan ekonomi 2020 yang masih tidak terserap lumayan besar, Rp34 triliun.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia itu ditopang konsumsi domestik. Usman mengatakan konsumsi domestik bisa dipulihkan kalau daya beli masyarakat tinggi. Masyarakat punya daya beli bila punya pekerjaan dan pendapatan.

Karena itu pemerintah mesti menciptakan lapangan pekerjaan, *job creation*. Sekarang banyak PHK gara-gara pandemi. Jadi, harus diciptakan lapangan pekerjaan. Pembukaan lapangan pekerjaan tentu memerlukan investasi. Kita sudah menggagas adanya Lembaga Pengelola Investasi (LPI) untuk mengelola investasi di negara kita.

LPI, menurut Usman, merupakan salah satu implementasi dari *omnibus law*. *Omnibus law* ikut menentukan pertumbuhan ekonomi kita pada 2020. Jadi, investasi infrastruktur mesti berlanjut.

Ke depan kalau ekonomi bangsa ini mau pulih, tambah Usman, sektor perdagangan mesti diperbaiki. Perdagangan tentu memerlukan industri yang bisa mengekspor barang-barang bernilai tambah. Industri juga memerlukan investasi.

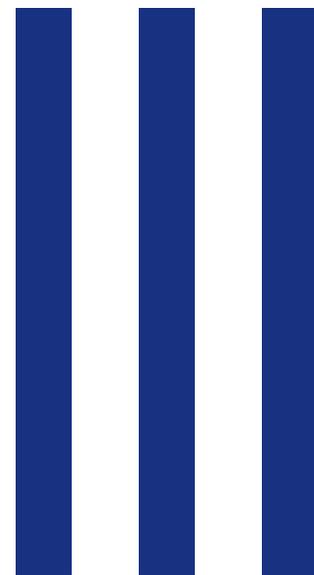
Dua sektor itu harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah. Dua sektor itu punya peran meningkatkan ekspor dan menyerap tenaga kerja.

UMKM, Usman mengatakan, juga punya peran yang sangat penting. UMKM memang tidak banyak menyerap tenaga kerja, tapi mampu meningkatkan daya beli.

UMKM memerlukan kredit dengan bunga bank yang murah. Pemerintah sudah memberikan relaksasi kredit, tapi kenyataannya bank masih mematok bunga tinggi.

“Saya kira pemerintah dan perbankan mesti memastikan bunga kredit bank yang tidak memberatkan UMKM,” kata Usman.

Semua itu bisa kita capai dengan catatan tidak ada gelombang kedua pandemi, gelombang ketiga, dan tidak ada varian baru covid-19. ■



# Kebangkitan Industri Kreatif

# 1 Latar Belakang: Digitalisasi Jadi Tantangan

---

---

**S**EJAK akhir 2019, dunia dilanda pandemi covid-19 sehingga segala interaksi dan mobilitas manusia dibatasi. Hal itu bertujuan mencegah penyebaran virus korona lebih luas lagi di masyarakat.

Dampaknya luar biasa. Tidak hanya dari sisi kesehatan publik, tetapi juga merosotnya perekonomian. Pemerintahan di semua negara menghadapi tantangan besar, termasuk Indonesia. Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020 mengumumkan kasus pertama covid-19 di Indonesia.

Sejak itu, pemerintah mulai berkonsentrasi menghadapi bencana nonalam tersebut. Kasus positif terus meningkat, jumlah korban meninggal kian bertambah. Pemerintah mendirikan rumah



M/IRAMDANI

Penyanyi Isyana Sarasvati bersama Direktur Musik The Resonanz Music Studio mengikuti sesi latihan jelang konser Simfoni untuk Bangsa 2022 di Balai Resital Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (24/8). Saat ini pemerintah sudah mengizinkan penyelenggaraan *event* musik. Sebelumnya saat pandemi, ketiadaan *event* musik membuat lumpuh seluruh rantai produksi sektor tersebut. Tidak hanya berdampak pada seniman, tetapi juga pada unit-unit pendukung yang melibatkan tenaga kerja cukup besar.

sakit darurat khusus menampung pasien covid-19 dan dampaknya pada perekonomian semakin meluas. Ekonomi pun tertekan.

Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan

Pemulihan Ekonomi Nasional pada 20 Juli 2020. Dalam perpres itu dijelaskan bahwa komite tersebut dibentuk dengan menimbang sejumlah hal. Salah satunya ialah penanganan covid-19 tidak bisa dilepaskan dari upaya pemulihan perekonomian nasional.

Industri kreatif termasuk sektor yang terdampak berat karena adanya pembatasan-pembatasan sebagai upaya meredam jatuhnya korban jiwa dalam pandemi. Dari penelusuran Kantor Wakil Ketua MPR RI Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah yang diperoleh dari berbagai pelaku industri kreatif, segala upaya sudah dikeluarkan pelaku industri di tengah ketidakpastian akibat pandemi covid-19. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi berbagai masalah yang membayangnya.

Seperti dalam industri musik, ketiadaan *event* musik membuat lumpuh seluruh rantai produksi sektor tersebut. Tidak hanya berdampak pada seniman, tetapi juga pada unit-unit pendukung yang melibatkan tenaga kerja cukup besar seperti bisnis rental, transportasi, hingga kru *event*.

Digitalisasi menjadi salah satu aspek yang menonjol dalam kenormalan baru selama pandemi. Namun, itu belum bisa dinikmati kebanyakan industri kreatif yang masih berjalan dengan model bisnis tradisional, baik karena kesenjangan pengetahuan, teknologi, dan pengalaman maupun akses internet dan modal.

Hal itu menjadi tantangan tersendiri mengingat industri kreatif memiliki sebaran cukup luas dari Sabang hingga Merauke yang memiliki karakteristik sangat beragam. ■



Yang mesti dipahami adalah *opportunity* di ekonomi digital saat ini belum maksimal kita manfaatkan. *Digital space* kita masih agak tertinggal.”

**Wishnutama Kusubandio**

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  
periode 2019-2020

## 2 Kerja Besar belum Selesai

**M**EMASUKI satu tahun pandemi covid-19, krisis kesehatan yang berawal dari penularan virus korona kian luas menyerang sendi-sendi perekonomian negara. Sejumlah negara mengalami lumpuh perekonomian. Resesi pun tak terhindarkan.

Industri kreatif, khususnya seniman, yang biasanya melakukan interaksi dengan masyarakat kian dibatasi.

Situasi itu mendorong Forum Diskusi Denpasar 12 yang diinisiasi Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. mencari jalan keluar. Lewat diskusi yang digelar pada Rabu, 7 April 2021

dengan tema ‘Merumuskan Jalan Kebangkitan Industri Kreatif Pascapandemi’, Lestari Moerdijat yang biasa disapa Rerie mengajak sejumlah pihak menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi industri kreatif.

Menurut Rerie dalam pengantar diskusi tersebut, saat ini, kita sedang menuju masa transisi yang dikenal sebagai kenormalan baru. Masa kenormalan baru itu harus bisa memberikan ruang kepada seluruh pihak yang terlibat di dalam industri kreatif, khususnya industri hiburan, untuk mengambil peran dan kemudian dapat kembali menjalankan aktivitas mereka.

Para pelaku industri kreatif, khususnya seniman, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan menciptakan karya. Bukan hanya pelakunya yang mengalami situasi terdampak, melainkan juga masyarakat.

Rerie memberikan contoh. Wayangan, atau pertunjukan wayang, ialah bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari, khususnya di perdesaan, yang tiba-tiba terputus. Wayangan tidak sekadar hiburan dalam interaksi sosial budaya, tetapi juga sebagai bagian dari penyehatan jiwa.

Pikiran-pikiran seperti ini mesti dielaborasi lebih dalam. Diperlukan gerak bersama untuk mengembalikan perhatian publik, perhatian pemangku kebijakan, bahwa masih ada kerja-kerja besar yang belum selesai. Kerja-kerja yang memerlukan prioritas tinggi agar industri kreatif dapat segera pulih menjadi pendorong perekonomian nasional.



MIRADAM DWI

Warga mengunjungi festival kreatif IdeaFest 2022 di JCC, Jakarta, Sabtu (26/11). Festival tahunan IdeaFest kembali digelar dengan mengusung tema ‘Re:ality Re:defined’. Festival tersebut dihelat dengan harapan dapat menjadi wadah bagi para komunitas, merek, serta pelaku industri kreatif untuk berinovasi.

Pandemi covid-19 mengakselerasi proses digitalisasi dalam banyak hal, termasuk digitalisasi industri kreatif. Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Kusubandio (2019-2020), hampir sebagian besar ekonomi kreatif kita pasti bersinggungan dengan digital.

Misalnya, jualannya bisa melalui *ticketing* digital, distribusinya menggunakan teknologi digital, *marketing*-nya juga bisa menggunakan digital, atau *over the top* (OTT) *platform* misalnya, atau subsektor-subsektor lain di ekonomi kreatif, atau bisa juga melalui *e-commerce* dsb.

“Tetapi yang mesti dipahami adalah *opportunity* di ekonomi



MI/BRYANBODO HENDRO

Aksi dalang Ki Catur Kuncoro pada acara Pergelaran Wayang Kulit dengan lakon *Rainha De Japara* di Pendopo Dalem Yudhonegaran, Prawirodhirjan, Kecamatan Gondhomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (4/6) malam. Diperlukan gerak bersama untuk mengembalikan perhatian publik, perhatian pemangku kebijakan, bahwa masih ada kerja-kerja besar yang belum selesai. Kerja-kerja tersebut memerlukan prioritas tinggi agar industri kreatif dapat segera pulih menjadi pendorong perekonomian nasional.

digital saat ini belum maksimal kita manfaatkan. *Digital space* kita masih agak tertinggal,” kata Wishnutama.

Ekonomi kreatif itu luas, tidak hanya kuliner, tidak hanya produk, tetapi juga subsektor film, subsektor musik atau *event*, pertunjukan seni, dan lain sebagainya.

Seluruh proses digitalisasi itu akan menemukan keseimbangan baru pada saat vaksin telah tersedia dengan baik.

Misalnya soal film, ada ekosistemnya. Dari produksi sampai ke bioskop, setelah itu baru ke televisi. Namun, ekosistem itu sekarang terputus. Sekarang orang masih takut ke bioskop karena ada semacam stigma *nonton* di bioskop itu berbahaya walaupun sebenarnya tidak. Padahal, *revenue* para pemain film itu, salah satu yang terbesar, berasal dari bioskop.

Karena itu, kata Wishnu, pelaku film ingin menginisiasi sebuah gerakan balik lagi *nonton* ke bioskop karena ada informasi yang terputus. Padahal, dari sisi produksi tidak ada masalah asal kita melakukan protokol kesehatan dengan baik.

Menonton film melalui OTT *platform* sudah pasti tidak ada masalah karena menontonnya di rumah. Yang macet itu, kan, di bioskop. Padahal, menurut Wishnutama, sebenarnya menonton di bioskop jauh lebih aman daripada makan di restoran. Makan di restoran pada umumnya *face to face* lalu minum makan harus buka masker. Namun, di bioskop orang duduk satu arah, juga tidak *ngobrol*. Lalu ventilasinya juga lebih baik dengan *high-efficiency particulate absorbing* (HEPA) *filter* dan sebagainya.

Apabila bicara soal *event*, atau *performing*, itu juga menjadi sebuah tantangan baru. Itu semua masalah penerapan protokol kesehatan. Kalau kita melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan semua sudah punya *awareness*, menonton *event* pun sebenarnya sudah aman. Memang *protocol enforcement* menjadi tantangan tersendiri, dengan biaya yang tidak kecil.

*Opportunity* ekonomi digital di Indonesia pada 2025, menurut hitungan Kemenparekraf, ialah US\$159 miliar atau hampir 10% dari GDP kita. Menurut hitungan *Google* dan Temasek, sebesar US\$120 miliar. Namun, mereka belum memasukkan input dari optimalisasi digital. Peluang *labor input* sekitar US\$35 miliar. Jadi, total peluangnya US\$155 miliar.

Pertanyaan yang sangat mendasar, kata Wishnutama, dari US\$155 miliar itu, apakah bangsa Indonesia yang paling mendapatkan *benefit*-nya atau bangsa lain? Itu menjadi tantangan dari sains ekonomi digital.

Pertanyaan lain ialah *digital ads* Indonesia didominasi siapa? Sebesar 80% lebih mungkin bukan punya orang Indonesia, bukan punya platform Indonesia. Sementara itu, 20% sisanya itu *Detik*, *Kumparan*, *Metro*, dan *IDN Times*. Semua rebutan 20%. Itu menyedihkan. Memang itu bagian dari ekonomi kreatif, buat konten dan lain sebagainya. Wartawan kita jungkir balik, siang malam kehu-janan cari berita, tapi yang paling diuntungkan siapa?

Sementara itu, pengusaha Indonesia investasi luar biasa, membuka lapangan kerja luar biasa, para pekerja juga luar biasa.

Namun, apakah kita mendapatkan pendapatan yang paling banyak? Itu juga memprihatinkan.

“Mohon maaf, Mbak Rerie, sekalian saya curhat juga bahwa membangun ekonomi kreatif ke depan harus komprehensif, dilihat dari berbagai macam segi, khususnya di *digital space*. Karena apa? Mau bicara apa pun dari subsektor ekonomi kreatif, yang kita bahas pasti terkait digital. Orang makan saja sekarang terkait digital. *Food delivery*-nya. Kalau kita buat makanan seenak apa pun, tapi tidak ada di platform digital, mungkin tidak laku. Sebagai apa pun produk, kalau tidak menguasai *marketing digital*, akhirnya akan kalah,” kata Wishnutama.

Pelaku ekonomi kreatif harus memanfaatkan peluang industri kreatif berbasis digital dengan *opportunity* yang sangat luar biasa, mencapai US\$155 miliar, itu. Tidak ada kesempatan untuk berbalik atau menunda. Hanya ada satu jalan, yakni maju dan menangi peluang itu. ■



Pendidikan musik tidak ditunjang dengan pengetahuan tentang manajemen karier para musikus. Dampaknya banyak musikus yang kelihatannya sudah cukup mapan, sudah cukup makmur, tapi pada usia tua harus digelarkan malam dana karena mereka sakit dan tidak bisa membayar biaya rumah sakit.”

**Ananda Sukarlan**  
Pianis, Komponis

## 3 Memperkuat Bargaining Power

**M**USIK sebagai salah satu industri kreatif di Tanah Air berkembang pesat di masa sebelum pandemi covid-19. Menurut Harry Koko Santoso, promotor *event*, di 75.000 desa, dusun, dan banjar yang tersebar di 34 provinsi dan lebih dari 500 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, tiap RW ada grup musik.

Namun, tragisnya, musikus idola, musikus legendaris, orang-orang yang menjadi anutan, orang-orang yang menjadi harapan untuk belajar, untuk ter-*influence*, itu pada akhir hayatnya selalu dibuatkan malam dana untuk pengumpulan dana. Seperti Chrisye, Yockie Suryoprayogo, juga Yon Koeswoyo. Bahkan Koes Plus itu mungkin sebuah grup musik yang paling banyak rekamannya

di dunia, tetapi juga dibikinkan malam dana pada akhir hayatnya.

Mirisnya lagi, tambah Harry Koko, dari Sabang sampai Me-  
rauke, kita tidak punya gedung pertunjukan selain di Jakarta.  
Meski demikian, industri musik Indonesia sampai hari ini ber-  
jalan terus. Namun, kita tidak punya industri musik yang hadir di  
dunia internasional.

Posisi seperti itu membuat *bargaining power* musikus ataupun  
pegiat seni lainnya di Indonesia lemah sehingga tidak menjadi ba-  
gian dari dunia internasional. Tantangan kita ialah memperkuat  
*bargaining power* agar bisa bekerja sama dengan platform-plat-  
form digital sehingga kita mempunyai nilai jual.

Kenapa harus punya nilai jual? Menurut Harry Koko, tidak  
mungkin kita hanya menjadi pengisi platform mereka, *post-  
ing-posting*. Kelak kita harus mempunyai artis atau seniman yang  
mampu menjadi bagian dari industri musik dunia.

Indonesia memiliki populasi yang besar, nomor empat di  
dunia. Amerika, Tiongkok, dan India menguasai industri kreatif,  
tetapi sangat membatasi terutama musik dari budaya negara lain.  
Tidak pernah kita mendengar di Amerika, misalnya, *K-pop* bisa  
leluasa. Juga di India atau Tiongkok. Namun, di Indonesia, sangat  
tinggi keragamannya. Itu yang disukai masyarakat dunia di sini.

Kelak, mestinya kita lebih mudah menjadi bagian dari musik  
dunia karena kita juga sangat *welcome* dengan mereka.

Bagaimana kita menjadi bagian dari *digital platform*? Saat ini  
kita memang tidak bisa melakukan bisnis musik apa pun kare-



Penampilan band Gigi, Armand Maulana (vokalis) dan Gusti Hendy (drumer)  
dalam *Back to 90's Konser Gigi Dua Generasi* di Grand Studio Metro TV, Jakarta,  
Rabu (23/6/2020). Harus ada gerakan besar untuk membawa musik Indonesia ke  
forum dunia karena musik Indonesia selalu punya semangat, selalu menjadi bagian  
dari hiburan di negeri ini.

na kita tidak punya *bargaining power*. Bayangkan, kata Harry Koko lagi, di negeri ini tidak ada satu pun artis yang nilai jualnya US\$100.000. Jadi, 75 tahun merdeka sampai hari ini, tidak ada. Sementara itu, di negara-negara lain *bargaining power* mereka kuat.

Ini PR besar kita sebagai bangsa. Harus ada gerakan besar untuk membawa musik Indonesia ke forum dunia karena musik Indonesia selalu punya semangat, selalu menjadi bagian dari hiburan di negeri ini.

Kelak harus ada gerakan bersama tentang *Indonesia music movement*. Itu pasti akan sangat didukung musikus atau pelaku di bidang kreatif.

Harry Koko mengatakan selama 75 tahun Indonesia merdeka sudah saatnya duduk bersama mencari jalan keluar memperkuat industri kreatif di bidang musik. Dia mengapresiasi Forum Diskusi Denpasar 12 yang dimotori Lestari Moerdijat dalam mencari jalan menduniakan musik Indonesia dan berharap kelak diskusi seperti ini akan menjadi contoh dan inspirasi baru untuk para musikus.

Para seniman yang berjumlah jutaan tidak hanya memberikan hiburan, tapi juga menjadi bagian dari pendapatan asli daerah mereka. Kelak mereka akan memperkuat posisi tawar dengan platform-platform digital dunia.

Karena itu, pemerintah harus hadir terutama menggalakkan *Indonesia music movement*. Tentu saja tidak hanya musik, tetapi semua kebudayaan harus mendapat perhatian yang besar.

Pandemi covid-19 membawa dampak besar terhadap ber-

bagai aspek kehidupan, termasuk aktivitas pekerjaan di dunia panggung dan hajatan-hajatan. Akibatnya, pandemi tidak saja mengurangi secara drastis pendapatan para seniman panggung, tetapi juga membuat gejala nasib hidup seniman.

Itu yang dirasakan Diana Sastra, seniman tradisional tarling dari Indramayu, Jawa Barat. Menurut Diana, hampir semua seniman menjerit sebab banyak dari mereka yang menggantungkan hidup dari acara pentas, dalam hal ini panggung-panggung di daerah.

Pelaku seni tradisional atau lokal belum menemukan solusi yang ideal di tengah pandemi sekarang ini. Contohnya, di masa pandemi, harus ada perizinan *show* dengan jumlah penonton yang dibatasi.

Untuk melirik industri kreatif berbasis digital, bagi Diana, itu menjadi masalah. Dia merasa industri kreatif berbasis digital di bidang seni tradisional, seperti tarling, hanya bagi mereka yang mampu. Dalam hal ini penyediaan perangkat digital misalnya. Seniman tradisional yang notabene masih menggantungkan hidup dari panggung hajatan hanya berpikir bagaimana caranya bisa manggung agar dapat menghidupi keluarga mereka saat ini.

Menurut Diana, soal digital, *streaming*, itu semua tidak bisa dilakukan para pelaku seni di daerah. Itu merupakan dilema bagi seniman di daerah dan solusi diharapkan bisa ditemukan sehingga mereka bisa bekerja secara normal.

Memang disadari bahwa dengan adanya pandemi covid-19,



MIMOH IRFAN

Group *band* Nicholas Dheo tampil pada acara pentas Jazz Varsity dalam perayaan HUT ke-5 *Medcom.id* di M Bloc Space, Jakarta Selatan, Jumat (2/12/2022).

*Event* musik mulai banyak diselenggarakan pascapandemi dan menjadi obat rindu bagi masyarakat pecinta musik.

mereka akhirnya beralih ke digital, yaitu *streaming*. Namun, tidak semua pelaku seni daerah bisa melakukan *streaming*. *Streaming* tidak bisa melibatkan 70 orang di setiap *show*, paling hanya 10 orang.

Harapan pelaku seni di daerah, kata Diana, ialah pemerintah bisa memberikan solusi untuk para seniman sehingga bisa berkarya secara normal.

Infrastruktur berkesenian di Indonesia, khususnya seni musik, memang masih sangat kurang. Itu diakui pianis yang juga komponis, Ananda Sukarlan. Dalam penjelajahannya di Nusantara, Sukarlan menemukan fakta bahwa di seluruh Pulau Flores, NTT, tidak ada *grand piano*. Bukan hanya di Flores, melainkan juga di Manokwari, serta seluruh Papua Barat tidak ada *grand piano*.

Ketika ada keperluan *shooting* di sana, kata Sukarlan, pihaknya mesti mendatangkan *grand piano* dari Jakarta dengan memakai pesawat Hercules dengan biaya sekitar Rp200 juta. Dia mengimbau untuk bisa dipikirkan bagaimana ada *grand piano* dan alat musik lainnya di seluruh provinsi di Indonesia. Itu menjadi bagian dari infrastruktur musik di Indonesia.

Indonesia memang sudah punya kota musik, yaitu Ambon. Namun, secara infrastruktur belum komplet karena sebagai kota musik seharusnya Ambon punya *conservatory music* tempat pendidikan musik etnik dan musik Barat. Apa yang harus dilakukan sekarang ialah mengukuhkan identitas musik klasik Indonesia. Jadi, jangan lagi berpikir bahwa musik klasik ialah musik Barat karena untuk musik klasik, seperti halnya musik pop dan musik *jazz* serta musik lainnya, Indonesia juga sudah *establish*.

Dari segi infrastruktur, instrumen, dan SDM, Indonesia memang masih membutuhkan musikus yang mempunyai teknik dan pengetahuan tinggi untuk bisa bermain musik klasik. Itu, kata Sukarlan, disebabkan teknik musik klasik cukup menantang.

Soal pengembangan karier para musikus di Indonesia, Sukar-

lan mengatakan pendidikan musik tidak ditunjang dengan pengetahuan tentang manajemen karier para musikus. Dampaknya banyak musikus yang kelihatannya sudah cukup mapan, sudah cukup makmur, tapi pada usia tua harus digelarkan malam dana karena mereka sakit dan tidak bisa membayar biaya rumah sakit.

Hal lain yang harus diperhatikan ialah hak cipta. Kita harus bisa memantapkan segala infrastruktur hak cipta di Indonesia.

Pekerja seni dan kebudayaan sudah ada di desa-desa meski dalam skala dan kualitas yang berbeda. Adila Suwarno, seorang peserta aktif diskusi, mengatakan sebetulnya di desa-desa, di kampung-kampung, kegiatan kebudayaan sudah tumbuh. Memang selalu ada masalah di tempat-tempat yang agak fanatik, kegiatan kebudayaan kurang berkembang. Namun, di tempat-tempat seperti Bali dan Sumatra, muncul banyak kebudayaan. Akan tetapi, pemerintah sejak 30 tahun yang lalu tidak fokus menangani kebudayaan.

Musik menjadi salah satu kekuatan kesenian dan kebudayaan Indonesia. Kita mempunyai perkusi, tetapi apakah pernah ada festival perkusi? Kita juga tidak pernah punya festival wayang, perkusi, dan *dance* yang sebetulnya semua itu kita punya. Seharusnya ada kebijakan dari pemerintahan untuk melindungi kebudayaan kita.

Ki Dalang Warseno menambahkan, salah satu kendala dalam berkesenian tradisional di Indonesia ialah sulit memperoleh izin, apalagi di masa pandemi covid-19. Namun, sekarang itu mulai

dilonggarkan dengan tetap memakai prokes.

Diakui, seni tradisional sulit mendapatkan dukungan atau sangat minim dukungan tersebut, terutama berkaitan dengan *event*. Peran pemerintah belum dirasakan, belum jelas pula kelanjutan seni tradisional itu sendiri.

Harus diakui bahwa budaya merupakan kekuatan seluruh bangsa Indonesia. Budaya Indonesia yang dikemas secara bagus tidak kalah dengan Eropa atau dunia luar. Namun, kenapa tidak dihargai di negeri sendiri? Bahkan kebijakan pemerintah pun dirasa belum menyentuh secara langsung. Mudah-mudahan, kata Ki Dalang Warseno, setelah diskusi Forum Diskusi Denpasar 12 ini ada solusi. ■

“

Kendala *intellectual property rights* kita ialah kita tidak memiliki nilai tawar. Di Indonesia saja kita belum tentu memiliki *bargaining power*, apalagi di luar negeri.”

**Niluh Djelantik**  
Entrepreneur

## 4 Tanpa Arah

**D**I masa pandemi, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga terkena oleh dampak. Tidak ada cara lain untuk *survive* kecuali dengan menekuni industri kreatif berbasis digital.

Niluh Djelantik, Ketua Bidang UMKM DPP Partai NasDem, seorang *entrepreneur* industri *fashion* dari Bali, mengatakan sebagai salah satu pelaku UMKM, dalam menghadapi situasi pandemi, ia dan para pelaku UMKM harus bisa membuat rencana jangka pendek. Soal *fintech*, *edutech*, *agrotech*, dan lainnya bisa disampaikan kepada pelaku UMKM agar 65 juta pelaku UMKM itu bisa berdiri tegak di atas tanah kelahiran mereka sendiri.

Salah satu masalah yang dihadapi UMKM dan dunia seni Indonesia ialah menyangkut *intellectual property rights*. Khusus bagi dunia seni, itu penting sekali. Seperti diketahui, aransemen musik

salah satu seniman Indonesia dari Bali, Gus Teja, digunakan *brand* sebesar Louis Vuitton.

Apa kendalanya? Kendala *intellectual property rights* kita ialah kita tidak memiliki nilai tawar. Seperti yang dikemukakan Harry Koko, di Indonesia saja kita belum tentu memiliki *bargaining power*, apalagi di luar negeri. Karena itu, penting sekali memiliki sebuah wadah bagi advokat-advokat hebat yang *fighter*, yang menjadi ujung tombak industri kreatif.

Ketika bicara soal seni, soal musik, dan soal konser atau pertunjukan, kata Niluh, kalau pertunjukannya dilarang, konsernya dilarang, kegiatan musiknya dilarang, otomatis ada dagangan yang tidak bisa dijual. Ada *team work* di belakang layar, pembuat panggung, hingga penggerak dari acara tersebut juga kehilangan pemasukan.

Di Bali, katanya, ada banyak kegiatan pertemuan. Ada ribuan banjar dengan ruangan tersendiri, *open room*, dan di sana ruangan itu biasanya menjadi tempat anak-anak belajar menari. Namun, dengan adanya pandemi, ada beberapa aturan yang harus ditaati dan dijalankan.

Oleh karena itu, Niluh berharap agar bisa dibuatkan sebuah aturan yang akan dipakai untuk berperang melawan covid-19 agar masyarakat bisa bangkit. Aturannya itu harus juga tegak lurus dengan kesehatan. Kita tidak boleh melanggar, harus *concern* karena pandemi ini akan bersama kita untuk jangka waktu yang tidak sebentar. Masyarakat Bali sangat merasakan itu, ti-

tidak hanya pekerja seni, atau pelaku pariwisata, tapi juga pelaku UMKM.

Wartawan senior Saur Hutabarat dalam penutupan diskusi tersebut mengatakan di tataran makro, Indonesia mempunyai persoalan yang menyangkut politik kebudayaan, yang turunannya memang berakibat pada kebijakan kesenian.

Apa buktinya? Pada masa yang panjang Direktorat Jenderal Kebudayaan berada di bawah atap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Direktorat Jenderal Kebudayaan dipindahkan di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Itu berlangsung 10 tahun. Di masa pemerintahan lima tahun pertama Presiden Joko Widodo, masih seperti itu. Kemudian di masa pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo, Direktorat Jenderal Kebudayaan kembali dipindahkan di bawah atap Kementerian Pendidikan. Dari sini, kata Saur, sebenarnya tampak bahwa sesungguhnya negara tidak memiliki konsep yang tegas, jelas, yang koheren ke masa depan. Mau diapakan kebudayaan itu?

Ketika Direktorat Jenderal Kebudayaan berada di bawah Kementerian Pariwisata, itu menunjukkan bahwa kebudayaan lebih sebagai sebuah produk. Namun, ketika direktorat itu dipindahkan kembali di bawah Kementerian Pendidikan, kebudayaan dipandang sebagai bagian dari sistem nilai.

Ekspresi ke bawahnya memang tampak. Dewan kesenian di mana-mana, di kota-kota di luar Jakarta, entah hidup, entah mati,

tidak jelas. Dewan Kesenian Jakarta saat ini ialah dewan kesenian yang jauh sekali ekspresinya, eksistensinya, jika dibandingkan dengan di masa penuh dedikasi seorang Ali Sadikin di awal berdirinya Dewan Kesenian Jakarta.

Jadi, kata Saur, kalau sekarang dipersoalkan semua yang bernama *output* negara terhadap kebudayaan atau pun kesenian, memang negara ini belum secara jelas memiliki arah politik kebudayaan.

Apakah di kota-kota besar itu ada gedung kesenian yang representatif? Apakah ada gedung pertunjukan yang representatif? Apakah orang bisa menampilkan orkestra klasik pada tempatnya yang akustiknya memang memenuhi persyaratan? Betapa sulitnya bahwa provinsi-provinsi tidak memiliki *grand piano*.

Jadi, persoalan kita memang besar karena menjangkau pikiran besar tentang kebudayaan dan turunannya bernama kesenian ke masa depan.

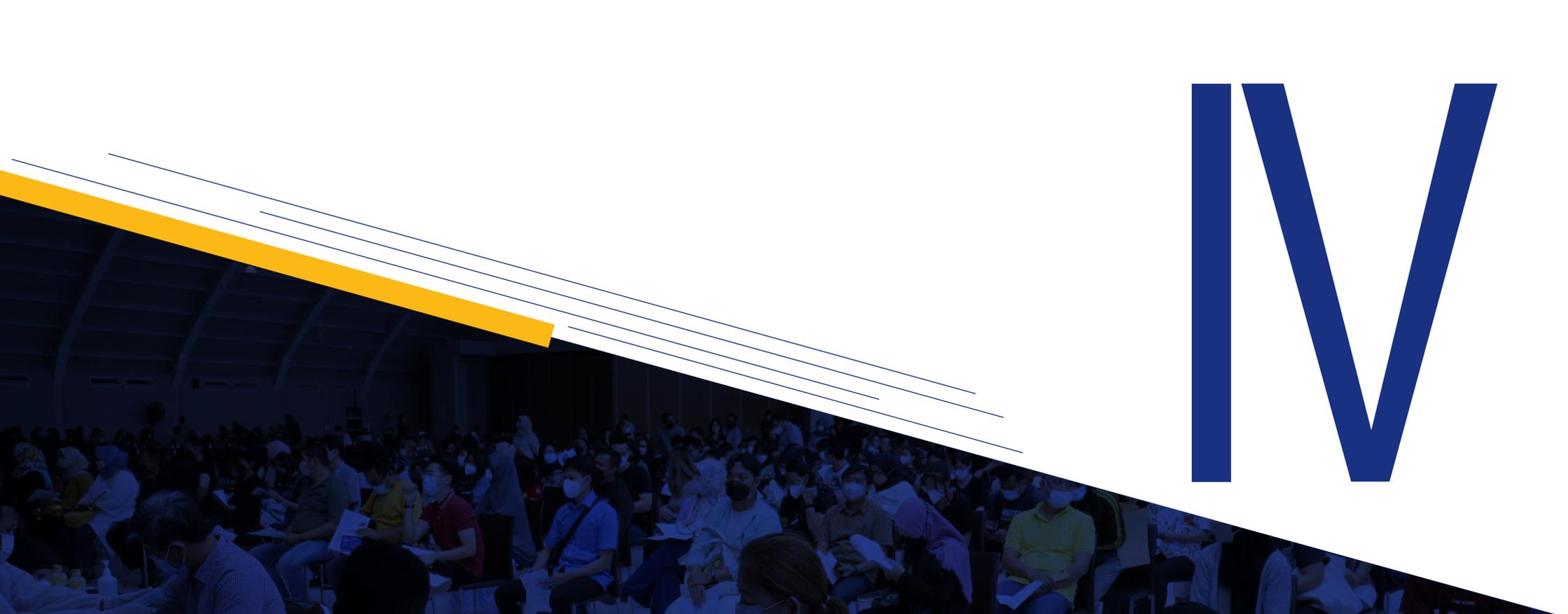
Kesenian tanpa panggung ialah kesenian yang kehilangan roh sekaligus juga kehilangan tubuh.

Masa pandemi covid-19 mendorong pelaku kesenian melahirkan kreativitas. Saur memberikan contoh kreativitas memanfaatkan teknologi digital di masa pandemi. Ada sebuah grup musik, Band of Heathens dari Texas, membuka 40 menit pertunjukan melalui *zooming* dan hanya untuk ditonton 10 orang dengan biaya US\$200. *Zooming* gratis itu 40 menit. Artinya betapa cerdiknyanya membuat 40 menit pertunjukan musik, dengan aplikasi *Zoom* gra-

tis, tetapi memungut bayar US\$200.

Kalau ruang-ruang *zooming* tumbuh sekian ribu persen dan *zooming* juga membuka tempat gratis, kenapa tidak dimanfaatkan? Kepadatan konten, kepadatan ekspresi, kepadatan pertunjukan selama 40 menit itu dapat diisi dengan kreativitas bernilai ekonomi.

Jadi, tantangan kita ialah melahirkan kreativitas untuk memanfaatkan peluang yang disediakan teknologi. ■



# W



**Disiplin Menjalankan  
Protokol Kesehatan**

# 1 Latar Belakang: Antisipasi Gelombang Baru Covid-19

---

---

**A**KHIR 2020, beberapa negara melaporkan kemunculan varian baru covid-19. Dr. Stuart Ray dari John Hopkins Medicine melansir varian baru virus terjadi apabila ada perubahan atau mutasi gen virus.

Virus korona memang berevolusi dan berubah secara bertahap. Selain varian B.1.1.7 yang dilaporkan akhir Desember 2020 di Amerika Serikat dan memiliki tingkat penyebaran yang cukup cepat, telah muncul B.1.351 atau yang disebut varian afrika, dan di Brasil dilaporkan ada varian baru P.1.

Uji klinis masih terus dilakukan berbagai lembaga penelitian dunia mengenai korelasi efektivitas vaksin dengan kemunculan varian baru.

Fokus pemerintah dalam menurunkan tingkat penyebaran dan kematian akibat covid-19 bergantung pada ketaatan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan (prokes).

Kampanye 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menghindari kerumunan, serta 3T, yaitu *testing, tracing, and treatment*, terus digaungkan.

Kekhawatiran global terhadap ancaman covid-19 gelombang kedua, bahkan ketiga, memiliki dasar yang kuat, apalagi jika memiliki fakta perkembangan yang terjadi di sejumlah negara seperti India.

Pada gelombang pertama di India yang terjadi September 2020, penambahan kasus harian sekitar 90 ribu. Selanjutnya pada gelombang kedua yang puncaknya pada April 2021, penambahan kasus harian melonjak hingga tiga kali lipat mencapai 330 ribu per hari.

Lonjakan itu terjadi pascafestival ritual Kumb Mela, sekaligus membalik tren penularan yang sempat menurun di India. Penambahan pasien dalam jumlah yang signifikan melumpuhkan sistem kesehatan di negara itu.

Dengan belajar dari pengalaman menakutkan itu, beberapa negara tetangga seperti Malaysia telah mengambil tindakan *lock-down* dengan pembatasan ketat mobilitas masyarakat pada saat tren penyebaran covid-19 mulai beranjak naik. Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan pembatasan ketat, antara lain membatasi mudik Lebaran untuk mencegah terjadinya mobilitas

masyarakat dalam jumlah besar dari kota-kota besar ke pelosok Tanah Air.

Situasi di atas menjadi tantangan yang harus dijawab bersama, untuk mengembalikan perhatian publik nasional terhadap ancaman gelombang baru pandemi, terutama kedisiplinan menjalankan prokes, menyukseskan program vaksinasi, serta kesiapan sistem layanan kesehatan nasional yang baik guna mengantisipasi kemungkinan terburuk. ■



Banyak daerah tidak melaporkan kondisi yang sebenarnya atau bahkan menurunkan tingkat *test and trace* mereka hanya untuk mengejar status tetap berada pada zona hijau dan kuning dan menghindari status oranye dan merah.”

**Budi Gunadi Sadikin**  
Menteri Kesehatan

## 2 Pandemi Picu Kelelahan Fisik dan Mental

**K**ITA menyadari bahwa awal 2020 masyarakat dihadapkan suatu situasi yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. “Kondisi yang memang kita semua gagap, semua negara gagap menghadapinya,” ungkap Wakil Ketua MPR RI Les-tari Moerdijat dalam diskusi bertajuk Antisipasi Gelombang Baru Covid-19 yang berlangsung pada 19 Mei 2021 di Jakarta.

Selama satu tahun lebih pandemi berlangsung dan tidak bisa dimungkiri bahwa mayoritas masyarakat sudah berada pada titik kelelahan yang luar biasa, tidak hanya secara fisik, tetapi juga kelelahan mental.

“Ketidakpastian dan ketidaktahuan kapan pandemi akan berakhir, ditambah adanya ketidaksamaan cara berpikir, cara ber-

perilaku dari berbagai komponen masyarakat telah memicu terjadinya kelelahan mental yang luar biasa,” papar politikus Partai NasDem yang akrab disapa Rerie itu.

Ada masyarakat yang sangat paham dan mengetahui batas-batas untuk menjaga diri, tapi ada juga yang bertindak semaunya sehingga akhirnya menimbulkan kemarahan satu dengan yang lain.

Forum Diskusi Denpasar 12 pada waktu yang lalu secara khusus pernah mengangkat diskusi yang berhubungan dengan pandemi dalam konteks kesehatan jiwa masyarakat.

Setelah sekian bulan berlalu akhirnya kita menyadari ternyata apa yang didiskusikan tersebut sungguh menjadi kenyataan karena pandemi tidak hanya menimbulkan kelelahan fisik, tetapi juga memunculkan permasalahan kesehatan mental masyarakat.

Bagaimana pergerakan kasus covid-19 setelah Hari Raya Lebaran yang berlangsung 12 Mei 2021? Sebagaimana pengalaman-pengalaman yang lalu, ada lonjakan kasus baru yang cukup tinggi setelah libur panjang. Pemerintah memang sudah menetapkan aturan, tetapi ternyata di beberapa tempat meskipun telah dilakukan pembatasan mudik, mobilitas masyarakat tetap tidak bisa dibatasi sepenuhnya.

Hal itu tampak secara kasatmata di tempat-tempat pariwisata karena memang tidak diberlakukan penutupan. “Yang terjadi adalah lonjakan masyarakat atau berkumpulnya manusia yang tidak bisa dihindari,” tambah Rerie.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan banyak



Pengunjung memadati Blok B, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (2/5/2021). Para pengunjung yang memadati Pasar Tanah Abang tersebut berbelanja kebutuhan Idul Fitri 1442 H, bahkan mereka rela berdesak-desakan tanpa memedulikan aturan jaga jarak di masa pandemi covid-19.

daerah tidak melaporkan kondisi yang sebenarnya atau bahkan menurunkan tingkat *test and trace* mereka hanya untuk mengejar status tetap berada pada zona hijau dan kuning dan menghindari status oranye dan merah.

“Padahal, kita tahu persis bahwa bila itu terjadi, kita kehilangan kesempatan untuk melakukan tindakan preventif secara lebih cepat,” ucap Rerie.



M/RAHDANI

Pekerja melewati trotoar menuju tempat bekerja di kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (17/5/2021). Sejumlah perusahaan memperketat protokol kesehatan bagi karyawan mereka dengan mewajibkan tes covid-19 saat kembali bekerja pascalibur Idul Fitri 1442 H. Kebijakan tersebut diambil menyusul banyaknya warga Jakarta yang lolos penyekatan untuk mudik ke kampung halaman.

Bagaimana agar kondisi-kondisi semacam itu bisa kita atasi? “Mungkin Bu Felly Estelita Runtuwene, S.E. sebagai wakil kita di DPR RI dan Ketua Komisi IX bisa meminta pemerintah, tidak hanya dengan mitra Komisi IX, tapi juga dengan Komisi II karena keterlibatan pemerintah daerah merupakan kunci dalam membangun tata kelola pencegahan covid-19 di Tanah Air,” pinta Rerie.

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana agar kita semua memahami gelombang baru kasus covid-19? Berbagai masukan dan paparan para ahli dalam diskusi kali ini diharapkan dapat membuka mata dan pikiran kita semua agar lebih memahami apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang akan terjadi ke depan sehingga kita bisa melakukan antisipasi.

“Semoga diskusi kali ini memberikan manfaat bagi kita semua dan marilah, kita tidak boleh lelah untuk saling mengingatkan, saling menjaga karena menjaga diri, keluarga, dan menjaga lingkungan sama dengan menjaga bangsa,” tuturnya. ■



**Kebijakan penanggulangan pandemi covid-19 di Tanah Air harus mengacu pada kondisi riil yang ada di dalam negeri, bukan berdasarkan kondisi atau situasi yang ada di negara lain.”**

**Tjandra Yoga Aditama**

Guru Besar FK UI dan Direktur WHO SEARO  
(World Health Organization South-East Asia  
Regional Office) 2018-2020

## **3 Kesadaran Melindungi Diri dan Sesama**

**K**ETUA Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene, S.E. mengungkapkan bahwa per 15 Mei 2021, berdasarkan data WHO, kasus covid-19 tumbuh secara eksponensial di berbagai belahan dunia. Pertumbuhan itu ditandai dengan penambahan jumlah kasus yang konstan dalam jumlah besar.

WHO mencatat covid-19 di seluruh dunia naik 9% selama tujuh minggu berturut-turut dengan angka kematian juga melonjak menjadi 5%. Hal itu tentu mengkhawatirkan bagi kita sehingga perlu melakukan antisipasi sedini mungkin.

Di dalam negeri, pada 18 Mei 2021, penambahan kasus baru mencapai 4.185 per hari sehingga total kasus positif secara kumulatif sebanyak 87.514 orang.

Selanjutnya, jelas Felly, kasus covid-19 sempat melandai ke



MICAKSONO

Pasien covid-19 yang baru tiba dari berbagai wilayah di Ibu Kota menunggu di lobi Tower 6 Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Rabu (16/6/2021). Kasus korona di Indonesia melonjak sesuai libur Lebaran Mei 2021 lalu. Hal itu memicu jumlah pasien di RSDC Wisma Atlet Kemayoran membludak sehingga *bed* pasien korona terus ditambah.

angka 2.000-3.000 kasus per hari yang terjadi pada Januari 2021, tetapi kembali melonjak setelah libur Lebaran 2021. “Catatan kita *positivity rate* saat ini (19 Mei 2021) sekitar 13,1% atau jauh melampaui standar WHO sebesar 5%,” jelas Felly.

Pada 17 Mei 2021, pemerintah menyampaikan ada 15 provinsi yang mengalami peningkatan kasus baru secara signifikan, yakni Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, Bangka Belitung,

DKI Jakarta, Maluku, Banten, NTB, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo.

Berdasarkan survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan, sebanyak 7% atau 18 juta orang tetap melakukan mudik ke kampung halaman walaupun ada larangan mudik dari pemerintah.

Selain itu, warga yang tidak mudik pun mengisi masa liburan dengan mengunjungi berbagai tempat wisata seperti Ancol dan Ragunan sehingga terjadi penumpukan dan kerumunan massa yang tak terhindarkan.

Sebagai bagian dari upaya pencegahan, kata politikus Nas-Dem itu, Komisi IX mengundang Kementerian Kesehatan guna membicarakan apa saja yang sudah disiapkan pemerintah dalam mengatasi lonjakan kasus covid-19 pascaliburan Lebaran.

Komisi IX, kata dia, mendukung langkah-langkah penanggulangan penularan covid-19 yang dilakukan pemerintah seperti mengencarkan 3T (*testing, tracing, treatment*) secara merata sampai ke desa-desa.

Untuk itu, peran pemerintah daerah sangat penting dan strategis dalam pelacakan penularan virus korona di masyarakat. “Jadi, jangan hanya mengandalkan pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah harus proaktif karena merekalah yang paling tahu tentang kondisi daerah masing-masing,” tegasnya.

Upaya penanggulangan covid-19 harus dibarengi dengan sosialisasi dan penyadaran publik tentang bahaya dan ancaman

virus korona terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa manusia karena masih banyak masyarakat yang melakukan pembangkangan seperti menolak vaksinasi, tidak mematuhi prokes, serta aturan yang dikeluarkan pemerintah.

“Jadi, perlu pendekatan secara persuasif dari pemerintah, pendekatan kepada seluruh komponen masyarakat untuk bekerja sama dan saling melindungi dari ancaman penularan covid-19,” ia menegaskan.

Selain itu, imbuh Felly, Komisi IX mendukung kebijakan Menteri Kesehatan untuk mengubah rumah sakit umum menjadi rumah sakit khusus covid-19 jika terjadi kekurangan tempat tidur dan ICU untuk menampung pasien covid-19.

Pemerintah juga diharapkan memperketat pemeriksaan dan persyaratan perjalanan internasional untuk mencegah penularan yang berasal dari luar negeri.

“Pengamanan dan pemeriksaan di setiap pintu masuk baik melalui udara, darat, maupun laut harus diperketat,” tutur Felly.

Prof. Dr. Tjandra Yoga Aditama, Guru Besar FK UI dan Direktur WHO SEARO (World Health Organization South-East Asia Regional Office) 2018-2020, memilih India sebagai contoh penanggulangan serta ancaman pandemi covid-19.

Menurutnya, di Indonesia penanggulangan virus korona dimulai dengan acara memukul gong, tetapi di India dimulai dengan menyalakan lilin. “Saya memang lama bekerja di WHO South-East Asia yang kantornya di India,” ungkap Tjandra.

Pada September 2020 ia pulang ke Indonesia. Saat itu jumlah kasus covid-19 di India sedang tinggi-tingginya, puncaknya pada September mencapai 97 ribu kasus. Padahal, pada Februari angkanya baru 9.000.

India berhasil menurunkan 10 kali lipat tanpa vaksin walaupun memang kemudian naik lagi 40 kali lipat. Kenapa naik 40 kali lipat? Ada lima penyebab yang mungkin bisa menjadi pelajaran untuk kita.

Pertama, peraturan tidak ketat lagi. Kalau di kita disebut 3M, mereka karena bahasa Inggris pakai 3W, yakni *watch distance, wear your mask, and wash your hands*, yang tidak ketat lagi. Ada yang pakai masker sudah di dagu, pasar sudah penuh lagi, dan bioskop penuh kembali. “Jadi, kalau tidak ketat lagi melaksanakan 3M atau 3W, tentu saja kemungkinan penularan lebih besar. Artinya, kita harus terus mempertahankan protokol kesehatan jangan sampai kendur,” ujarnya dalam diskusi yang dipandu Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah.

Kedua, terjadi *event-event* besar. Ada pilkada atau pemilihan di negara bagian untuk jabatan *chief minister*. Itu sangat ramai, kampanyenya penuh manusia.

Kemudian gedung-gedung pertemuan dan pernikahan sudah penuh lagi. Pernikahan di India sangat heboh, seheboh film India. Selain itu, ada upacara keagamaan yang melibatkan massa dalam jumlah besar.

Ketiga, soal vaksinasi. Pada Maret 2021-April 2021 mereka sudah lakukan vaksinasi sebanyak 120 juta orang dan sekarang sudah lebih dari 150 juta. Seakan-akan jumlah itu banyak, tapi ingat, jumlah penduduk India 1,4 miliar sehingga angka tersebut belum sampai 10%.

Keempat, jumlah *testing* yang menurun. Pada Oktober-November hampir 1,5 juta orang yang dites per hari, tapi angka itu terus menurun hingga 50%. Bersamaan dengan penurunan tersebut, angka penularan covid-19 pun meningkat.

Kelima, ada mutasi varian baru, yakni B.1.1.7 yang berasal dari Inggris dan B.1.351 yang berasal dari Afrika Selatan, serta P.1 dari Brasil, sudah ada di India. Selain tiga varian itu, ada pula B.1.617 yang berasal dari India sendiri. “Jadi, begitulah yang terjadi di India.”

Beberapa dari varian baru yang ada di India itu juga sudah masuk Indonesia. Karena itu, kewaspadaan harus dilakukan secara terus-menerus tanpa henti.

Bagaimana mengatasi varian baru? Secara pribadi Tjandra mengusulkan lima hal yang perlu dilakukan. Pertama, lakukan penelitian epidemiologi secara mendalam atau mungkin sekarang lebih top dengan istilah *tracking*. Artinya, kalau ada yang sakit, dicek, dia menularkan ke mana dan tertular dari mana. Namun, jangan selesai di situ saja. Mereka yang tertular *second layer* juga harus semuanya diperiksa, dianalisis secara mendalam.

Kedua, menurut WHO, ada PHSM (*public health and social*



MI/SUSANTO

Jurnalis mengikuti vaksinasi covid-19 dosis kedua di Hall Basket Senayan, Jakarta, Selasa (16/3/2021). Vaksinasi tahap kedua itu ditujukan bagi wartawan dan awak media untuk memberikan proteksi kepada para awak media pada saat melaksanakan tugas mereka.

*measure*) termasuk cuci tangan, pakai masker, plus program kepedulian infeksi. Ketiga, harus ada program khusus untuk mendeteksi *unusual event*, yakni sesuatu yang tidak biasa, misalnya ada orang gagah perkasa, sehat walafiat, umur 25 tahun, badannya bagus, sudah divaksin dua kali tiba-tiba sakit, masuk rumah sakit pakai ventilator.

“Poinnya adalah kemungkinan tertular masih tetap ada meskipun daya tahan tubuh sangat baik dan sudah divaksin dua kali.”

Keempat, lakukan surveilans secara teliti dan menyeluruh. Kelima, tetap melaksanakan 3M, 3T, dan vaksinasi secara tertib, tidak ada pilihan lain.

Lebih lanjut dijelaskan, kesiapan pelayan kesehatan primer perlu dilakukan menghadapi lonjakan kasus baru. Publik harus mendapatkan akses yang mudah dan cepat ke puskesmas, klinik, dan rumah sakit terdekat bila menghadapi masalah yang membutuhkan pertolongan segera.

Lebih lanjut, kata Tjandra, setiap program kesehatan yang dikeluarkan tidak boleh dilakukan untuk masyarakat, tetapi harus dilakukan bersama masyarakat. “Masyarakat harus merasa memiliki program itu, baru program itu bisa sukses,” cetusnya.

Ia menjelaskan pada dasarnya semua negara tidak siap menghadapi pandemi covid-19. Jadi, mungkin ada *best practice* di satu tempat, tapi tidak cocok bila praktik serupa diterapkan di tempat atau negara lain.

“Jadi, memang kalau mau mengambil *best practice*, harus melihat secara menyeluruh dari berbagai negara, tidak bisa diadopsi seutuhnya karena *best practice* tidak mudah di-*copy and paste* begitu saja,” Tjandra mengingatkan.

Misalnya, kebijakan *lockdown* yang diterapkan di suatu negara belum tentu cocok untuk diterapkan di Indonesia sebagai negara kepulauan dengan beragam persoalan dan keunikan yang ada.

“Kebijakan penanggulangan pandemi covid-19 di Tanah Air harus mengacu pada kondisi riil yang ada di dalam negeri, bukan berdasarkan kondisi atau situasi yang ada di negara lain,” tegas Tjandra.

Dr. Windhu Purnomo, pengajar dari Departemen Biostatistik dan Kependudukan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, berpandangan bahwa dalam melihat kondisi epidemiologi covid-19 di Indonesia, yang perlu diketahui ialah kita sudah punya pengalaman lebih dari setahun, apalagi berkaitan dengan liburan. Momen-momen liburan panjang selalu diikuti peningkatan kasus baru covid-19.

Ia secara khusus menyoroti naik-turunnya tingkat penularan virus korona di masyarakat. Sesungguhnya itu merupakan hal yang wajar bila sejalan dengan tingkat aktivitas dan mobilitas masyarakat. Namun, bila penurunan terjadi karena ada upaya menekan proses *testing*, yang kita dapatkan ialah penurunan semu karena angka yang dilaporkan berbeda dengan tingkat penularan yang sebenarnya.

Selain itu, bila proses *testing* berjalan normal, tetapi tingkat penularan cenderung *flat*, itu sebetulnya tanda bahaya.

“Pola ini bisa kita lihat dan pelajari dari banyak negara, termasuk India, setiap ada penurunan kemudian *flat* tidak turun lagi, itu adalah tanda-tanda yang harus diwaspadai karena kemungkinan akan ada lonjakan berikutnya,” Windhu mengingatkan.

Menteri Kesehatan menyampaikan banyak pemimpin daerah



M/IRAMDANI

Petugas gabungan melakukan pemeriksaan dokumen terkait dengan covid-19 kepada penumpang kendaraan saat melakukan penyekatan kendaraan sebagai operasi larangan mudik Idul Fitri 1442 H di Gerbang Tol Cikarang Barat, Jawa Barat, Kamis (6/5/2021). Penyekatan dilakukan petugas untuk menekan angka penyebaran covid-19.

atau forkopimda yang berupaya menekan jumlah *testing* agar tidak kelihatan terjadi lonjakan kasus baru di suatu daerah.

Padahal, menurutnya, kinerja pemerintah daerah dalam penanggulangan pandemi covid-19 harusnya dilihat dari bagaimana mereka melakukan deteksi kasus. “Bukan berdasarkan hasilnya,

karena kalau hasilnya yang dilihat, banyak ditekan supaya tidak kelihatan besar.”

Kalau tingkat kesehatan masyarakat bagus, ekonomi akan bergerak dengan sendirinya dan itulah yang diharapkan pemerintah sejak awal pandemi. Implementasi harapan tersebut diwujudkan melalui kebijakan penanggulangan pandemi covid-19 berjalan seiring dengan upaya pemulihan ekonomi.

Untuk itu, yang seharusnya menjadi dominan dalam menilai kinerja daerah jangan mengacu pada jumlah kasus. Yang menjadi ukuran kinerja ialah tingkat pendeteksian kasus di masyarakat.

Berdasarkan standar WHO, setiap kasus positif ditindaklanjuti dengan pelacakan terhadap 30 orang yang melakukan kontak erat. Namun, dalam praktiknya terjadi gap yang cukup besar karena jumlah kasus positif sangat tinggi, tetapi jumlah orang yang dites sangat sedikit.

Jumlah *testing* menurut WHO ialah 1 per mil atau 1 orang per 1.000 penduduk per minggu. Jadi, Indonesia per minggu harusnya 270 ribu orang yang dites karena jumlah penduduk kita ialah 270 juta. “Tapi realisasinya masih jauh di bawah angka tersebut,” tegas Windhu.

Dalam hal vaksinasi juga kita masih berada pada kecepatan yang belum maksimal sebagaimana diharapkan. Hingga 19 Mei 2021 kita sudah melaksanakan program vaksinasi selama 107 hari, tapi capaiannya baru sebanyak 23 juta dosis. Bila dibagi 107 hari, berarti sehari sebanyak 207.403 warga yang menerima vak-

sin.

“Padahal, Presiden Jokowi pernah menyatakan targetnya adalah 1 juta dosis vaksin setiap hari sehingga Januari atau Februari 2022 sudah mencapai 70% sehingga terbentuk *herd immunity*. Capaian vaksinasi kita masih di angka 217 ribu per hari atau seperlima dari target yang diharapkan Presiden,” paparnya.

Salah satu persoalan dalam hal proses vaksinasi ialah ketergantungan pada vaksin luar negeri meskipun sejauh ini stok vaksin yang disiapkan pemerintah relatif masih cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Meski demikian, untuk kebutuhan jauh ke depan, kita harus terus berupaya untuk memiliki vaksin buatan dalam negeri atau vaksin nasional karena tidak seorang pun dapat memastikan kapan pandemi covid-19 akan berakhir.

Sementara itu, dr. Ivan Virnanda Amu, M.Kes., Sp.PD., dosen Program Studi Kedokteran Universitas Negeri Gorontalo sekaligus bagian dari Tim Penanganan Covid-19 Gorontalo, mengingatkan bahwa masyarakat harus diedukasi secara serius mengenai ancaman dan bahaya yang ditimbulkan covid-19.

Hal itu penting mengingat virus korona terus bermutasi dari waktu ke waktu. “Mutasi itu terjadi karena virus tersebut selalu beradaptasi terhadap lingkungannya,” jelasnya.

Kita perlu mengetahui mutasi tersebut karena dengan pengetahuan yang ada, kita bisa menentukan atau memprediksi tingkat ancamannya. Dengan demikian, kita dapat menentukan lang-

kah-langkah untuk menanggulangnya.

Untuk jangka panjang, Ivan berharap proses penanggulangan covid-19 harus ditopang peraturan pemerintah yang konsisten dan tidak berubah-ubah. “Bagi kami klinisi dan akademisi, kadang-kadang bulan ini muncul peraturan seperti ini, ketika (kami) sampaikan ke masyarakat tiba-tiba bulan berikutnya aturan berubah, tentu akan menjadi masalah, apalagi kami mengajar dan berhubungan dengan orang banyak, mengedukasi pasien, edukasi anak didik,” keluhnya.

Apalagi, imbuhnya, di masyarakat kerap terjadi arus informasi yang cepat sehingga mereka sering membandingkan peraturan antara negara A dan negara B. Misalnya, muncul pertanyaan mengapa Indonesia cuma seperti ini, padahal Singapura sudah *lockdown*, Malaysia sudah *lockdown*. Kenapa kita masih seperti ini?

“Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tentu harus dijawab dengan penjelasan yang utuh dan komprehensif serta didukung peraturan tentang pembatasan aktivitas dan mobilitas publik yang konsisten dan efektif sesuai dengan kondisi riil yang kita hadapi.” ■



Banyak sekali yang bisa kita buktikan bahwa orang datang dari luar negeri, *landing*, distempel oleh imigrasi langsung masuk ke mobil dan pulang ke rumah. Tidak ada karantina, tidak ada isolasi.”

**Arief Suditomo**

Direktur Pemberitaan *Metro TV*

## 4 Kuncinya Sosialisasi dan Komunikasi

**D**ALAM menanggapi paparan para narasumber, Wahyu Dhyatmika, Pemimpin Redaksi Majalah *Tempo*, menyatakan kata kunci yang bisa ditangkap dari keempat pembicara ialah pentingnya sosialisasi dan komunikasi publik di masa pandemi covid-19.

“Kita sering lupa bahwa pandemi tidak hanya soal virus, tapi juga soal informasi. Sejak awal sebenarnya sudah diingatkan Direktur Jenderal WHO bahwa yang kita hadapi bukan hanya pandemi, melainkan juga infodemi,” terang Wahyu.

Ketika informasi tidak akurat, ketika disinformasi menyebar, kesimpangsiuran dan kebingungan yang ditimbulkan itu sama berbahayanya dengan virus itu sendiri.

Kita lihat dari waktu ke waktu sejak pandemi merebak di Indonesia, kebingungan soal *testing*, soal 3T, kebingungan soal mudik, kebingungan soal vaksinasi, dan penolakan-penolakan atas kebijakan pemerintah dalam pengendalian pandemi.

Itu semua, kata dia, merupakan bagian dari infodemi, bagian dari kesimpangsiuran informasi. “Juga perlu diingatkan bahwa korban pertama dalam pandemi adalah kebenaran.”

Seharusnya wartawan dan media bisa memainkan peran kunci dalam mengikat atau menjahit berbagai sudut pandang, berbagai sumber informasi, agar kita bisa selamat melewati pandemi.

Virus korona ialah sesuatu yang terus bergerak maka informasinya juga selalu berubah. Pada awalnya WHO menyatakan yang pakai masker hanya orang sakit atau yang positif covid-19, tapi kemudian semua orang diwajibkan memakai masker. Pada awalnya kita mendapatkan informasi bahwa virus menyebar lewat udara, tapi ternyata belakangan dijelaskan virus menular dari manusia ke manusia melalui percikan cairan dari mulut dan hidung.

“Jadi, karena informasi tentang virus berkembang terus, masyarakat kesulitan dalam menghadapi pandemi akibat kesimpangsiuran data dan informasi yang terus berubah,” ujarnya.

Kelak, ujar Wahyu, perlu komunikasi publik yang baik, informasi tidak boleh simpang siur, perlu ada kepercayaan. Pemerintah harus membangun kepercayaan publik karena pandemi bukan hanya menjadi urusan pihak tertentu, melainkan juga pekerjaan

semua orang dalam membangun resiliensi atau ketahanan kesehatan kolektif, ketahanan suatu negara.

Karena itu, kita perlu mempersiapkan diri untuk hidup dan beradaptasi dalam suatu keadaan baru (*new normal*) untuk jangka panjang.

Banyak hal yang sebetulnya perlu dibahas agar kita tetap bisa melalui pandemi dengan *new normal*, bukan hanya soal rem dan gas. Pemerintah sering menyebut kita perlu rem kalau naik lalu kalau sudah agak longgar, kita gas lagi supaya ekonomi jalan.

Persoalannya jauh lebih kompleks dari itu, jauh lebih banyak hal yang seharusnya bisa diputuskan sehingga publik menjadi lebih tenang dan bisa menjalani hidup dan aktivitas tanpa dihantui kecemasan berlebihan tentang pandemi.

Dalam kesempatan yang sama, Arief Suditomo, Direktur Pemberitaan *Metro TV*, menyorot permasalahan *positivity rate* yang tidak akurat. Ia menyebut *Metro TV* pernah melakukan survei tentang *test rate* guna melihat lebih dalam *positivity rate* covid-19 di Indonesia.

Survei difokuskan pada proses penentuan *positivity rate* dengan mengambil 10 daerah dengan *positivity rate* terendah sebagai sampel. Ternyata, *test rate* yang dilakukan kacau balau, bahkan beberapa daerah nyata-nyata menyembunyikan data mereka sehingga tidak mudah diakses.

Temuan itu senada dengan penjelasan Menkes bahwa ada beberapa daerah yang sengaja menyembunyikan data mereka

atau mengerem *test rate* hanya untuk mendapatkan status hijau (aman) dari penularan virus korona.

“Itu merupakan salah satu masalah yang harus terus didorong agar segera diatasi baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” usul Arief.

Ia juga mempertanyakan soal lemahnya pengawasan terhadap orang yang bepergian ke luar negeri atau melakukan perjalanan internasional. Padahal, banyak penularan covid-19 berasal dari orang yang datang dari luar negeri, baik WNI maupun WNA.

“Banyak sekali yang bisa kita buktikan bahwa orang datang dari luar negeri, *landing*, distempel oleh imigrasi langsung masuk ke mobil dan pulang ke rumah. Tidak ada karantina, tidak ada isolasi,” ungkapnya.

Padaahal, dampak dan risiko dari orang-orang luar negeri yang berkeliaran tanpa mendapatkan *treatment* yang jelas justru sangat berbahaya bagi masyarakat dalam negeri. “Jadi, menjaga dan mengimplementasikan setiap kebijakan yang dikeluarkan menjadi catatan serius bagi kita karena belum sejalan dengan apa yang diharapkan.”

Wartawan senior Saur Hutabarat menyatakan perlu menjernihkan beberapa persoalan karena terdapat jarak antara pengetahuan dan perilaku.

Pertama, orang yang mudik sesungguhnya bukan tidak tahu bahwa apa yang mereka lakukan dapat menyebarkan virus korona. Namun, pengetahuan tidak membuat mereka berubah peri-



M/IRAMDANI

Penumpang antri validasi surat keterangan bebas covid-19 di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (5/5/2021). Banyak penularan covid-19 berasal dari orang yang datang dari luar negeri, baik WNI maupun WNA.

laku. Kenapa? Di sini pentingnya kita melakukan persepsi selektif manakah fakta yang perlu diperhatikan dan manakah fakta yang tidak perlu diperhatikan.

Kita tidak memperhatikan kenyataan orang yang menjebol penyekatan mudik. Mengapa mereka berani menjebol? Kenapa mereka berani mudik? Apakah mereka tidak takut mati?

Ini ada soal besar yang menyangkut nilai-nilai terdalam bahwa mudik mengalahkan ketakutan akan kematian. Kalau pikiran

itu yang dipakai, apakah pemerintah tahun depan—kalau pandemi belum berakhir—masih akan menerapkan cara-cara yang represif?

Melarang itu hanya menunda pengebolan akibat orang mudik. Apakah kita tidak perlu mengubah cara melihat nilai-nilai yang masih hidup di tengah masyarakat?

Jadi, menurut Saur, melarang menjadi gagal karena tidak memahami bahwa larangan itu akan dijebol. Di satu pihak orang dilarang mudik, tetapi di lain pihak Ancol terbuka untuk umum, menunjukkan adanya paradoks kebijakan pembatasan.

Tidakkah kita perlu memperhatikan fakta yang keras itu? Bahwa kita harus mengakui di tengah masyarakat, ada yang berani mati karena adanya nilai yang lebih penting, yaitu pergi ke kampung.

Kedua, tidakkah diperlukan pemahaman tentang kesabaran dan kerendahan hati? Kalau kita memang belum dapat menentukan kapan pandemi akan berakhir, mestinya kita tidak perlu terlalu bergegas dan kehilangan kesabaran, apalagi dengan melahirkan kebijakan-kebijakan yang paradoks.

Ketiga, apa pun yang mau kita lakukan, ada satu hal yang harus kita terima bahwa manusia itu makhluk yang bermobilitas dan makhluk yang berinteraksi.

Hakikat itu ada di dalam manusia dan itu berwujud tidak hanya pada manusia Indonesia, tetapi juga pada masyarakat di negara lain. Karena itu, mengatasi mobilitas dan interaksi bukan

semata-mata menegakkan protokol kesehatan. Mungkin sudah lebih jauh dari itu, yakni menjadikan hal tersebut sebagai tata perilaku. Protokol, kan, satu hari bisa tidak dilakukan, tapi kalau menjadi tata perilaku, itu soal lain.

Terakhir, manakah yang lebih baik, memberikan penghargaan kepada sebuah daerah yang dinilai berhasil mempertahankan daerah mereka ataukah memberikan penghargaan kepada daerah yang berani dengan jujur mengatakan bahwa kami gagal?

Penghargaan terhadap daerah yang dinilai berhasil itulah yang menyebabkan kepalsuan tentang data. Tidakkah kita mengidap penyakit takut gagal? Karena menyembunyikan kegagalan, diam-diam bersemayamlah pandemi, bersemayamlah korona.

Hormatilah kepala daerah yang berani mengakui daerahnya gawat alih-alih kepala daerah yang mengatakan daerahnya hebat. Tidakkah yang hilang dari kita ialah kejujuran? ■

# V

## Upaya Menyelamatkan Anak Indonesia dalam Pandemi



# 1 Latar Belakang: Menyelamatkan Anak dan Masa Depan Mereka

---

---

**T**IDAK dapat dimungkiri, pandemi covid-19 membawa dampak luar biasa dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, terutama pada keselamatan jiwa anak-anak dan masa depan mereka.

Tingkat kematian akibat virus tersebut pada anak-anak dan anak usia bawah lima tahun (balita) mencapai 1,2% dari 60.582 jiwa atau sekitar 726 anak. Itu ialah data yang disampaikan Satgas Covid-19 per 4 Juli 2021.

Demikian pula persentase kasus positif covid-19 pada kategori anak ada di level 2,9%. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyebutkan rendahnya *test & tracing* pada anak-anak menjadi salah satu penyebab yang berkontribusi pada jumlah kematian

pada anak dan balita.

Penyebab lain ialah rendahnya pemahaman orang tua terhadap bahaya terpaparnya virus pada keluarga terdekat mereka dan keterbatasan fasilitas kesehatan khusus anak dan balita.

Keprihatinan publik muncul seiring dengan tren kasus terkonfirmasi covid-19 yang terus meningkat hingga penambahan 27.233 kasus baru (4 Juni 2021). Itu artinya terjadi peningkatan hingga 10 kali dari penambahan kasus per hari yang pernah dicatat (2.385 orang pada pertengahan Mei 2021).

Langkah strategis pemerintah berupa kedaruratan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) menjadi penting sebagai agenda prioritas yang perlu mendapat dukungan dari setiap elemen masyarakat.

Percepatan vaksinasi pada publik menjadi harapan baru guna mencapai kondisi *herd immunity*. Rencana pemerintah membuat rekor baru vaksinasi di atas 1 juta per hari patut diapresiasi dan dijaga keberlangsungannya hingga minimal 70% populasi terpenuhi.

Vaksinasi pada anak dan balita seharusnya juga menjadi fokus berikutnya setelah kategori umur lansia dan profesi pelayanan publik.

Vaksinasi pada anak, selain merupakan upaya dalam bidang kesehatan, dapat menjadi pijakan awal yang penting bagi dunia pendidikan untuk dapat melakukan normalisasi kegiatan pendidikan yang terhambat di masa pandemi.

Terbitnya rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional, atau Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), dan persetujuan penggunaan vaksin covid-19 produksi PT Biofarma (Sinovac) untuk kelompok usia anak lebih dari 12 tahun dari Badan POM tertanggal 27 Juni 2021, menjadi kabar menggembirakan sebagai modal untuk memulai program vaksinasi pada anak.

Beberapa hal penting dan mendesak yang perlu disiapkan dalam menjalankan program vaksinasi anak ialah, pertama, ketersediaan vaksin dalam jumlah yang cukup untuk menjangkau populasi anak-anak secara nasional.

Kedua, tata kelola pelaksanaan yang baik serta aman untuk menghindari tempat vaksinasi menjadi klaster penyebaran covid-19 yang justru mengancam keselamatan jiwa anak.

Ketiga, sosialisasi program vaksinasi anak. Sosialisasi menjadi ujung tombak untuk mengikis resistensi sebagian kelompok masyarakat terhadap vaksinasi. ■



Ketika kita berbicara tentang anak, mungkin kita bisa kehilangan satu generasi. Anak-anak kita sekarang sudah 1,5 tahun lebih dipaksa kehilangan masa kanak-kanak mereka.”

**Lestari Moerdijat**  
Wakil Ketua MPR RI

## 2 Selamatkan Anak dari Turbulensi Pandemi

JUMLAH penderita covid-19 di Indonesia dari kalangan anak-anak semakin melonjak, bahkan angka kematian tercatat cukup memprihatinkan.

Saat memberikan pengantar diskusi, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengungkapkan dalam data per 4 Juli 2021 tercatat tingkat kematian mencapai 720 anak.

Kasus covid-19 pada anak memang bukan sesuatu hal yang tidak mungkin. Anak-anak merupakan kelompok yang dapat terinfeksi dengan gejala yang sama, tanpa gejala, atau bahkan ada gejala, tapi berbeda-beda.

Data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia menyatakan kematian anak akibat covid-19 di negeri ini sempat menjadi kasus yang

paling tinggi sedunia.

Ketika berhadapan dengan situasi seperti itu, ditambah dengan lonjakan yang dihadapi, menyelamatkan anak-anak dan masa depan mereka menjadi sangat penting.

Lestari mengingatkan sistem kesehatan di Tanah Air, khususnya di kota-kota besar yang mengalami lonjakan kasus covid-19 sangat tinggi, belum berfungsi maksimal karena kurangnya sarana dan prasarana.

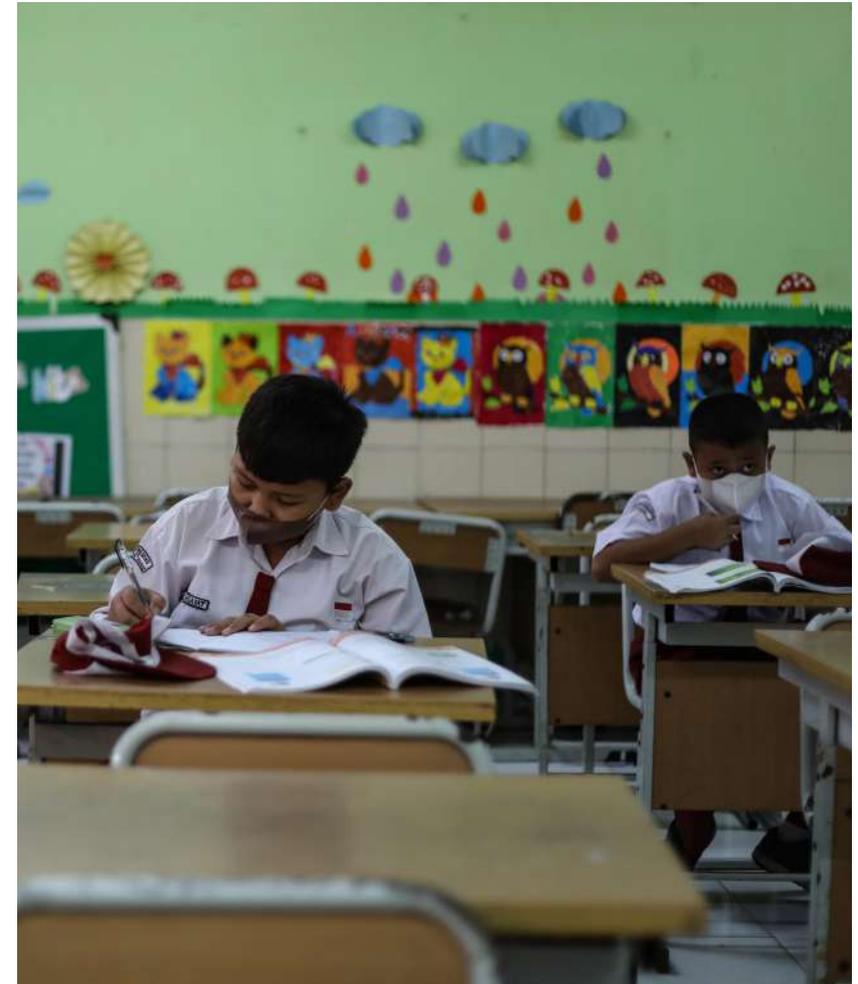
Situasi seperti itu memunculkan banyak masalah di samping tentu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan terkait dengan tata kelolanya.

“Kita memberikan apresiasi kepada pemerintah yang pada akhirnya menerapkan PPKM darurat. Ini harus didukung sebagai agenda prioritas bersama yang harapannya dengan adanya pembatasan, paling tidak kita dapat mengontrol persebaran covid-19. Bersamaan dengan PPKM, pemerintah mulai melaksanakan vaksinasi terhadap anak-anak,” kata Lestari.

Saat ini sentra vaksinasi yang memberikan kesempatan kepada anak usia 12-17 tahun sudah mulai dibuka. Demikian pula, vaksinasi bersama-sama di sekolah sudah mulai dilakukan.

Namun, persiapan vaksinasi anak, tegas Rerie, nama panggilan akrab Lestari, harus bisa dipastikan memiliki persiapan yang cukup matang dengan ketersediaan vaksin dan tata pelaksanaan vaksinasi yang aman.

Rerie mengingatkan masalah yang kita hadapi saat ini sangat



Siswa saat mengikuti kegiatan belajar secara tatap muka di SDN Srengseng 05 Pagi, Jakarta, Senin (7/2/2022). Pemprov DKI Jakarta kembali memberlakukan pembelajaran tatap muka (PTM) 50% untuk mencegah penyebaran covid-19 di sekolah. Anak-anak dipaksa harus beradaptasi. Dalam usia yang masih belia, mereka harus membangun kehidupan sosial yang baru.

kompleks. “Ketika kita berbicara tentang anak, mungkin kita bisa kehilangan satu generasi. Anak-anak kita sekarang sudah 1,5 tahun lebih dipaksa kehilangan masa kanak-kanak mereka,” katanya.

Anak-anak juga dipaksa harus beradaptasi. Dalam usia yang masih belia, mereka harus membangun kehidupan sosial yang baru. Padahal, mereka seharusnya dapat melewatkan waktu untuk membangun keceriaan dengan menyediakan tempat dan waktu untuk juga menikmati masa anak-anak mereka.

Kita saat ini dihadapkan pada situasi dan kondisi yang tidak bisa kita hindari yang membuat anak-anak hanya bisa diam di rumah dan melakukan segala sesuatunya dari rumah, termasuk melakukan pembelajaran jarak jauh.

Beberapa bulan yang lalu dalam diskusi-diskusi di Denpasar 12, kita pernah menyampaikan bahwa kita sebetulnya sedang dalam ujian. “Di sinilah *sense of crisis* kita betul-betul dilihat dan dipaksa untuk bisa menyadari dan menerima kenyataan bahwa kita sedang menghadapi turbulensi luar biasa dan menyasar kepada kehidupan kita semua dengan rentang waktu usia yang sudah tidak ada jarak lagi,” kata Rerie.

Rerie mengatakan gelombang kedua covid-19 pada akhirnya tentu tidak bisa kita hindari. Oleh sebab itu, beragam upaya untuk memutus penyebaran virus tersebut betul-betul harus ditaati.

Faktanya, menurut Rerie, saat ini anak menjadi salah satu kelompok yang secara nyata merupakan kelompok yang cukup

rentan.

Grafik kasus positif covid-19 menunjukkan pandemi belum akan berakhir. “Ya, di seluruh dunia (masih berlangsung pandemi) meskipun beberapa negara di Eropa sudah mulai melonggarkan pengetatan mereka, bahkan Inggris mencabut beberapa aturan dan memperbolehkan orang-orang untuk menonton sepak bola bersama,” ungkap Rerie.

Namun, beberapa negara tetap memperketat aturan. Rerie menjelaskan ia baru saja menerima informasi melalui *Whatsapp* dari Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru Tantowi Yahya yang menyatakan Selandia Baru memilih untuk tetap melakukan pengetatan dan protokol kesehatan.

Selama 18 bulan ke depan, katanya, Selandia Baru akan terus menjalankan praktik atau pola yang sudah dilakukan saat ini untuk memastikan negara mereka menjadi wilayah atau zona bebas covid-19.

Itu tentu berbeda dengan beberapa negara lain yang, meskipun sudah mampu mengendalikan, mulai membuka wilayah mereka. “Pilihan-pilihan itu sebetulnya menjadi hal-hal yang perlu juga menjadi pembelajaran bagi kita semua,” kata Rerie.

Namun, yang pasti, keselamatan anak-anak kita dan masa depan mereka harus kita utamakan. ■



Keluarga betul-betul memegang peranan yang paling utama, garda terdepan untuk kesehatan anak, apalagi buat anak-anak yang sedang melakukan isoman.”

**Bambang Supriyanto**  
 Anggota Tim Pakar Satgas  
 Percepatan Penanganan Covid-19

### 3 Tatkala Orang Tua Menganggap Anak Bebas Covid-19

ANGGOTA Tim Pakar Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Prof. dr. Bambang Supriyanto, Sp.AK. mencoba menyajikan informasi terkini terkait dengan penyebaran covid-19 yang angka-angkanya belum melandai dan antisipasi yang harus dilakukan untuk melindungi anak-anak.

Supriyanto mengungkapkan fakta terkini jumlah anak yang terpapar oleh covid-19 meningkat. Ditengarai, mereka terkena oleh varian baru atau kita baru tersadar ternyata covid-19 sudah menyerang anak-anak.

Jikapun anak-anak kini terserang, menurut Supriyanto, bisa jadi itu terjadi di klaster keluarga. Klaster keluarga memang ada di mana-mana.

Kapasitas tempat tidur untuk merawat mereka yang terpapar oleh covid-19, termasuk anak-anak, sekarang ini kolaps, sementara para orang tua dihadapkan pada isu tentang rencana pemerintah memberlakukan pembelajaran tatap muka. Itu tentu membuat masyarakat bingung.

Beruntung, dalam suasana seperti itu, menurut Supriyanto, vaksinasi anak yang tadinya belum pernah dilakukan kini sudah mulai dilakukan. “Dulu kita ketar-ketir kalau anak tidak dilakukan vaksinasi, bagaimana jadinya?”

Dalam situasi seperti itu, banyak tenaga kesehatan yang mulai terpapar. Diakui, komunikasi publik yang berlangsung selama ini belum maksimal. Buktinya, Supriyanto memberikan contoh, PPKM darurat belum dipatuhi. Ada saja warga masyarakat yang melanggarnya. Sepertinya ada yang kurang pas di sini.

Sementara itu di dunia, kasus positif covid-19 belum berkurang. Ada sekitar 180 juta orang terpapar dengan angka kematian sekitar 2,6%, atau hampir 4 juta orang. Di Indonesia sendiri berdasarkan data per 6 Juli 2021, sudah ada penambahan 31.189 kasus. Total sudah 2,3 juta orang positif covid-19 dengan angka kematian sekitar 2,64%.

Pada April, menurut Supriyanto, belum terlihat ada anak-anak yang terinfeksi meskipun IDAI sudah berteriak-teriak bahwa banyak anak yang terpapar oleh covid-19.

Faktanya memang ada. Sayangnya, realitas itu kadang-kadang tidak disadari para orang tua. “Mereka mengatakan, ‘Enggaklah.

Enggak mungkin anak-anak terkena’,” katanya.

Datanya cukup banyak. Sampai dengan Juni 2021 saja sudah ada sekitar 270 ribu kasus. Di dunia, kata Supriyanto, yang terkonfirmasi sampai saat ini sekitar 12 jutaan dan dari jumlah itu, 13%-nya menimpa anak-anak dengan tingkat kematian 0,3%.

Jumlah anak yang dirawat di rumah sakit kini juga banyak. “Dulu kita tidak terlalu berpikir anak-anak yang dirawat akan sebanyak ini,” ujar Supriyanto.

“Betul bahwa anak-anak yang terinfeksi oleh covid-19 mungkin lebih rendah untuk kasus yang dirawat di rumah sakit atau meninggal kalau dibandingkan dengan yang dewasa, tapi ingat bahwa tatkala kita berbicara soal anak, jangan berbicara soal angka. Mari kita berbicara dengan hati,” tambahnya.

Supriyanto mengingatkan anak dapat tertular oleh dan dapat menularkan covid-19. Sayangnya, gerakan 3M (mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak) tampaknya masih sulit dimengerti masyarakat. Buktinya apa? Supriyanto memberikan contoh, terkait dengan 3M tetap saja ada yang melanggar. Banyak warga masyarakat yang melakukan 2M saja, bahkan kadang-kadang hanya 1M.

Lalu bagaimana penanganan kasus positif covid-19 pada anak? Supriyanto menjelaskan sebenarnya penanganan covid-19 pada anak sama saja dengan orang dewasa, yaitu anak yang positif covid-19 bisa isolasi mandiri, atau rawat inap.

Kapan anak harus melakukan isolasi mandiri? Yaitu ketika dia



MI/SUSANTO

Siswa-siswi sekolah dasar (SD) menunggu panggilan vaksinasi covid-19 di SD Negeri 3 Rawa Buntu, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (14/12/2021). Kementerian Kesehatan melakukan vaksinasi bagi usia 6-11 tahun untuk meningkatkan kekebalan tubuh anak serta mengurangi transmisi atau penularan covid-19 khususnya di kalangan anak-anak di bawah umur.

positif, tetapi tanpa gejala atau mengalami gejala dengan kasus ringan seperti flu.

Jika anak harus dirawat inap di rumah sakit, Supriyanto mengungkapkan, sekarang banyak petugas kesehatan yang sudah lelah. Selain itu, kapasitas tempat tidur di rumah sakit mulai berkurang. Oleh sebab itulah, yang dirawat ialah mereka yang mengalami ka-

sus sedang dan berat.

Banyak di antara mereka yang dirawat di rumah sakit sampai membutuhkan ventilator. “Jadi, terhadap kasus covid-19 pada anak, kasus yang tanpa gejala, atau OTG, atau kasus-kasus ringan, cukup isolasi mandiri,” jelas Supriyanto.

Ketika melakukan isolasi mandiri, menurut Supriyanto, semua pihak juga harus tetap waspada. Dia mengingatkan isolasi mandiri dilakukan di rumah. Rumah ialah tempat belajar protokol kesehatan secara benar dan disiplin. Siapa yang berperan? Yang berperan ialah anggota keluarga.

Supriyanto mengatakan anggota keluarga harus bisa memberikan contoh yang baik kepada anak-anak bagaimana hidup bersih dan sehat.

“Satgas sudah berbusa-busa mengatakan pentingnya mematuhi protokol kesehatan, tetapi jika tindak laku dan polah kita tidak sesuai dengan apa yang kita katakan, anak akan melihat apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita bicarakan,” tambah Supriyanto.

Jika ada anak yang terpapar oleh covid-19 di keluarga, anggota keluarga bisa menjadi pengasuh. “Kalau ada anak yang kena, carilah pengasuh atau anggota keluarga yang mempunyai risiko rendah tertular. Jangan orang yang sudah lansia dan yang punya komorbid yang diminta jadi pengasuh,” Supriyanto mengingatkan.

Setelah anak negatif covid-19, yang bersangkutan juga harus

tetap isolasi mandiri beberapa waktu untuk memastikan apakah dia sudah benar-benar negatif atau masih positif.

Supriyanto juga menekankan jangan titip-titip anak kepada mereka yang memiliki risiko tinggi tertular oleh covid-19. Pantau, bagaimana suhunya? Makan minumannya? Apakah saturasi oksigen bagus? Aktivitasnya diam saja atau tertidur saja? Apakah dia ada gejala-gejala lagi?

Jangan lupa dicek apakah ada tanda-tanda bahaya seperti napas yang semakin cepat, sesak, wajah semakin biru, semakin diam, tidak bisa bergerak, tidak mau bergerak, dan tidak mau beraktivitas? Jika itu yang terjadi, jangan lupa, anak itu harus dibawa ke fasilitas kesehatan atau dokter.

Memantau kesehatan anak di masa pandemi, menurut Supriyanto, juga ada protokolnya, yaitu periksa suhu badannya, saturasi oksigen, laju napasnya, dan mutu makanan. Makanan harus bergizi. Siapkan obat-obatan, misalnya obat penurun panas. Siapkan termometer dan alat ukur saturasi oksigen. Siapkan semua itu di rumah.

Sebaiknya di rumah juga disiapkan *logbook* untuk mencatat perkembangan anak. Apa saja yang mesti dicatat? Supriyanto menjelaskan, apakah anak demam? Apakah batuk pilek? Berapa suhu badannya? Berapa saturasi oksigennya? “Kalau ada perubahan-perubahan, jangan lupa segera lapor tenaga medis.”

Karena pemerintah sudah memberlakukan vaksinasi buat anak-anak, saran Supriyanto, sebaiknya para orang tua memberi-

kan vaksin covid-19 kepada anak-anak mereka, terutama kepada yang telah berusia 12-17 tahun.

Diingatkan pula agar para orang tua jangan takut ke rumah sakit, lalu tidak melakukan imunisasi dasar atau ulang lagi, seperti BCG, DPT, polio, HIB, dan campak. “Jangan karena takut ke rumah sakit, akan muncul wabah berikutnya dan menimpa anak-anak kita,” kata Supriyanto.

Bagaimana dengan pembelajaran tatap muka (PTM) yang diberitakan akan dimulai di sekolah? Supriyanto berterus terang, sebaiknya ditunda dulu. Alasannya, “Kita sedang menghadapi pandemi yang kini menimpa anak-anak,” katanya.

“Kalau kita sudah benar-benar siap, siap areanya, siap sekolahnya, siap gurunya, siap orang tuanya, siap pula anaknya, barangkali kita bisa melakukan secara bertahap untuk membuka PTM,” tambah Supriyanto.

Lalu bagaimana caranya agar warga masyarakat juga ikut menyosialisasikan atau mempromosikan pentingnya kesehatan di masa pandemi?

Supriyanto menegaskan soal itu bukan hanya tugas pemerintah. “Mari, kita semua, teman-teman arisan, teman-teman pertemuan, kita lakukan bersama. Jangan lupa peran keluarga juga amat sangat penting untuk penanganan covid-19 kepada anak. Sekali lagi keluarga betul-betul memegang peranan yang paling utama, garda terdepan untuk kesehatan anak, apalagi buat anak-anak yang sedang melakukan isoman.” ■



Kami masih menemukan banyak guru yang tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan, terutama penggunaan masker.”

**Retno Listyarti**  
Komisioner KPAI

## 4 Anak Rentan Terinfeksi, Orang Tua dan Guru tidak Digugu dan Ditiru

**K**OMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tentu berkepentingan anak-anak terlindungi dari wabah penyakit apa pun di saat pandemi covid-19 diberlakukan WHO di hampir semua negara, termasuk Indonesia.

Itulah sebabnya komisi tersebut selama pandemi terus mengawasi anak-anak Indonesia agar terhindar dari covid-19, apalagi setelah pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana membuka sekolah dengan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka.

Dari pengawasan yang dilakukan, KPAI menyimpulkan, “Anak-anak merupakan kelompok yang rentan terpapar oleh covid-19 dan banyak kasus positif covid-19 pada anak yang bersumber dari



MIRAMIDANI

Petugas menyemprotkan cairan disinfektan se usai pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di SDN 05 Meruya Utara, Jakarta, Senin (6/9/2021). Selain pemberian vaksin khusus untuk anak, protokol kesehatan diterapkan di ribuan sekolah di Jakarta sebagai upaya pemerintah menekan angka penyebaran covid-19 di lingkungan sekolah.

klaster keluarga,” kata komisioner KPAI Retno Listyarti, M.Si.

Oleh sebab itulah, KPAI mendorong perlu ada percepatan vaksin covid-19 terhadap anak. Kebetulan saat ini sudah ada anak usia 12-17 tahun yang divaksin.

KPAI kemudian menyoroti rencana PTM di sejumlah sekolah. Retno mengatakan mayoritas sekolah di Indonesia memang belum menggelar pembelajaran tatap muka, tetapi kenyataannya

sudah banyak anak yang terinfeksi oleh covid-19.

Terkait dengan pemberian imunisasi dasar bagi anak, “Kalau dari hasil pengawasan kami, ternyata (pemberian imunisasi dasar) menurun selama masa pandemi covid-19. Dari 2020 sampai 2021 di Juni terjadi penurunan,” kata Retno.

Namun, lembaganya memaklumi karena tugas pemerintah saat ini tidak hanya melakukan pencegahan agar covid-19 tidak meluas, tetapi juga tetap melakukan pembangunan bidang kesehatan lain yang semuanya mesti diperhatikan.

KPAI juga melihat ternyata pemerintah juga belum berhasil menuntaskan target pemberian vaksin kepada 5,6 juta guru sebagai kelompok prioritas, yang seharusnya pada Juni 2021. Namun, uniknya menurut Retno, Aceh sudah membuka sekolah, yaitu 78%, tertinggi di Indonesia. Uniknya lagi angka vaksinasi guru mereka terendah di Indonesia. “Buka sekolahnya tertinggi, angka vaksinasi gurunya malah terendah di Indonesia. Nah, ini, kok, bisa, ya, seperti ini?” kata Retno.

Beberapa daerah seperti NTB dan Bengkulu, berdasarkan pengamatan KPAI, memang mengalami beberapa kekurangan terkait dengan program vaksinasi covid-19. “Ini *pe-er* (pekerjaan rumah) tersendiri. Jika itu disebabkan kekurangan vaksin, kami tidak memiliki datanya. Hanya kalau ada kasus di setiap daerah, kami akan bertanya tentang itu baik dengan Dinas Pendidikan maupun dengan pihak sekolah,” tambah Retno.

Retno mengakui data anak-anak yang terkonfirmasi covid-19

secara *real-time* terkadang sulit diperoleh. KPAI dan IDAI beberapa kali diundang pemerintah ketika pemerintah akan membuka sekolah untuk PTM. “Kami dimintai pendapat walau kadang-kadang pendapat dan rekomendasi kami dan IDAI tidak diperhatikan.”

Kebijakan pembelajaran tatap muka sebagaimana diatur lewat surat keputusan bersama (SKB) empat menteri, menurut Retno, juga berubah-ubah. Pada Juli 2021 pemerintah akan membuka sekolah secara serentak. Mendikbud bahkan menyatakan akan dibuka secara serentak dan tidak ada tawar-menawar. Namun, ternyata sampai sekarang pun belum dibuka.

KPAI sudah menunggu dan sudah bersurat kepada pihak terkait untuk menanyakan tindak lanjutnya seperti apa. “Itu kami tanyakan karena *positivity rate* wilayah yang kami rekomendasikan untuk boleh dibuka adalah di bawah 5% meskipun data ini pun terkadang tidak valid karena daerah tidak jujur. Jadi, tidak menggambarkan fakta yang sesungguhnya,” ujar Retno.

Beberapa temuan lapangan KPAI terkait dengan pembelajaran tatap muka, kata Retno, menunjukkan jika sekolah dibuka, hal itu mengandung potensi besar anak-anak tertular atau menularkan covid-19.

Retno menjelaskan, sejak 2020, KPAI sudah masuk ke 105 sekolah di 30 kabupaten/kota, meliputi 11 provinsi. Hasilnya? “Kami masih menemukan banyak guru yang tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan, terutama penggunaan masker.”

Saat memberikan contoh, Retno menuturkan, “Pernah suatu



MIRAMDANI

Siswa kelas X mengikuti pembelajaran tatap muka dengan menggunakan buku elektronik dalam kelas yang sudah dipasang penyekat di SMAN 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Senin (20/9/2021). Dengan penerapan protokol kesehatan covid-19 yang ketat, pemerintah meminta semua pihak ikut mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas yang kian penting dan mendesak untuk menghindarkan generasi muda Indonesia dari *learning loss* atau penurunan capaian pembelajaran, serta dalam upaya menyelamatkan anak-anak Indonesia dari risiko dampak negatif pembelajaran jarak jauh secara berkepanjangan.

hari kami datang ke SMA negeri di suatu kabupaten. Saat itu kami menemukan peristiwa di ruang guru, semuanya tidak memakai masker. Rupanya guru-guru ini masuk ke sekolah untuk memberikan pembelajaran jarak jauh di ruang guru. Mereka tidak memakai masker, sambil makan, sambil *ngobrol*.”

KPAI terus memantau untuk mengetahui dampak kelakuan para guru di sana. Ternyata kurang dari minggu setelah tim KPAI

ke sana, 13 guru terkonfirmasi covid-19.

“Waktu itu kami sudah mengatakan, ‘Ini bagaimana? Jarak duduknya dekat-dekat, tidak pakai masker pula’. Ini memang *pe-er* kita. Masih banyak guru yang meletakkan masker di dagu, terutama kalau sedang menerangkan mata pelajaran, masker diturunkan ke dagu,” kata Retno.

Retno melanjutkan, “Pernah suatu hari kami datang ke sebuah sekolah. Kami melihat semua murid mengenakan masker di dagu. Para murid ternyata mengikuti gurunya yang sedang mengajar dengan masker di dagu.”

Harap maklum, anak SD memang suka meniru. “Tapi lebih parah lagi, kami pernah datang ke sebuah kelas di suatu sekolah di daerah. Semuanya tidak bermasker. Ketika kami tanya mengapa tidak bermasker, gurunya menjawab, ‘Bawa, kok, Bu. Kalau Ibu tidak percaya, tanya saja ke mereka’. Ternyata semua maskernya ada di dalam tas. Mereka pakai masker itu seperti memakai helm. Mereka tidak menyadari bahwa risiko tertinggi justru berada di dalam ruang kelas,” ungkap Retno.

KPAI juga menemukan fakta ada sekolah di suatu wilayah di kabupaten di Jawa Tengah yang sudah membuka sekolah. Asal main buka saja berdasarkan surat edaran. Tim KPAI kaget. Pihak sekolah hanya menambah satu wastafel di depan pintu gerbang dan melengkapi dengan *banner* berisi info tentang protokol kesehatan.

“Mereka menganggap *banner* itu sebagai SOP (*standard opera-*

*ting procedure*) atau protokol kesehatan. Jadi, banyak sekolah yang main buka saja, tapi tidak memberikan petunjuk, tidak memberikan arahan,” kata Retno.

Saat KPAI melakukan pengawasan di Toba, Sumatra Utara, terpantau ada 51 sekolah sudah buka di sana. Dari jumlah itu, 13 sekolah mengisi daftar periksa yang dikeluarkan Kemendikbud, dan dari 13 itu, satu sekolah tidak memiliki toilet, empat sekolah tidak memiliki *thermal gun*, tapi tetap buka juga.

Saat menunaikan ibadah, anak-anak juga mengabaikan protokol kesehatan. Saat melakukan salat Duha, anak-anak tidak menjaga jarak. Ketika melihat itu, “Terus terang kami terkejut. Lagi-lagi ini *pe-er* kita,” tutur Retno.

Setelah dihadapkan pada realitas seperti itu, KPAI meminta pemerintah agar menunda pembelajaran tatap muka yang akan diberlakukan Juli 2021 karena jika dilanjutkan, akan memiliki risiko tinggi. Terkait dengan percepatan program vaksinasi, KPAI sangat mendukung demi menyelamatkan anak-anak Indonesia. ■



Sebagai orang tua,  
kita lengah saat  
melaksanakan protokol  
kesehatan di dalam  
rumah. Kita langsung  
melepas masker,  
padahal sebelumnya  
kita melakukan  
aktivitas di luar rumah.”

**Siti Nadia Tarmizi**

Juru bicara Kementerian Kesehatan  
untuk Vaksinasi Covid-19

## 5 Orang Tua Sering Lengah

**S**AAT Forum Diskusi Denpasar 12 bertema ‘Upaya Menyelamatkan Anak Indonesia dalam Pandemi (Tata Kelola Kesehatan Anak hingga Persiapan Vaksinasinya)’ digelar secara virtual pada Rabu, 7 Juni 2021, vaksinasi sudah diberlakukan bagi anak remaja usia 12-17 tahun.

Juru bicara Kementerian Kesehatan untuk Vaksinasi Covid-19, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid., mengungkapkan sampai saat itu setidaknya sudah ada 56.500 remaja yang divaksin dengan Sino-vac.

Menurut dia, anak-anak memang perlu dilindungi dari penularan covid-19 yang cenderung bakal meningkat. Rata-rata kasus positif covid-19 cenderung naik di sejumlah daerah, terutama di

10 provinsi. Dari 10 provinsi itu, jumlah kasus harian positif tertinggi ialah DKI Jakarta, menyusul Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta.

Itu berarti, “Pulau Jawa adalah penyumbang kasus tertinggi. Kemudian ada daerah lain yang tentunya juga perlu diwaspadai kita semua, seperti Kalimantan Timur, Riau, Sulawesi Selatan, dan Sumatra Barat,” kata Siti Nadia.

Sebenarnya, menurut Nadia, Kemenkes sudah memantau sejak Ramadan karena ada peningkatan kasus seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Namun, protokol kesehatan cenderung diabaikan.

Diakui, saat Ramadan dan Lebaran, terutama saat salat Idul Fitri, pemerintah memang memberikan sedikit kelonggaran guna memberikan kesempatan kepada warga masyarakat agar leluasa beribadah. Namun, ditambah dengan kerumunan di tempat-tempat wisata saat liburan, “Terjadilah peningkatan kasus positif yang luar biasa,” kata Nadia.

Nadia menegaskan mobilitas masyarakat yang tinggi dan penerapan protokol kesehatan yang lemah, ditambah munculnya covid-19 varian baru, delta, mengakibatkan tingginya lonjakan kasus covid-19.

Soal kerumunan, Nadia mengingatkan masyarakat agar berhati-hati saat menghadiri acara makan bersama, pemakaman, olahraga bersama, foto bersama saat lepas masker sebentar, dan kunjungan ke rumah teman atau saudara dan area publik. “Di

tempat-tempat dan momen seperti inilah sering masyarakat lengah dan terjadi penularan,” katanya.

Sangat mungkin pula, kata Nadia, “Sebagai orang tua, kita lengah saat melaksanakan protokol kesehatan di dalam rumah. Kita langsung melepas masker, padahal sebelumnya kita melakukan aktivitas di luar rumah.”

Nadia juga mengingatkan bahwa vaksin bukan berarti kita yang telah divaksin langsung terbebas dari penularan covid-19. “Di masa pandemi, walaupun sudah divaksin, protokol kesehatan tetap harus diperketat dan kita tetap harus disiplin. Tidak boleh kendur. Ini juga *message* yang harus kita sampaikan kepada anak-anak remaja yang nanti akan mendapatkan vaksinasi bahwa vaksinasi saja tidak cukup untuk membuat anak-anak kita terlindungi dari covid-19 di masa pandemi ini.”

Nadia kemudian mengungkapkan logika jika seluruh warga negara Indonesia melakukan vaksinasi. Jika setiap individu mendapatkan vaksin, tubuh mereka akan mendapatkan kekebalan. “Kalau kita semua juga divaksin, akan terbentuk kekebalan kelompok yang pada akhirnya dapat memberikan perlindungan kepada kelompok lain, termasuk remaja, anak-anak.”

Sebelum vaksinasi menjangkau 70% dari jumlah penduduk Indonesia, kata Nadia, posisi kita belum aman dari covid-19. Tanggung jawab pemerintah saat ini ialah bagaimana segera memperluas dan memperbanyak orang yang divaksin. “Semakin banyak orang mendapatkan vaksin maka akan semakin cepat terjadi



MI/RAWDANI

Warga antri mengikuti vaksinasi covid-19 di area parkir Ramayana Ciledug, Tangerang, Selasa (3/8/2021). Kegiatan tersebut menyediakan 500 vaksin per hari untuk anak-anak 12 tahun ke atas dan dewasa dari berbagai wilayah cukup dengan membawa KTP dan kartu keluarga, sebagai upaya pencapaian target vaksinasi 2 juta dosis per hari sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.

kekebalan kelompok.”

Terkait dengan banyaknya merek vaksin yang digunakan, Nadia menjelaskan faktanya Indonesia tidak bisa memesan vaksin hanya dari satu perusahaan. Satu merek vaksin tidak bisa mencukupi kebutuhan kita akan vaksin sebanyak 426 juta dosis.

Khusus untuk program vaksinasi remaja saja, menurut Nadia, Indonesia membutuhkan 200 juta dosis. “Kita sudah memasuki

Juni 2021, proses vaksinasi sudah kita berikan kepada anak-anak usia di atas 18 tahun. Kini kita tidak lagi melakukan vaksinasi dengan membagi berdasarkan masyarakat rentan atau tidak, tetapi langsung ke seluruh penduduk usia di atas 18 tahun sudah bisa mendapatkan vaksin.”

Nadia menambahkan, karena jumlah vaksin yang masuk ke Indonesia tidak bersamaan, tentunya harus diatur. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus membuat strategi agar vaksin yang diterima dialokasikan atau ditujukan kepada kelompok sasaran yang tepat.

Pelaksanaan vaksinasi, termasuk buat anak-anak, bisa melalui basis fasilitas kesehatan (puskesmas atau rumah sakit), bisa pula pemerintah, swasta, dan institusi seperti yang sudah dilakukan TNI dan Polri, atau bisa juga vaksinasi massal di sentra-sentra vaksinasi.

Bisa pula melakukan vaksinasi massal bergerak di pasar-pasar, di sekolah-sekolah, atau di tempat-tempat tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan, termasuk misalnya vaksinasi massal bergerak untuk para penyandang disabilitas.

Demi menjangkau semua, menurut Nadia, pemerintah juga berkepentingan menjamah mereka yang tidak punya KTP agar divaksin. Cara yang ditempuh ialah yang bersangkutan diminta membuat surat keterangan domisili atau surat keterangan kerja. “Melakukan vaksin dosis kedua dapat di mana saja tanpa harus menunjukkan dia berdomisili di mana,” katanya.

Ia menambahkan, “Kami juga mendorong bagaimana mempercepat vaksinasi. Dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota tidak perlu menstok vaksin sampai dengan perhitungan pemberian dosis kedua. Jadi, apa dan berapa pun jumlah vaksin yang diterima, segera bagikan kepada kabupaten/kota dan pelayanan kesehatan untuk kemudian disuntikkan ke masyarakat.”

Nadia mengungkapkan, kasus positif covid-19 paling banyak menimpa mereka yang berusia di atas 25 tahun. Khusus pada remaja, “Kami melihat risiko tertinggi pada anak berusia 15 tahun ke atas, sampai 24%. Ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan pada usia di bawah 14 tahun,” katanya.

Walaupun pemerintah tetap memprioritaskan vaksinasi kepada para warga lansia, pihaknya juga tetap fokus agar vaksinasi kepada anak-anak dengan rentang usia 12-17 tahun segera tuntas. Harap maklum, mereka ialah generasi yang banyak melakukan aktivitas di luar rumah.

Terkait dengan PTM, Nadia mengatakan para orang tua masih diberi pilihan apakah anak mereka akan melakukan pembelajaran tatap muka atau melakukan pembelajaran secara daring. Itu artinya sekolah tetap harus menyediakan dua metode itu selama pembelajaran tatap muka di masa pandemi.

Namun, yang tidak kalah penting, pemerintah berkomitmen bahwa semua guru dan tenaga pendidik harus sudah vaksinasi. Selain itu, sarana dan prasarana sekolah harus mendukung. “Harus dipastikan protokol kesehatan dijalankan. Jarak duduk antara

satu siswa dan siswa lainnya adalah 1-1,5 meter, kapasitas ruangan 50%, dan waktu untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka tidak *full*, tidak ada kantin yang buka.”

Begitu murid masuk kelas, lanjut Nadia, pihak sekolah langsung melaksanakan pembelajaran tatap muka. Saat istirahat, para murid tetap berada di ruangan, tidak ada yang membawa makanan. Proses pembelajaran juga dilakukan secara *hybrid*, atau hibrida, artinya selain tatap muka, dapat diteruskan secara daring.

Nadia mengingatkan, sampai 2021, pandemi covid-19 belum selesai. Perkembangan covid-19 masih sangat dinamis. Obat covid-19 belum ada sehingga yang paling utama tetap vaksinasi dan melakukan 3M dan 3T.

Dalam waktu dekat, menurut Nadia, kita mengharapkan vaksinasi kepada para penduduk lansia dan mereka yang berusia di atas 18 tahun sudah tuntas. Setelah itu, vaksinasi untuk anak-anak dituntaskan. ■



Varian-varian baru itu harus menjadi kewaspadaan atau *variant of concern* kita.”

**Ni Nyoman Tri Puspaningsih**  
Wakil Rektor Universitas Airlangga

## 6 Virus itu Terus Bermutasi Menjadi Varian Baru

SEBAGAI Wakil Rektor Universitas Airlangga yang membidangi riset, inovasi, dan *community development* serta Ketua Pusat Riset Rekayasa Molekul Hayati di universitas tersebut, Prof. Dr. Ni Nyoman Tri Puspaningsih, M.Si. dalam Forum Diskusi Denpasar 12 lebih banyak membicarakan covid-19 dari sudut pandang ilmiah dan mengapa virus itu terus bermutasi dan menjadi varian baru.

Puspaningsih menjelaskan pada prinsipnya covid-19 ialah virus influenza. Jika dibandingkan dengan kemungkinannya berkembang dan menulari manusia, apa yang terjadi saat ini tergolong masih sedikit.

Puspaningsih menyebut angka 0,01% untuk tingkat dunia dan

kasus penyebarannya di Indonesia 0,001%. Meskipun sangat kecil, “Apa yang terjadi di Indonesia, kita sudah bisa melakukan analisis terkait dengan adanya varian baru yang berkembang di sini,” katanya.

Namun, dia mengatakan begitu varian baru covid-19 *booming* dan langsung menyebar sangat kuat, sebetulnya dunia agak terlambat mengetahuinya karena keterbatasan analisis terhadap varian-varian baru yang muncul.

Kalau berdasarkan dari data yang ada, menurut Puspaningsih, para ahli sebenarnya bisa melakukan analisis terhadap gejala yang muncul untuk menjawab fenomena mengapa transmisinya menjadi begitu sangat cepat, begitu juga mengapa daya infektivitasnya meningkat cukup tajam jika dibandingkan dengan varian sebelumnya.

Pada 2020 saat awal covid-19 masuk ke Indonesia, bahkan sebelumnya saat virus itu merebak ke banyak negara, “Yang menjadi perhatian kita semua pada waktu itu adalah mutasi yang berubah amat sangat singkat. Semula hanya satu varian dalam satu tahun 2020, tapi sekarang turunannya sampai enam varian utama dari berbagai varian kecil lainnya,” ujar Puspaningsih.

Dia menegaskan bahwa virus apa pun, termasuk covid-19, selalu akan berusaha untuk melakukan perubahan, bermutasi. “Ini harus menjadi perhatian kita,” kata Puspaningsih seraya menyebutkan bahwa pemutasian itu terjadi pada daerah yang disebutkan dengan *spike*.



Petugas medis melakukan tes swab PCR warga dari dalam mobil atau *drive thru* di Swab PCR FastLab Bumame kawasan Kebon Jeruk, Jakarta, Rabu (2/2/2022) malam. Kasus covid-19 varian omikron yang terus mengalami peningkatan berdampak meningkatnya antusiasme masyarakat untuk mengecek kondisi kesehatan terkini bahkan hingga malam hari.

*Spike* ialah tempat pertama kali virus menempel pada sel manusia. Puspaningsih menyebut dengan istilah *human cell ACE2*. Bagian dari *spike* itulah yang juga menjadi target vaksin. “Kunci utamanya adalah bahwa *spike* ini menjadi sasaran untuk induksi atau terjadinya respons imun atau antibodi yang dihasilkan oleh tubuh kita.”

Ia menekankan munculnya varian-varian baru covid-19 saat ini dan ke depan harus tetap diwaspadai. “Varian-varian baru itu harus menjadi kewaspadaan atau *variant of concern* kita,” katanya.

Kalau kita mengamati dari mutasi yang terjadi pada covid-19 sejak awal muncul hingga saat ini, menurut Puspaningsih, sebenarnya sudah lebih dari 5.000 titik.

Ia sependapat dengan para ahli bahwa untuk menghindari berbagai kemungkinan yang sama-sama tidak kita inginkan, protokol kesehatan harus dilaksanakan dengan ketat.

Terkait dengan banyaknya publikasi bahwa vaksinasi dosis pertama lebih rentan terhadap varian delta, Puspaningsih mengatakan, walaupun sudah divaksin dosis pertama, “Kita tetap harus menjaga protokol kesehatan dengan ketat karena kita belum memperoleh *herd immunity*.”

Agar terjadi *herd immunity*, paling tidak 188 juta penduduk sudah divaksin, sementara penduduk yang telah divaksin dosis pertama sampai saat ini baru 34 juta orang dan yang mendapat vaksin kedua baru 14 jutaan.

Berdasarkan realitas itu, Puspaningsih menegaskan, “Kita belum terbebas dari covid-19. Ini harus menjadi perhatian utama kita karena proses mutasi virus ini sangat unik.”

Ia memperkirakan mutasi virus tersebut sebenarnya sudah terjadi pada 2020. Virus bermutasi semakin cepat dan mempunyai efek penyebaran yang lebih tinggi, begitu pula infektivitasnya. Sampai sedemikian jauh keanasannya yang mengakibatkan kematian memang belum ada bukti-bukti riil, tetapi tetap berisiko tinggi pada mereka yang berusia lanjut dan berkomorbid.

Puspaningsih tetap meminta masyarakat untuk tetap menjaga anak-anak. Dampak covid-19 varian delta memang luar biasa. Daya infektivitasnya meningkat cukup tinggi. ■



Kan, tidak semua anak diantar pergi dan pulang naik mobil. Banyak anak yang harus naik kendaraan umum. Siapa yang bisa menjamin mereka tidak tertular oleh covid-19?”

**Dieny Tjokrosuprihatono**

Anggota Dewan Pakar DPP Partai NasDem

## 7 Mempersiapkan Masa Depan Anak secara Holistik

**K**ETIKA menanggapi apa yang disampaikan Puspaningsih, anggota Dewan Pakar DPP Partai NasDem Dieny Tjokrosuprihatono mengatakan mutasi dan varian-varian baru yang memunculkan gelombang kedua, tidak bisa tidak, harus diwaspadai.

“Varian-varian baru yang terus bermutasi dengan sangat cepat dan daya tularnya juga sangat cepat merupakan sesuatu masalah yang memang harus kita pikirkan karena kita sudah merasakan munculnya gelombang kedua,” kata Dieny.

Dia tidak menampik pendapat bahwa persepsi dan pengetahuan masyarakat akan bahaya dan risiko covid-19 sangat terbatas sehingga cara pandang mereka terhadap virus tersebut kerap



MIMICKY GUSTIAWAN

Siswa mengikuti pembelajaran tatap muka di SDN 05 Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Selasa (4/1/2022). Orang tua siswa harus memperhatikan transportasi anak ketika berangkat dan pulang sekolah di masa pandemi agar anak tidak tertular oleh covid-19.

keliru.

Dieny menduga masyarakat sudah lelah menghadapi masa pandemi yang belum berakhir sehingga di lapangan, “Kita melihat banyak sekali masalah yang dihadapi warga masyarakat.” Pemerintah sudah memperketat aturan, tapi dilanggar.

Karena itu, kata Dieny, inkonsistensi kepatuhan dan kurangnya kewaspadaan masyarakat akan pentingnya protokol kesehat-

an saat ini perlu diperhatikan. Ia setuju jika perjalanan antardae-rah yang sempat diperlonggar perlu dibatasi lagi.

Masyarakat, menurut Dieny, juga memiliki pandangan yang keliru terkait dengan vaksin. Mereka menganggap vaksin ialah segalanya dan kalau sudah divaksin, tidak akan tertular oleh virus covid-19. “Padahal vaksinasi hanya menjaga tubuh kita dari serangan virus covid-19 sekitar 60%,” katanya.

Karena fokus kita pada pemulihan ekonomi, kata Dieny, kita kurang perhatian pada kesehatan. Akhirnya, banyak anak yang terinfeksi oleh covid-19. Jika anak-anak yang diserang, “Kita agak sulit melakukan 3T (*testing, tracing, and treatment*) kepada anak-anak.”

Jika mengutip dr. Bambang Supriyatno dari Tim Pakar Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 bahwa ada sekitar 12,6% anak yang terpapar oleh covid-19, itu bukan jumlah yang kecil. Padahal, anak-anak sudah merindukan sekolah.

Akibatnya, menurut Dieny, kesempatan untuk mengembangkan dan mematangkan emosi mereka jadi hilang karena pengalaman berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan teman-teman mereka, sangat terbatas.

Dieny mengatakan, kalau kita peduli pada anak-anak untuk berinteraksi dengan teman-teman mereka, kita harus peduli bagaimana anak-anak itu aman, tidak tertular oleh covid-19. Apalagi kalau mereka akan masuk sekolah, tidak mungkin kita tahan terus mereka.

Jika kita sepakat bahwa anak-anak bisa masuk sekolah pada masa pandemi, “Yang mungkin bisa kita persiapkan adalah bagaimana agar mereka lebih siap menjaga kesehatan. Tidak hanya kesehatan fisik, tapi juga kesehatan psikologis. Ini yang harus diperhatikan,” kata Dieny.

Masih menurut Dieny, harus pula diperhatikan sampai sejauh mana kesiapan para orang tua di rumah. Bagaimana dengan keselamatan anak-anak saat pulang sekolah? Siapa yang memantau perjalanan dari sekolah ke rumah? “Kan, tidak semua anak diantar pergi dan pulang naik mobil. Banyak anak yang harus naik kendaraan umum. Siapa yang bisa menjamin mereka tidak tertular oleh covid-19?”

Dieny mengingatkan, orang tua harus menerima kenyataan itu dan mau berpikir positif. “Jangan terus *ngedumel* di rumah. Para orang tua juga harus bisa berpikir positif tentang situasi yang harus dihadapi.”

Dalam situasi dan kondisi seperti saat ini, kata Dieny, para orang tua dapat mempersiapkan anak-anak, terutama anak TK dan SD. Anak-anak seusia itu punya kebiasaan suka meniru, cepat menyerap, dan bermain ialah kesenangan mereka. Saat bersama, “Kita bisa menanamkan nilai-nilai yang baik lewat contoh keteladanan, pengenalan, komunikasi, dan indahnya kebersamaan,” katanya.

Dieny menambahkan, di rumah sebaiknya orang tua menciptakan dulu suasana keluarga yang sehat. Perkuat kedekatan



MIRICKY JULIAN

Para orang tua siswa SDN 05 Meruya Utara, Jakarta Barat, mengantarkan anak mereka saat memasuki gerbang sekolah, Senin (30/8/2021). Pemprov DKI mulai memberlakukan pembelajaran tatap muka terbatas dimulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA atau sederajat, baik negeri maupun swasta.

antarkeluarga. Selalu hadir jika anak memerlukan orang tua. Berusaha untuk bisa membantu anak yang mengalami kesulitan dalam belajar. Fleksibel menghadapi anak karena setiap anak punya keinginan dan kebiasaan yang berbeda-beda.

Menurut Dieny, keterbukaan, dukungan sosial, arah, bimbingan, dan perlindungan sangat dibutuhkan anak-anak. Itu yang menjadi sangat penting untuk dilakukan orang tua. Ciptakan pola

komunikasi dua arah di dalam keluarga dengan komunikasi yang jelas. Berikan kesempatan kepada anak untuk mengekspresikan emosi mereka. Jangan anak-anak ditekan.

Sebaliknya, orang tua boleh mengekspresikan emosi kalau memang sedang lelah atau kesal. Namun, berusaha memecahkan persoalan bersama anak, hormati dan hargai perbedaan pendapat karena anak-anak mudah dan bisa berinteraksi dengan ayah dan ibu mereka kalau kita memberikan kesempatan.

“Di saat anak-anak berada di rumah, kembangkanlah nilai-nilai dan kebiasaan keluarga untuk menjaga protokol kesehatan dan menjalankannya bersama karena itu adalah teladan bagi anak,” kata Dieny.

Ia mengingatkan, anak-anak akan mencontoh apa yang dilakukan orang tua mereka dan itulah kesempatan bagi kita untuk saling mengenal dengan anak-anak kita. Kita bisa saling mengenal dengan suami dan istri. Kita bisa terlibat dalam kegiatan bersama, tidak hanya menyuruh. Kita bisa melakukan rutinitas bersama, membersihkan rumah bersama. Dari situ kita bisa mengajarkan apa itu konsep kebersihan.

Lewat kegiatan bersama semacam itu, demikian Dieny, anggota keluarga dapat belajar menyesuaikan diri terhadap perubahan. Diharapkan, dari sini, kita bisa menanamkan nilai-nilai moral seperti apa yang perlu ditanamkan di dalam keluarga dan disepakati bersama.

Pada sisi lain, kata Dieny, orang tua juga bisa menanamkan

nilai-nilai spiritualitas kepada anak-anak. Di rumah, kita bisa mempersiapkan kesehatan fisik, psikologis, dan spiritualitas anak dalam menghadapi situasi baru.

“Yang juga tidak boleh kita lupakan adalah menjaga kesehatan psikologis anak dalam menghadapi suasana sekolah jika kelak mereka kembali belajar di sekolah karena suasana sekolah tidak seperti sebelum ada covid-19,” kata Dieny.

Keakraban dan kebersamaan di rumah selama pandemi, menurut Dieny, asalkan dinikmati, sebenarnya bisa menaikkan imunitas di tubuh kita.

Di luar rumah, menurut Dieny, sarana transportasi atau trotoar juga mesti cukup baik untuk anak-anak berjalan. Halte kendaraan umum dan jembatan penyeberangan juga harus aman dan bersih. Tidak ada salahnya Kementerian Perhubungan melihat kondisi transportasi anak-anak sekolah.

Dieny menganggap penting bahwa dalam suasana seperti saat ini, semua pihak mempersiapkan anak-anak masuk sekolah dan belajar tatap muka secara holistik dan integratif. ■



**Tolonglah anggaran untuk beli senjata ditunda dulu. Fokuskan anggaran untuk menyelamatkan anak bangsa dari pandemi ini sehingga mereka dapat tervaksinasi semuanya dan dapat kembali bersekolah.”**

**Saur Hutabarat**  
Wartawan Senior

## **8** Upaya agar Kasus Covid-19 tidak makin Mencekam

**S**EBENARNYA seberapa banyak covid-19 menyerang anak-anak? Sedemikian bahayakah covid-19 bagi mereka? Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof. Dr. Tjandra Yoga Aditama mengatakan di dunia jumlah kasus covid-19 pada anak memang relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan orang dewasa.

Namun, kata Tjandra, berdasarkan data Mei 2021, kasus covid-19 pada anak-anak di beberapa negara cukup tinggi. “Jadi, tidaklah benar kalau ada yang mengatakan bahwa dampak covid-19 tidak terlalu besar pada anak-anak. Ada tiga negara yang disebut, yaitu Brasil, Indonesia, dan India.”

Ditengarai, kasus covid-19 menginfeksi anak-anak karena

munculnya varian baru delta. Namun, menurut Tjandra, bisa juga karena ada penyakit lain atau gangguan gizi. “Jadi, penyebabnya belum pasti covid-19, tapi bahwa ada peningkatan kasus covid-19 pada anak di Brasil, India, dan Indonesia memang benar.”

Tjandra mengungkapkan, di Brasil ada 1.300 bayi yang meninggal pada masa pandemi covid-19. Anak-anak itu meninggal karena adanya *multisystem inflammatory syndrome* yang berhubungan dengan covid-19. Begitu juga yang terjadi di India.

Agar apa yang terjadi di Brasil dan India tidak semakin parah di Indonesia, Tjandra mengingatkan, fasilitas kesehatan untuk anak harus diperhatikan. “Yang kita khawatirkan, kita tidak punya tempat untuk menangani anak-anak,” katanya.

Menurut Tjandra, IDAI sudah beberapa kali menyuarakan soal ini. “Kasus terbatasnya ruang ICU untuk anak-anak dan bayi sudah pernah terjadi di India. Kita tentu tidak ingin hal itu terjadi di negara kita sehingga sarana dan prasarana ini menjadi sangat penting.”

Pada 5 Juni 2021, menurut Tjandra, di India ada 3.000-an anak terpaksa menjadi yatim piatu karena kedua orang tua mereka meninggal akibat covid-19 dan ada sekitar 26 ribu anak kehilangan salah satu orang tua mereka.

Jangan sampai hal itu terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu, tegas Tjandra, anak-anak perlu terus dilindungi. Kasus penularan covid-19 harus kita tekan. Jangan sampai ada kasus yang tidak terkendali. Jangan sampai terjadi banyak anak yatim piatu di negeri

kita seperti yang terjadi di India. “PPKM darurat harus dilakukan secara maksimal. Kita perlu berperan serta dan kita bisa belajar dari pandemi ini,” kata Tjandra.

Pada tahun ini (2021), tambah Tjandra, kita masih harus hidup bersama-sama dengan covid-19, mungkin juga pada tahun-tahun yang akan datang. Oleh sebab itu, “Marilah kita bekerja bersama-sama untuk menurunkan kasus covid-19. Hari-hari ini cukup mencekam.” tegasnya.

### **Babak Terberat, Ubah Politik Anggaran**

UNTUK mempertegas perkiraan Tjandra, wartawan *Kompas*, Ahmad Arif, mengatakan saat ini kita menuju babak terberat dalam pandemi covid-19. Pasalnya, kita belum mengetahui puncaknya kapan dan belum kelihatan tanda-tandanya akan berakhir.

Fakta di lapangan, menurut Arif, hari-hari ini banyak orang mengalami kesulitan mencari rumah sakit. Jumlah kasus covid-19 dengan ketersediaan fasilitas kesehatan menjadi tidak berimbang. Belum lagi ada persoalan keterbatasan oksigen dan lain-lain. “Saya pikir ini patut menjadi kehati-hatian kita bersama,” katanya.

Menurut Arif, di India, peningkatan kasus yang tinggi bisa turun dalam dua minggu dengan sejumlah syarat, antara lain melakukan *lockdown* di beberapa negara bagian. Itu dilakukan sebab kasus positif di India sangat tinggi, sampai 2 jutaan per hari.

Arif mengatakan kita mungkin bisa merefleksikan apa yang



M/IRAMDANI

Layar monitor berisi imbauan terkait dengan covid-19 varian omikron terpasang di salah satu gedung kawasan Semanggi, Jakarta, Senin (7/2/2022). Pemerintah meningkatkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) menjadi level 3 untuk daerah Jabodetabek, Bali, DI Yogyakarta, dan Bandung Raya, menyusul jumlah kasus covid-19 di DKI Jakarta dan sejumlah kota lainnya melebihi jumlah kasus covid-19 saat terjadi gelombang delta pada Juni-Agustus 2021 lalu.

dilakukan negara lain, termasuk India, dengan apa yang kita lakukan saat ini. Pertanyaannya, baik kita sebagai warga negara maupun pemerintah apakah sudah berupaya untuk menurunkan segera kasus covid-19 ini karena semakin lama tentu beban faskes itu akan semakin membesar. “Ini tentu membahayakan karena saat ini rumah sakit sudah kewalahan.”

Menurut Arif, wabah ini tidak mungkin diselesaikan dalam skala individu. Kita tidak bisa selamat sendiri, apalagi jika penularan seperti sekarang ini. “Orang yang sudah menaati protokol kesehatan saja bisa kena, apalagi yang abai. Jadi, memang butuh kekompakan. Kita tidak bisa mengatasi penularan selama vaksinasi belum memenuhi kriteria *herd immunity*. Ini masih panjang. Laju vaksinasi harus dipercepat.”

Arif menambahkan, masifnya tes dan lacak, langkah yang cepat dan tegas, serta konsistensi pemerintah menjadi kunci yang sangat penting dalam penanganan pandemi. Konsistensi juga menentukan perilaku warga. “Kepatuhan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari bagaimana kebijakan yang dibuat, termasuk pesan-pesan yang disampaikan, konsisten atau tidak?”

Faktanya banyak warga masyarakat yang masih abai terhadap protokol kesehatan. Arif mengatakan kita tidak bisa hanya menyalahkan mereka karena perilaku masyarakat itu juga terbentuk karena kegagalan dalam melakukan komunikasi risiko.

Tentang kasus covid-19 yang menimpa anak-anak dan upaya memberikan perlindungan kepada mereka, Arif mengingatkan,

jangan hanya melihat angka sebagai indikator kemudian menyimpulkan kasus covid-19 pada anak-anak di Indonesia rendah. “Yang pasti kita harus melindungi seoptimal mungkin anak-anak kita dari pandemi,” demikian Arif.

Wartawan senior Saur Hutabarat menambahkan, pandemi covid-19 yang berkepanjangan telah menyebabkan anak-anak kehilangan masa kecil mereka. Mereka tidak dapat bermain dan tidak dapat bersekolah. Kita kemudian meminta agar para orang tua mengikutinya secara pedagogis tentang bermain atau belajar secara virtual.

Faktanya, belajar secara daring selama 2 jam tidak cukup. Menurut Saur, banyak orang tua yang gelagapan menghadapi kenyataan itu.

Saur mengatakan sudah saatnya negara mengubah politik anggaran. “Tolonglah anggaran untuk beli senjata ditunda dulu. Fokuskan anggaran untuk menyelamatkan anak bangsa dari pandemi ini sehingga mereka dapat tervaksinasi semuanya dan dapat kembali bersekolah.”

Saur mengingatkan bahwa penyebaran covid-19 telah bergeser menjadi klaster keluarga, bahkan lebih tajam lagi, ada klaster mertua karena saudara mertua menyelenggarakan pernikahan, lalu terjadilah hal yang tidak diinginkan (terjadi penularan covid-19).

Keluarga di masa pandemi, disebut Saur, menjadi persoalan yang sangat serius. Anak-anak remaja makin sulit untuk dikekang keluar rumah setelah lebih dari setahun tidak bergaul, tidak ber-

cengkerama dengan teman-teman mereka.

Saur mengatakan sudah selayaknya kita menuju kesadaran yang mendalam bahwa mudik pada saat hari raya dipertimbangkan dengan serius, “Apakah ritual kultural itu harus kita pertahankan, kita bela-bela dengan risiko di mana-mana terjadi zona merah dan setiap hari kita bersahabat dengan kematian? Kenapa kita harus perlu mempertahankan ritual kultural yang akhirnya menelan nyawa anak bangsa?”

Saur juga mengingatkan kita jangan terlalu tercekam oleh perubahan variasi korona. Variasinya sangat mungkin bisa menjadi ribuan, tetapi kiranya dapat dimengerti bahwa vaksinasi itu tidak seefektif pada varian semula, tapi tetap bermanfaat.

Menurut Saur, kita harus berani mengoreksi pengetahuan-pengetahuan keliru soal covid-19 varian baru dan vaksin. Kita juga mesti mengoreksi pemerintah dari mana datangnya varian delta dari India. “Dari mana dia bisa lolos? Dari pintu gerbang imigrasi mana dia masuk? Anak bangsa dilarang pergi ke kampung halamannya, tetapi dari negeri sana, entah masuk lewat mana sehingga membawa varian dari India, Inggris, dan lain-lain,” katanya.

“Saya kira harus melakukan koreksi diri secara besar-besaran bahwa kita memang bangsa yang belum disiplin, termasuk pemerintah yang lebih cenderung melihat pada keluarga-keluarga yang tidak berdisiplin. Padahal sebaliknya, pintu penerbangan internasional dibuka dan menjadi lubang masuknya varian dari India,” demikian Saur Hutabarat. ■

# MI

## Kaum Muda dalam Transformasi Digital



# 1 Latar Belakang: Dibayangi Kesenjangan

---

---

**P**ANDEMI covid-19 yang melanda dunia sejak akhir 2019 mengakibatkan manusia melakukan banyak aktivitas dalam jarak jauh, termasuk belajar, bekerja, dan aneka transaksi.

Ketergantungan pada aktivitas jarak jauh itu akan bertahan dan bakal menjadi permanen bagi banyak orang. Di Asia Tenggara, misalnya, 30% pengguna digital baru bergabung selama pandemi covid-19 dan 90% di antaranya ingin untuk terus menggunakan platform digital bahkan setelah pandemi mereda.

Kerja Sama Keuangan Internasional (IFC) menunjukkan penggunaan internet di negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah tumbuh sebesar 1,3% pada fase awal pandemi, sedangkan

di negara-negara berpenghasilan menengah ke atas penggunaan internet relatif stabil. Ditemukan juga bahwa banyak negara berpenghasilan menengah, yang dipimpin Tiongkok, meningkatkan telekonsultasi sebagai akibat dari kebijakan pembatasan sosial. Aklimatisasi ke mode digital tersebut memberikan peluang sekaligus tantangan yang luar biasa.

Kaum muda memainkan peran sentral dalam mengatur munculnya solusi digital. Sektor digital membuka peluang kerja bagi sekitar 55,3 juta orang di seluruh dunia pada 2020, tidak termasuk mereka dengan pekerjaan yang dapat diakses ekonomi digital.

Munculnya platform seperti aplikasi *ride-hailing*, *telemedicine*, dan penyewaan properti liburan daring telah memunculkan beberapa harapan dalam memecahkan sejumlah kompleksitas selama berabad-abad seputar kelangkaan sumber daya dan distribusi yang tidak merata.

Sayangnya, kaum muda juga terpengaruh secara tidak proporsional oleh tantangan yang muncul dari ekonomi digital dan sering kali tidak dilibatkan dalam menetapkan standar dan kebijakan yang ada.

Pandemi covid-19 telah mengganggu kehidupan kaum muda. Penutupan sekolah dan universitas, misalnya, telah berdampak pada lebih dari 1,5 miliar anak dan remaja di seluruh dunia dan mengubah cara kaum muda hidup dan belajar. Kaum muda mengandalkan alat pengajaran dan pembelajaran digital dari sekolah yang inovatif untuk dapat secara konsisten mengakses pen-

didikan. Sayangnya, kesenjangan digital dalam konektivitas dan akses ke teknologi masih terjadi, yang menyebabkan kaum muda dari keluarga kurang mampu kehilangan pembelajaran digital dan dukungan yang memadai untuk pembelajaran di rumah.

Di sisi lain, penting untuk ditegaskan bahwa kaum muda memainkan peran penting dalam mempercepat transformasi digital karena banyak anak muda memiliki pengetahuan dan keahlian digital. Jika diberdayakan secara memadai, kaum muda dapat berkontribusi secara signifikan pada desain inisiatif tata kelola digital yang relevan, memberikan nilai pada pemberian layanan, mendorong perubahan di komunitas, dan berkontribusi pada ekosistem ekonomi digital. ■



Kaum muda harus disiapkan agar mampu menjadi generasi yang andal, penentu arah bangsa, karena di tangan merekalah negara ini diserahkan dan mereka akan berkembang dalam pusaran laju teknologi.”

**Lestari Moerdijat**  
Wakil Ketua MPR RI

## 2 Panduan Etis

---

PADA 2008, MIT (Massachusetts Institute of Technology) menerbitkan sebuah publikasi yang secara khusus berbicara mengenai *youth identity in digital media*. Publikasi tersebut mengulas secara mendalam bahwa anak muda yang lahir dan tumbuh dalam dunia digital dilingkupi pertanyaan yang kadang-kadang tidak disadari tentang bagaimana mereka melihat diri mereka dan apa perasaan mereka terhadap orang lain.

Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. saat membuka diskusi Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu, 20 April 2022, bertajuk Peran Kaum Muda dalam Transformasi Digital di Indonesia, mengatakan kondisi itu terjadi karena transformasi digital membuat kaum muda hanyut dalam arus perubahan kemudian

asyik dengan dirinya sendiri. Tanpa disadari terbentuk pola kehidupan atau budaya yang mungkin membatasi interaksi mereka dengan sekeliling dan lingkungannya.

Transformasi digital membentuk pola dan pembelajaran yang beragam. Di satu sisi, kata Lestari yang akrab disapa Rerie, banyak hal positif, tapi di sisi lain tampak dampak-dampak ikutan yang bisa dikategorikan sebagai eksek yang harus diperhatikan karena memiliki sisi-sisi negatif.

Pertanyaannya, bagaimana merespons kehadiran dunia digital? Menurut Rerie, proses transformasi dapat dimaksimalkan untuk memberikan manfaat bagi semua pihak dalam konteks kebangsaan. Itulah yang sesungguhnya memerlukan perhatian.

Kemudahan yang diberikan, kata legislator Partai NasDem itu, sebetulnya telah membuat kita mampu melakukan lompatan-lompatan yang cukup besar. Kaum muda harus disiapkan agar mampu menjadi generasi yang andal, penentu arah bangsa, karena di tangan merekalah negara ini diserahkan dan mereka akan berkembang dalam pusaran laju teknologi.

Di tengah transformasi digital, harus ada panduan etis yang menjadi sumber dan pilar kebangsaan bagi arah seluruh generasi muda. Tentu diperlukan banyak pemahaman agar generasi muda dapat menempatkan diri, meningkatkan kemampuan dan daya saing dalam konteks pengembangan dunia yang dihadapi.

Perkembangan teknologi dan dunia digital serta lompatan-lompatan yang terjadi membuat kita harus sigap menyiapkan



MIM IRFAN

Suasana anak-anak peserta kelas *coding* di *Codingcamp.id* yang berada di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Minggu (15/7/2018). Literasi komputasi bagi anak sangat dibutuhkan saat ini. Perkembangan dunia teknologi yang pesat dan cepat menuntut kemampuan adaptasi pada dunia digital pada anak sejak usia dini.

diri. Tidak hanya menyiapkan generasi muda sebagai pengguna, tetapi juga sigap menyiapkan seluruh tata kelola, termasuk melengkapi tatanan yang ada, perundangan, peraturan, kemudian aplikasinya di semua lini kebijakan.

Dalam transformasi digital di Indonesia tidak bisa dikesampingkan bahwa Telkomsel merupakan pionir. Komisaris Telkom-

sel, Yose Rizal, dalam diskusi tersebut mengatakan, biasanya, di saat menjadi *market leader*, sebuah perusahaan akan susah bertransformasi. Namun, Telkomsel justru membuktikan sebaliknya.

Transformasi digital Telkomsel dimulai pada 1995 dengan beroperasinya kartu Halo, kemudian berinovasi dengan layanan Simpati. Pada 2003, Telkomsel mengenalkan layanan *roaming* pertama di Indonesia lalu menghadirkan jaringan 3G.

Telkomsel terus berkembang dan pada 2018 melakukan *experience* 5G pertama di Indonesia pada Asian Games, lalu meluncurkan 5G untuk industri dan *video call*, kemudian melakukan penguatan ekosistem digital yang inklusif dan melahirkan perusahaan digital baru bernama Indihome.

“Semangat inilah yang selalu kita tanamkan di Telkomsel bahwa kami adalah yang pertama di industri. Kami sadar bahwa ketika berbicara industri sekarang bukan hanya Telkom lagi, melainkan juga digital sehingga sekarang kami membawa semangat inovasi itu dari Telkom menjadi Digital Telco,” kata Jose Rizal.

Pandemi covid-19 sebenarnya yang mempercepat disrupsi. Pandemi memaksa semua pihak melakukan inovasi. Selama pandemi orang cenderung lebih sering memasak di rumah, belajar *remote*, *nonton video entertainment* lewat *video content*, *chatting*, *social media* meningkat, membaca berita lewat *online*, *nonton* pertunjukan *online*, melakukan hobi *gardening*, *online shopping*, dll. Itu semua ialah perubahan perilaku yang sangat cepat terjadi selama pandemi.

Salah satu contoh, di industri *online shopping*, data menunjukkan 30% konsumen jauh lebih sering melakukan *online shopping*. Data Telkomsel mengenai aplikasi Zoom, misalnya, *subscriber* selama pandemi naik sampai 6.800%, data *consumption* naik 33.500%. Jadi, data Telkomsel menunjukkan perilaku konsumsi digital semakin tinggi di Indonesia dipacu pandemi.

Banyak orang berpikir bahwa transformasi digital ialah soal teknologi semata. Padahal, sebetulnya yang paling penting ialah mengubah orangnya terlebih dahulu barulah mengubah proses dan teknologinya. Jadi, di Telkomsel, tambah Jose Rizal, menginvestasi pada manusia karena yakin tanpa mentransformasi manusia, teknologinya akan percuma.

Menurut Jose Rizal, yang paling sulit ialah mengubah *mindset*. Apalagi Telkomsel merupakan *market leader* yang tentunya sangat natural bahwa karyawan merasa berada pada posisi aman dan nyaman. *Mindset* itu yang harus dari awal dibongkar. Kalau mau tetap ada dalam satu dekade, dua dekade, atau 100 tahun ke depan, Telkomsel harus berubah, bertransformasi tidak hanya sebagai perusahaan telekomunikasi, tetapi juga menjadi perusahaan digital telekomunikasi.

Jose Rizal juga mengatakan 70% karyawan Telkomsel ialah milenial yang merupakan *digital native*. Saat ini banyak aplikasi yang digunakan berasal dari luar negeri. Karena itu, salah satu peluang bagi milenial ialah membuat aplikasi-aplikasi dari Indonesia. ■



Semua itu bisa terjadi karena perubahan *mindset*. Digital seharusnya memudahkan, tetapi kelihatannya usaha mikro/ultramikro belum masuk gerbong digital sehingga perlu dibantu.”

**Debbie R Tampubolon**  
Founder INAmikro

## 3 Tidak Mudah Diubah

**D**EBBIE R Tampubolon, Founder INAmikro, membenarkan bahwa tidak mudah mengubah sesuatu yang tradisional menjadi digital. Sering kali pembicaraan mengenai digital hanya ditekankan menyangkut teknologi, tapi sebenarnya yang lebih sulit dilakukan transformasi ialah manusia.

INAmikro, kata Debbie, bekerja sama dengan Sahabat Lestari di Demak, Jepara, dan Kudus, Jawa Tengah, melakukan pemberdayaan, yaitu mengubah *mindset* sehingga kaum mikro/ultramikro bisa melakukan bisnis lewat digital karena digital menjadi kunci.

Di Indonesia, pelaku usaha mikro/ultramikro berjumlah 63,5 juta orang. Jika mereka itu mempunyai suami atau istri dengan

dua anak, akan memengaruhi sekitar 250 juta penduduk Indonesia yang berpenghasilan rendah.

Lalu kenapa pelaku usaha mikro/ultramikro masih sulit bangkit? Itu lingkaran setan. Berbeda dengan UMKM yang sudah bisa mandiri, sektor mikro/ultramikro tidak mandiri dan akses mereka ke modal untuk pinjaman perbankan sangat terbatas. Mereka harus diberi jalan untuk bisa meminjam ke bank dengan bunga 18%-21% per tahun. Kalau pinjam di P2P (*peer to peer*) lending mencapai 30% per bulan, pinjam ke pinjol (pinjaman *online*) lebih tinggi lagi, pinjam ke tengkulak 10%-20% per hari. Itu hal yang mengerikan.

Para pelaku usaha mikro/ultramikro juga rendah akses ke pasar yang lebih besar. Jadi, jangan membayangkan orang-orang itu bisa dengan mudah, misalnya, berhubungan ke *Grab* atau ke *Gojek*. Mereka tidak mengerti bahkan menggunakan jasa makelar untuk bisa terhubung dengan membayar Rp2 juta. Itu pun sering tidak terhubung juga.

Lalu untuk mengurus izin usaha yang begitu mudah menurut kita, ternyata tidak untuk mereka. Ada fobia digital (*digital phobic*) atau *digital trauma*. Itu disebabkan cara menggunakan platform bisnis tidak semudah menikmati platform media sosial seperti *Instagram*, *Facebook*, *Youtube*, dan *Whatsapp*.

Pandemi covid-19 membuat situasi semakin parah untuk usaha mikro/ultramikro. Karena itu, usaha mikro/ultramikro harus melakukan transformasi digital. Debbie ingin berkola-

borasi dengan Telkomsel/Telkom untuk memudahkan usaha mikro/ultramikro. Kalau usaha mikro/ultramikro mengalami transformasi digital, mereka bisa mengurus perizinan usaha secara digital, menjadi *bankable*, tahu menggunakan *payment system*, bisa menikmati *financial inclusion*, bisa melakukan pembukuan sederhana, bisa jualan secara *online*, bisa menambah *networking*, dan meningkatkan *skill*, mereka bisa mendiversifikasi usaha.

Semua itu bisa terjadi karena perubahan *mindset*. Digital seharusnya memudahkan, tetapi kelihatannya usaha mikro/ultramikro belum masuk gerbong digital sehingga perlu dibantu.

Namun, dalam membantu mengajar usaha mikro/ultramikro agar lebih melek digital, banyak izin mesti dilalui. Menurut Debbie, INAmikro sudah menandatangani MoU dengan Pemprov DKI Jakarta lewat Kadin DKI. Namun, di setiap pasar harus minta izin lagi. Sesudah itu minta izin juga ke paguyuban. Jadi, benar-benar membutuhkan interpersonal *skill* karena bukan soal digital, melainkan *relationship*.

Jadi, untuk transformasi digital yang akan memengaruhi 63,5 juta usaha mikro/ultramikro yang berdampak kepada 250 juta orang lagi, mereka harus berkolaborasi dengan banyak pihak. Yang paling sulit dalam kolaborasi itu ialah semua harus pakai izin, izin, dan izin. Ternyata di Indonesia, tidak mudah untuk menolong orang. Padahal, kata Debbie, INAmikro melayani usaha mikro/ultramikro seperti *consulting firm pro bono*. ■



Tantangan terbesar kaum muda ialah kesenjangan digital dan konektivitas yang tidak memadai. Bahkan salah satu survei menyebutkan sekitar 61% dari seluruh pemuda di G-20 memiliki problem dengan konektivitas.”

**Marcel Satria**

Y-20 Indonesia 2022 Delegate Indonesia

## 4 Paling Menarik di Dunia

---

---

**E**KONOMI digital di Indonesia ialah salah satu ekonomi yang paling menarik di dunia. Kita memiliki ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, atau sekitar 40% dari total estimasinya. Sebenarnya nilainya sudah sekitar US\$70 miliar pada 2021 dan akan berlipat ganda sampai US\$146 miliar pada 2025.

Marcel Satria dari Y-20 Indonesia 2022 Delegate Indonesia mengungkapkan dalam diskusi tersebut bahwa kontribusi ekonomi digital kepada PDB atau GDP Indonesia itu lumayan besar. Pada 2020 diperkirakan sekitar 4% dari PDB Indonesia bersumber dari ekonomi digital. Dengan mengutip Menteri BUMN Erick Tohir, Marcel mengatakan pertumbuhan ekonomi digital



MI/BRYANBODO HENDRO

Pelajar kelas XI MAN 1 Donggala belajar jarak jauh menggunakan gawai mereka di salah satu spot sinyal internet yang berada di gubuk Desa Tanampulu, Banawa Selatan, Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng), Selasa (27/7/2021). Desa Tanampulu merupakan salah satu desa terisolasi dari jaringan telekomunikasi yang berada sekitar 65 km dari ibu kota Sulteng, Palu. Terbatasnya infrastruktur yang menyebabkan kesenjangan konektivitas di beberapa daerah menyulitkan kaum muda di daerah tersebut untuk melek teknologi dan bersaing di masa depan.

Indonesia jauh lebih besar daripada pertumbuhan PDB. Ekonomi digital tumbuh sampai 8 kali, sedangkan PDB tumbuh 1,5 kali pada 2030. Karena itu, ekonomi digital Indonesia akan berkontribusi 19%-20% kepada PDB Indonesia.

Dengan begitu, penting sekali sejak sekarang mengawasi ekonomi digital karena itu ialah sektor penting yang harus dikembangkan terus oleh dan untuk kaum muda Indonesia.

Saat merujuk pada sensus penduduk 2020, secara demografis, jumlah kaum muda di Indonesia cukup besar, sekitar 65% dari penduduk Indonesia. Dari jumlah itu, yang terbesar ialah gen Z yang mencapai 28% dari seluruh penduduk Indonesia.

Dalam konteks ekonomi digital, menurut survei World Bank, kaum gen Z itu menggunakan internet selama kira-kira 9-10 jam sehari rata-rata bagi yang berusia 16-25 tahun. Dengan demikian, pasar ekonomi digital di Indonesia lumayan besar.

Namun, jika dilihat dari sisi penyediaan jasa, sebenarnya keahlian digital para pekerja Indonesia masih sangat kurang. Sebenarnya hanya 1% dari pekerja Indonesia mempunyai keahlian digital yang *considered advance*.

Jadi, walaupun kita memiliki potensi yang besar di ekonomi digital, komposisinya sangat konsumtif dan kurang produktif. Itu menjadi keprihatinan karena kita ingin kaum muda bisa berpartisipasi dengan lebih bermakna dalam ekonomi yang akan berkontribusi banyak pada PDB Indonesia.

Sekarang ini hampir mustahil menjalani hidup tanpa digital.

Misalnya volume transaksi atau nilai transaksi pembayaran di Indonesia. Menurut data Bank Indonesia, volume transaksi *digital payment* dan uang elektronik sudah jauh melebihi volume transaksi kartu kredit. Itu terjadi sejak 2019, dan sekarang pada 2020-2021 sudah semakin tinggi.

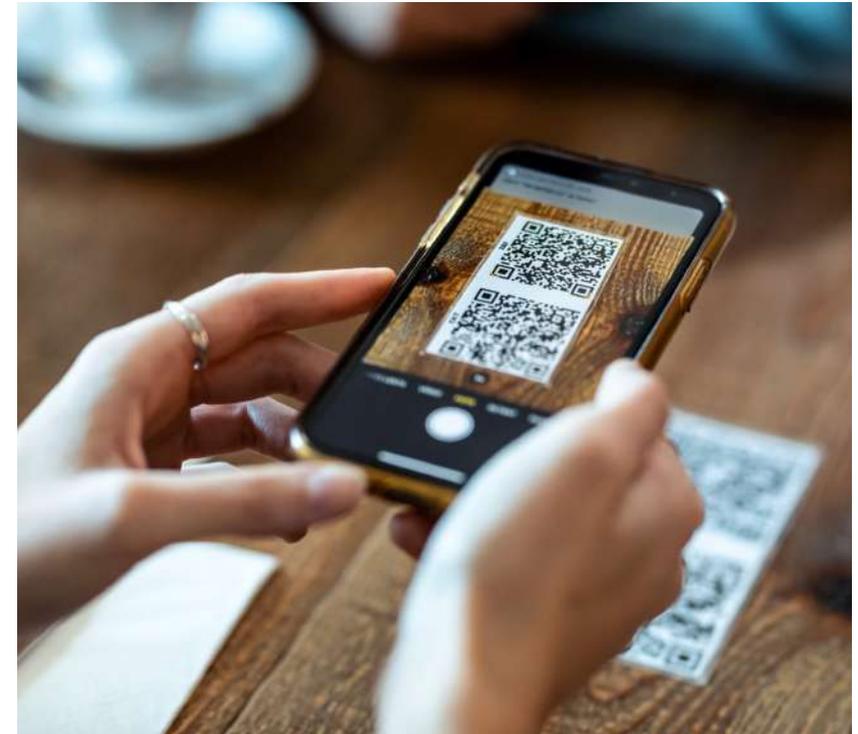
Itu menunjukkan bahwa selama periode tersebut, kita telah mencoba mengembangkan sistem pembayaran yang modern, yaitu sistem dengan kartu. Jadi, potensi yang besar sebenarnya ada di dalam *digital payment* atau uang elektronik karena membantu memenerasi seluruh masyarakat Indonesia di semua sisi.

Nilai transaksi *debit card* masih jauh lebih tinggi, tetapi kelak diyakini uang elektronik dan *digital payment* yang lain akan terus meningkat dan membantu inklusi keuangan di Indonesia. Inovasi itu penting untuk membuat teknologi yang baru supaya bisa menjangkau semua masyarakat dan pemuda Indonesia.

Transformasi digital juga mempunyai peran yang sangat penting saat menangani pandemi covid-19. Jika tidak ada transformasi digital, sulit untuk bisa melacak penyebaran covid-19. Karena itu, ada *Pedulilindungi* yang dilakukan pemerintah serta ada juga penyedia jasa kedokteran jarak jauh.

Inovasi untuk transformasi digital, kata Marcel Satria, ialah hasil semangat para pengusaha. Bukan obligasi para pembuat kebijakan. Jadi, apa peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan?

Peran pemerintah ialah membantu memberdayakan para tokoh dan pelaku usaha untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi



Seorang pengunjung sedang melakukan pembayaran nontunai di kasir sebuah restoran. Menurut data Bank Indonesia, volume transaksi *digital payment* dan uang elektronik sudah jauh melebihi volume transaksi kartu kredit.

digital dengan menyediakan infrastruktur dasar, baik fisik seperti konektivitas maupun regulasi dan kepastian hukum, serta melancarkan perizinan dan segalanya. Jadi, peran pemerintah ialah membangun lingkungan untuk mendapatkan kepercayaan, keamanan, dan kepastian hukum.

Keperluan menyediakan infrastruktur fisik ataupun kepastian

hukum dan regulasi semakin mendesak. Itu disebabkan pertumbuhan ekonomi digital begitu cepat. Karena itu, hal tersebut menjadi area prioritas di Y-20 maupun di G-20.

Lalu apa sebenarnya tantangan kaum muda dalam transformasi digital? Menurut Marcel, tantangan terbesar ialah kesenjangan digital dan konektivitas yang tidak memadai. Bahkan salah satu survei menyebutkan sekitar 61% dari seluruh pemuda di G-20 memiliki problem dengan konektivitas.

Kedua ialah kepercayaan, keamanan, dan perlindungan data pribadi. Ketiga ialah literasi digital dan partisipasi pekerja dalam ekonomi digital. Kekurangan literasi digital perlu segera diatasi agar bisa membantu para pemuda serta penduduk Indonesia untuk masuk ke gerbang digitalisasi dan benar-benar berpartisipasi di ekonomi digital yang bertumbuh begitu besar.

Menurut World Bank, ada ketidaksetaraan dalam akses atau konektivitas sesuai dengan kemampuan ekonomi penduduk Indonesia. Sayang sekali kalau gara-gara infrastruktur fisik itu para pemuda tidak bisa berpartisipasi dalam ekonomi digital.

Mengenai kepercayaan dan keamanan, harus ada penegakan hukum yang lebih proaktif. Banyak kasus penipuan dan itu merusak kepercayaan kepada apa pun yang namanya digital dan mengakibatkan *digital trauma*.

Pemuda menjadi agen perubahan dalam konteks transformasi digital. Itu tidak hanya mengenai digital atau transformasinya, tapi harus juga berdampak secara nyata.

Menurut Juan Kanggrawan, Head of Data Analytical and Digital Products, Jakarta Smart City, seharusnya kaum muda tidak hanya paling paham mengenai teknologi terbaru, tapi juga bisa menggunakan dan mengkaji bagaimana teknologi itu bisa berdampak terhadap organisasi dan ekosistem. Jadi, tidak semua teknologi terbaru pasti bisa langsung digunakan, tapi perlu ada proses *alignment* (penyelarasan), ada proses *assessment* sampai menjadi strategis prioritas.

Yang perlu ditekankan ialah bagaimana agar bisa terbiasa menerima *mindset* yang berbeda, berkolaborasi dengan berbagai macam bidang, kemudian bisa membuat suatu keputusan digital produk dan kebijakan yang lebih matang. ■



Saat ini pengaruh perubahan iklim semakin dirasakan meski pembahasan soal iklim agak dikesampingkan karena adanya pandemi covid-19.”

**Ilham Habibie**

Ketua Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional

## 5 Industri Iklim

---

---

**K**ETUA Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantiknas) Dr. Ing. H. Ilham Habibie, Dipl.Ing. mengatakan pemuda dan pelaku usaha baik UMKM maupun terutama bisnis mikro harus terus-menerus diberi literasi transformasi digital. Itu menjadi sangat penting karena jika tidak dilakukan, kesenjangan digital itu semakin melebar.

Literasi digital memerlukan pemikiran kritis dan bekerja secara kritis. Jadi, tidak semua hal yang dilihat langsung dipercaya dan disebarluaskan. Sifat kritis itu diperlukan untuk juga mencegah penyebaran hoaks yang sering bisa menjadi masalah dalam keseharian.

Menurut Ilham Habibie dalam Forum Diskusi Denpasar 12 itu, dengan atau tanpa adanya ekonomi digital, Indonesia sudah terlalu konsumtif. Kalau produk yang *made in Indonesia* dikembangkan, diinovasikan di Indonesia, jika dibandingkan dengan besarnya ekonomi kita, itu masih kecil karena orientasi kita masih buatan luar.

Lalu di mana masa depan Indonesia? Menurut Ilham Habibie, salah satu yang patut dipikirkan ialah soal iklim dunia. Saat ini pengaruh perubahan iklim semakin dirasakan meski pembahasan soal iklim agak dikesampingkan karena adanya pandemi covid-19. Namun, antara covid-19 dan iklim, kata Ilham Habibie, ada kemiripan. Covid-19 mempunyai semboyan tidak ada yang aman di dunia ini sampai dengan semua itu aman. Bagaimana dengan iklim? Kalau tidak bisa menangani iklim secara menyeluruh, seluruh dunia akan kena getahnya.

Indonesia disebut sebagai paru-paru dunia bersama dua wilayah lain, yakni Amazon (Brasil) dan Kongo. Hutan di tiga wilayah itu bisa menyerap karbon dioksida dalam jumlah besar. Itu harus diartikan bahwa tidak saja Indonesia wajib melindungi hutannya demi menjaga iklim dunia, tetapi juga Indonesia bisa menjadi industri iklim.

Semua narasumber dalam diskusi menyebutkan pemuda berkontribusi pada *grand design* transformasi digital Indonesia atau di Indonesia. Lebih spesifik bagaimana model bisnis transformasi digital Indonesia? Bagaimana pula model bisnis transfor-

masi digital di Indonesia?

Menurut Avanti Fontana, Ph.D., Founder CIS School of Innovation dan Planet Inovasi Foundation, transformasi digital tidak hanya pada teknologi *per se*, tetapi juga merujuk pada pola pikir, kebudayaan, kepemimpinan, strategi, hingga proses yang terkait dengan inovasi. Poin penting ialah bagaimana meningkatkan kapasitas pemuda dalam berinovasi di era transformasi digital. Saat ini lingkungan membuat kita mau tidak mau harus bertransformasi.

Pertanyaannya, seberapa besar kesiapan kita dalam transformasi? Peran pemuda tidak saja sebagai pengguna yang memanfaatkan, atau konsumen, tetapi juga meningkatkan peran pemuda sebagai produser, sebagai inovator dalam era transformasi digital.

Peluang berinovasi di era transformasi digital menjadi semakin besar, semakin terakselerasi. Kalau transformasi digital dilihat sebagai proses yang sistematis ada *input*, ada *output*, dan ada *outcome*, tentu kita mesti memastikan kesiapan di hulu. Namun, proses tetap berjalan tanpa menunggu kesiapan di hulu. Jadi, diskusi Forum Diskusi Denpasar 12 ini memanggil kita semua, terutama pemuda, agar cepat menyiapkan diri untuk berperilaku produktif.

Dalam konteks inovasi dan kewirausahaan pada transformasi digital, kata Avanti Fontana, pemuda sebagai produser, inovator, dan *entrepreneur* pada saat yang sama juga menjadi pengguna atau pemakai. Dalam konteks sebagai inovator dalam transfor-



123RF

Pemandangan hutan tropis liar di Kalimantan Timur. Indonesia disebut sebagai paru-paru dunia bersama dua wilayah lain, yakni Amazon (Brasil) dan Kongo. Hutan di tiga wilayah itu bisa menyerap karbon dioksida dalam jumlah besar. Itu harus diartikan bahwa tidak saja Indonesia wajib melindungi hutannya demi menjaga iklim dunia, tetapi juga Indonesia bisa menjadi industri iklim.

masi digital, tidak saja melayani sesama kaum muda, tetapi juga seluruh masyarakat, tidak hanya Indonesia, tapi bahkan juga global.

Peningkatan kapasitas tersebut memungkinkan terjadinya proses inovasi yang diakselerasi dengan adanya transformasi digital. Karena itu, penting membuat *grand design* transformasi digital di Indonesia dan model bisnis transformasi digital di Indonesia khusus melibatkan peran pemuda. Artinya perlu ada ekosistem kepemudaan dalam transformasi digital. ■



Negara harus mempercepat penanganan ruang-ruang yang belum terdigitalisasi agar segera dapat berubah. Sementara itu, terhadap sebagian rakyat yang tidak mampu membeli gadget atau tidak mampu membayar *wi-fi*, perlu campur tangan subsidi.”

**Saur Hutabarat**  
Wartawan Senior

## 6 Menularkan Kelincahan

INDONESIA ialah republik kaum muda. Itu kata indonesianis, Benedict Anderson. Anak-anak mudalah yang dari masa ke masa terus mendorong perubahan-perubahan mendasar dalam sistem kehidupan bermasyarakat Indonesia.

Begitu juga transformasi digital yang sudah menjadi realitas hidup yang melintasi semua sektor tentu tidak akan terlepas dari kaum muda. Namun, transformasi digital itu, menurut Jakfar Sidiq, pegiat budaya/Wakil Sekjen DPP Partai NasDem, melahirkan dampak positif dan negatif.

Jakfar memberi sejumlah contoh. Beberapa waktu lalu di media sosial viral pernyataan seorang anak muda, koordinator BEM seluruh Indonesia, yang menyebutkan zaman Orba lebih trans-

paran, lebih sejahtera, dan lain-lain. Dia kemudian di-bully. Bully itu menjadi karakter era digital.

Selain itu, publik menyaksikan di televisi atau membaca bahwa beberapa orang muda yang kaya raya tiba-tiba ditangkap karena penipuan digital. Itu dampak negatif era digital.

Transformasi digital mempermudah seluruh urusan kehidupan manusia. Menurut Jakfar, ada dua level transformasi digital. Pertama transformasi paradigmatik, atau *mindset*, dan kedua transformasi *skill* atau keterampilan.

Secara paradigmatik mengubah tiga hal. Pertama mengubah cara orang berpolitik, kedua mengubah habitat ekonomi, dan ketiga mengubah secara budaya.

Dalam hal politik umpamanya, dulu dikenal manusia sebagai *zoon politicon* (makhluk sosial) yang kemudian menjadi *homo economicus*. Setelah adanya digital, muncul kesadaran bahwa dunia digital juga sangat berdampak pada proses *election*, proses pengambil kebijakan dalam politik. Karena itu, politik pun menjadi lebih demokratis. Melalui aplikasi-aplikasi digital, langsung terjadi perdebatan-perdebatan ide, perdebatan-perdebatan kebijakan, dan perdebatan-perdebatan usul tentang apa yang berdampak pada masyarakat luas.

Apa yang dirapatkan di DPR dan apa yang disampaikan pemerintah langsung mendapatkan respons dari masyarakat secara luas. Di situlah terjadi pergolakan ide antara orang per orang dan antara kelompok per kelompok yang kemudian melahirkan antitesis.

Secara ekonomi, akhir-akhir ini terjadi kolaborasi, bukan hanya kompetisi. Pergeseran dari kompetisi menjadi kolaborasi ialah sangat penting dalam hal ekonomi.

Sebelum ini produksi UMKM menghadapi masalah terkait dengan pemasaran. Namun, setelah transformasi digital, pemasaran menjadi lebih mudah, dengan segala kekurangannya. Orang terkoneksi secara ekonomi. Orang dari Jepara, Jawa Tengah, umpamanya, bisa mengirimkan barang hari ini dan besok sudah sampai di Sabang, Aceh. Secara ekonomi, itu membuat orang berkreasi melakukan inovasi dan segala macamnya.

Secara budaya, tambah Jakfar, era digital telah melahirkan gaya hidup yang berbeda. Anak-anak muda atau eksekutif muda sekarang tidak lagi terpatok pada gaya berpakaian, misalnya, pakai sepatu kulit. Namun, mereka bisa pakai sepatu *sneaker* di acara-acara formal yang mungkin pada 1980-an atau 1990-an dianggap seperti mau berolahraga, atau lari pagi.

Perubahan budaya lainnya dalam kosakata yang dilahirkan generasi baru. Tiga tahun lalu mungkin terdengar sapaan '*guys*' yang sebelumnya tidak terpikirkan, hari ini terdengar sapaan '*bestie*'. Budaya apa yang lahir? Budaya egaliter, budaya inklusif. Orang tidak lagi dipandang atau dihormati karena sekadar umur, tapi juga berdasarkan pengetahuan dan lainnya.

Di era transformasi digital ini, pola mengasuh anak pun berubah. Beberapa puluh tahun lalu, mungkin orang tua mengandalkan TV. Meletakkan anak di depan TV untuk menonton lalu mere-

ka melakukan aktivitas. Namun, hari ini orang tua memberikan telepon seluler (ponsel/*handphone*) untuk membuat anak mereka tenang. Artinya transformasi digital melintasi semua, meng-*upgrade* semua, dan mengubah semua pola hidup dan kehidupan.

Wartawan senior Saur Hutabarat dalam *closing statement* diskusi tersebut mengatakan negara harus mempercepat penanganan ruang-ruang yang belum terdigitalisasi agar segera dapat berubah. Sementara itu, terhadap sebagian rakyat yang tidak mampu membeli gadget atau tidak mampu membayar *wi-fi*, perlu campur tangan subsidi.

Subsidi, kata Saur, memang bukan kata yang indah. Namun, terlalu banyak masyarakat yang tidak mampu di tengah perubahan ini karena terbentur oleh daya beli. Mungkin BUMN seperti Telkomsel harus mengurangi keuntungan mereka untuk APBN, dengan mengembalikan untuk rakyat yang tidak mampu agar dapat mengikuti perkembangan digital karena saat ini orang tua harus berbagi satu ponsel dengan anak mereka yang sekolah, sementara anak mereka bukan cuma dua, melainkan tiga bahkan empat.

Di level masyarakat, kata Saur, pemuda tidak bisa diharapkan menjadi agen perubahan. Pemuda sebagai produsen dan konsumen, tapi sebagian terbesar pemuda sebagai katalisator, yakni orang yang membantu perubahan, tapi tidak turut di dalam perubahan itu karena sudah berubah lebih dulu. Kalau orang diminta berubah terhadap teknologi, dan mereka dikelilingi orang-orang

muda yang bertindak sebagai katalisator, itu akan mempermudah.

“Orang segenerasi saya, atau contohnya saya, banyak diuntungkan oleh pergaulan dengan orang-orang muda yang menjadi katalisator sehingga saya dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan itu. Saya tidak khawatir akan masa depan karena anak SD kelas 3 dalam masa pandemi mampu berubah dan mengadaptasi perubahan dengan senang hati,” kata Saur.

Dulu tertawa sendiri itu mungkin dianggap sebuah keanehan, tetapi sekarang anak-anak, atau cucu-cucu, bisa tertawa sendiri dengan gadget mereka karena mereka menonton animasi yang lucu yang mungkin tidak dimengerti orang tua mereka.

Substansi yang paling pokok ialah dalam kata *agility*, yaitu ketangkasan, kelincahan berubah dengan sangat cepat tanpa kehilangan keseimbangan. Pertanyaannya ialah bisakah kita mencapai *critical mass* sehingga lebih banyak lagi anak bangsa ini yang memiliki *agility*? Kuncinya ialah perubahan *mindset*. Jadi, kalau tanpa ketangkasan, tanpa kelincahan, ya, jatuh, kita akan tertinggal.

Pertanyaan besarnya ialah bagaimana di rumah, di ruang publik, di sekolah dengan berbagai ekspresi bisa diajarkan dan ditularkan kapasitas *agility*? ■



# VII

**Mengidentifikasi  
Nilai-Nilai  
Kebangkitan Nasional**

# 1 Latar Belakang: Proses Identifikasi

---

---

**N**ILAI budaya suatu bangsa sering dipandang sebagai faktor yang sangat penting yang dapat memengaruhi perkembangan ekonomi, perilaku masyarakat, dan bahkan kebijakan negara.

Pertanyaannya ialah nilai budaya macam apakah yang kita miliki? Untuk menjawab pertanyaan itu, lembaga Nenilai melakukan proses identifikasi dengan cara menyelenggarakan survei pada 2020 yang diikuti lebih dari 50 ribu responden dari 34 provinsi di Tanah Air. Gerakan Nenilai melakukan survei itu antara lain digagas bersama oleh Bappenas RI, Indika Energy, Dayalima, Pantarei, dan Stoik Trisula.

Sementara itu, Focus Group Discussion (FGD) bersama dengan MPR berupaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, baik skala lokal maupun global, mengenai pentingnya mewujudkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat untuk memajukan kualitas kehidupan dan memelihara kemanusiaan. FGD kali ini diselenggarakan dengan mengusung topik mengenai *values in society*, atau nilai-nilai dalam masyarakat. ■



Kita perlu duduk bersama dan memikirkan berubahnya pola tindak tanduk sosial yang membahayakan keutuhan kita sebagai sebuah bangsa.”

**Lestari Moerdijat**  
Wakil Ketua MPR RI

## 2 Mengukuhkan Kembali Nilai-Nilai Keindonesiaan

**K**ETIKA kita berbicara mengenai nilai-nilai yang baik untuk Indonesia, sesungguhnya itu menggugah kembali ingatan kita pada hal-hal mendasar ketika Indonesia dibentuk. Pikiran-pikiran besar dari para bapak bangsa bahwa kita ialah suatu bangsa pertama kali disampaikan pada Hari Sumpah Pemuda 1928 dan pikiran-pikiran besar itu dikaitkan dengan kebangkitan nasional.

Pandangan yang sarat dengan nilai dan semangat kebangsaan itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. saat membuka FGD bertema ‘Nilai-Nilai Baik untuk Indonesia Bangkit: Sebuah Renungan Kebangkitan Nasional’ yang diselenggarakan Forum Diskusi Denpasar (FDD) 12 yang bekerja

sama dengan MPR RI di Jakarta, Rabu, 18 Mei 2022.

Menurut politikus NasDem yang akrab disapa Rerie itu, FDD kali ini merupakan momentum bagi kita untuk berkumpul dan bersama-sama memikirkan apa sesungguhnya yang harus kita lakukan, apa yang harus kita alami, dan apa yang harus kita ingat kembali. “Terutama, apa yang harus kita aplikasikan terhadap nilai-nilai yang kita miliki,” jelas Rerie.

Ia berharap diskusi kali ini dapat memberikan catatan-catatan penting karena kita tidak boleh melupakan sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Pasalnya, ada beberapa peristiwa besar yang berakibat langsung terhadap lunturnya nilai-nilai kebangsaan yang kita miliki selama ini.

Belum lama ini, katanya, masih segar dalam ingatan kita bagaimana harus berhadapan dengan kenyataan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebersamaan dan keberagaman kita sebagai bangsa, yakni terjadinya polarisasi di masyarakat yang berpotensi memecah belah persatuan dan keutuhan masyarakat Indonesia.

“Untuk itu, kita perlu duduk bersama dan memikirkan berubahnya pola tindak tanduk sosial yang membahayakan keutuhan kita sebagai sebuah bangsa,” ucap Rerie.

Menurutnya, pertimbangan-pertimbangan itulah yang menjadi dasar pemikiran kenapa diskusi kali ini kita adakan dan kenapa FDD 12 melihat bahwa sangatlah penting bagi kita semua untuk merumuskan dan melihat kembali nilai-nilai keindonesiaan yang kita miliki.

Rerie menilai tantangan yang kita hadapi saat ini sangat nyata, bukan hanya infiltrasi ideologi, melainkan jugaberubahnya nilai-nilai karena perubahan zaman. Lompatan-lompatan teknologi menghasilkan perilaku dan perubahan budaya yang tidak bisa kita hindarkan dan berdampak pada kehidupan sehari-hari.

“Marilah kita gunakan momentum kebangkitan nasional kali ini untuk kembali memupuk kesadaran sebagai satu bangsa, menggali kembali nilai-nilai keindonesiaan, dan tentunya bersama-sama meneguhkan niat dan tekad untuk membangun Indonesia tercinta, Indonesia maju, dan Indonesia emas,” tegasnya. ■



Pancasila secara ringkas kita sebut sebagai *the grand ideology of social inclusion* yang bisa menjamin kebahagiaan atau *wellbeing*, baik pada tingkat individu maupun sebagai entitas bangsa.”

**Yudi Latif**

Mantan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

## 3 Mulai dengan Membangun Nilai

**M**ANTAN Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sekaligus pakar dari Aliansi Kebangsaan Yudi Latif, M.A., Ph.D. mengungkapkan jauh sebelum pandemi covid-19, Indonesia memimpikan kebangkitan baru. Meskipun banyak capaian setelah 114 tahun Indonesia bangkit, tingkat kecepatan kemajuan kita bila dibandingkan dengan negara-negara yang sezaman merdekanya agak mengalami perlambatan.

Sebagai contoh, kemerdekaan kita dengan Korea Selatan (Korsel) terpaut dua hari. Korsel merdeka 15 Agustus, kita 17 Agustus 1945. Ketika merdeka, GNP kita jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Korsel, tapi dalam hal kecepatan pertumbuhan kita jauh tertinggal. Korsel kini sudah masuk kelompok negara maju,

sedangkan kita masih seperti ini.

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) baru merdeka pada 1949 dan India 1948, tapi kita tahu sekarang mereka sudah naik elevasi sampai pada tingkat *superpower*, *global superpower*.

Sebelum pandemi covid-19, jelasnya, posisi Indonesia sudah masuk *upper middle income*, tapi begitu covid-19 melanda, kita jatuh dan berada di posisi *lower middle income*. “Jadi, ada banyak alasan yang membuat kita memang harus bangkit. Pertanyaannya, dari mana kebangkitan itu dimulai?”

Kalau kita belajar dari sejarah, kata Yudi Latif, kita akan menangkap dari mana kebangkitan itu harus dimulai. Sejarah mencatat kebangkitan dimulai dari kebangkitan nilai. Kebangkitan harus dimulai dari kebangkitan usaha untuk pembangunan nilai dan pembangunan mutu manusia.

Untuk mudahnya, kita sebut saja sebagai pembangunan *well-being*. Untuk itu, kita perlu memastikan apa saja yang menjadi fondasi dari kebangkitan nasional, terutama yang berkaitan dengan pembangunan nilai, pembangunan mutu manusia, pembangunan *wellbeing*. “Itulah sebabnya kita menyebutnya dengan istilah budi pekerti,” jelasnya.

Budi pekerti dalam arti sesungguhnya seperti dijelaskan Ki Hajar Dewantoro, budi adalah budaya, pikiran, perasaan, kemauan, cipta, rasa, dan karsa. “Jadi, budi pekerti adalah perpaduan antara pikiran, perasaan, kemauan yang bertaut dengan kecakapan dan daya juang yang memungkinkan kita bisa menjadi manusia yang



Anak-anak melintas di depan mural Garuda Pancasila yang bertemakan kebinekaan dan persatuan bangsa di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (5/5/2022). Mural tersebut dibuat sebagai sarana media edukasi dan pengingat untuk masyarakat luas agar menjaga toleransi dan persatuan bangsa.

mengerti apa yang baik, benar, dan indah,” urai Yudi dalam diskusi yang dipandu Dharmaji Suradika, CEO Pemimpin.id.

Oleh karena itu, pergerakan-pergerakan yang menjadi fundamen kebangkitan nasional hampir semua terjadi pada momen 1908. Selain organisasi Budi Utomo, masih banyak perkumpulan sejenis dengan berbagai nama, tapi esensinya sama. “Jadi, gerakan semasa itu dengan nama-nama yang berbeda, tapi esensinya sama mengingatkan kita bahwa kalau ingin bangkit, kita harus mulai dari membangun nilai, membangun kualitas manusia, membangun *wellbeing*,” jelasnya lagi.

Sekarang pertanyaannya, bagaimana dan dari mana kita harus memulai pembangunan nilai, pembangunan mutu manusia, pembangunan *wellbeing* di Indonesia? Kita harus berangkat dari kenyataan-kenyataan Indonesia sendiri bahwa kita tidak mungkin bisa maju tanpa berjejak pada kenyataan-kenyataan yang ada.

Kalau ingin melihat kenyataan Indonesia, menurut Yudi, yang harus segera terbayang apa yang pernah dikatakan Bung Hatta bahwa Indonesia begitu luas wilayahnya dan begitu banyak dan majemuk penduduknya. Oleh karena itu, siapa pun yang ingin mengurus Indonesia, ingin memimpin Indonesia, dan ingin membangun Indonesia harus memiliki keluasan mental seolah-olah seluas Indonesia dan memiliki kekayaan rohani sebanyak dan semajemuk penduduk Indonesia. “Indonesia yang majemuk dari berbagai sisi, agama, ras, etnik, partai politik.”

Kemudian dari stratifikasi sosial, kita sekarang mendapatkan

situasi yang makin kompleks karena ada pengaruh globalisasi, pengaruh teknologi digital, dan pengaruh media sosial. Globalisasi di satu sisi membuat negara bangsa kita diintegrasikan pada pusat-pusat pengaruh internasional sehingga kita mendapatkan rembesan begitu banyak nilai, budaya, dan ideologi dari luar. “Hal itu membuat kita mau tidak mau harus menjadi bagian dari perkembangan global,” ujar Yudi.

Di sisi lain, sambungnya, globalisasi juga menekan negara bangsa ke bawah sehingga menimbulkan luberan-luberan dalam bentuk bangkitnya identitas-identitas lokal, semangat daerahisme hingga level tertentu mengarah kepada separatisme.

Sebagai bangsa yang majemuk, jelasnya, ketika mendapatkan tekanan globalisasi, kita akan menjadi semakin kompleks, semakin plural secara internasional, mengalami gejala interkultural, dan secara nasional mengalami gejala multikultural.

Bagaimana kita harus bangkit dalam situasi seperti itu? Hal utama yang harus kita pahami bahwa manusia memerlukan jangkar identitas. Meskipun manusia ialah *legal subject* yang bertaraf global, tidak ada manusia yang bisa tercerabut dari akar-akar identitasnya. Masalahnya, keterpautan identitas akan melahirkan dua pilihan sikap. Pertama, demi satu identitas, identitas yang lain harus dihabisi. Itu namanya atavisme yang saat ini menjadi gelombang besar muka bumi.

Pilihan kedua, fakta bahwa kita hidup dalam masyarakat majemuk dan kalau kita ingin *survive*, kalau mata dibayar dengan



DOK FDD12

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka *focus group discussion* bertema 'Nilai-Nilai Baik untuk Indonesia Bangkit: Sebuah Renungan Kebangkitan Nasional' yang diselenggarakan Forum Diskusi Denpasar 12 yang bekerja sama dengan MPR RI di Jakarta, Rabu (18/5/2022).

mata, Yudi mengutip Mahatma Gandhi, dunia niscaya akan mengalami kegelapan. "Maka cara yang paling rasional adalah kita harus memiliki kecakapan untuk bisa hidup bersama dalam keragaman," papar Yudi.

Indonesia memiliki satu *local genius*, satu nilai yang memung-

kinkan keragaman bisa mencapai titik temu dalam spirit gotong royong. Secara singkat gotong royong adalah *spirit of togetherness, spirit of inclusion, spirit of cooperation, spirit of mutual respect*.

Bagaimana gotong royong itu dikembangkan? Pertama, kita harus memperluas jaring-jaring *connectivity*. Ruang-ruang pertemuan harus semakin kita kembangkan. Kenapa? Karena manusia memang makhluk yang paradoks. Di satu sisi makhluk sosial, tapi di sisi lain ada kecenderungan dalam cara mengembangkan pergaulan dengan mengutamakan orang lain yang dianggap memiliki persamaan seperti warna kulit, nilai, dan agama, dan itu inheren dalam diri manusia.

Namun, kalau itu terjadi, kata Yudi, Indonesia yang majemuk akan menjadi *zona conflict* yang tidak ada habis-habisnya. Untung manusia juga satu-satunya primata yang bisa mengembangkan *believe and values* sehingga bisa mengembangkan pandangan dunia yang memungkinkan orang keluar dari jebakan-jebakan tribalisme.

"Supaya yang asing bisa jadi dianggap familier, dianggap jadi saudara, teman yang asing itu harus didekatkan sehingga lama-lama prasangka terhadap perbedaan berganti dengan rasa kenyamanan," cetus Yudi.

Selanjutnya ialah *inclusivity*. Artinya, gotong royong juga mengandung dimensi inklusif, menyertakan semua, bukan eksklusif. *Inclusivity* dalam arti kesetaraan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, permodalan, dan perbankan. Hanya dengan

jaring *connectivity* dan *inclusivity* itulah kita bisa menjadi masyarakat dengan *mutual respect*.

“Supaya *connectivity* dan *inclusivity* bisa kuat, kita memerlukan satu ikatan seperti sapu lidi, ikatan yang bisa menyatukan dan memperkuat *connectivity* dan *inclusivity* itu, namanya ikatan moral. Jadi, moral di sini menjadi satu ikatan yang membuat keragaman bisa bersatu,” paparnya.

Dalam konteks Indonesia, imbuhnya, nilai-nilai bersama yang menjadi ikatan dalam kehidupan di tengah keragaman disebut Pancasila. Kalau kita ringkas seperti yang dikatakan Bung Karno, Pancasila terdiri dari lima prinsip, tapi jantung dasarnya ialah semangat gotong royong.

Namun, makna gotong royong di sini harus diperluas. Gotong royong dalam Pancasila itu, pertama, gotong royong dalam mengembangkan budaya kewargaan yang inklusif. Jadi, keragaman dihormati, tapi juga selalu mencari titik-titik persamaan nilai dengan semua agama, semua kearifan lokal, sama-sama menyaring dan berkontribusi dalam memperkuat kita bersama sehingga melahirkan satu modal budaya kewargaan yang inklusif.

Selanjutnya, sambung Yudi, budaya kewargaan atau kita sebut tata nilai budaya memerlukan kerangka kelembagaan agar orang-orang yang sudah dikembangkan dalam satu ruang pendidikan menjadi pribadi yang baik, tapi kalau tata kelola negara buruk, pribadi pun ikut buruk. “Makanya tata kelola politik dan pemerintahan harus diperbaiki.”

Bidang ekonomi dan kesejahteraan juga memerlukan tata kelola yang inklusif karena kesenjangan yang terlalu lebar akan melahirkan kecemburuan dan polarisasi. Kesenjangan yang terlalu lebar tidak hanya berbahaya bagi si miskin, tetapi juga bisa berbahaya bagi yang kaya karena sentimen.

Di dalam kesenjangan yang lebar, yang terjadi bukan yang miskin ditarik ke atas, melainkan yang atas mengalami *drag down* sehingga secara indikator nasional akan terjadi seperti Amerika Serikat belakangan ini, yakni indeks kesehatan mental, indeks kesehatan jasmani, indeks kebahagiaan, dan indeks literasi—semuanya—jatuh. “Itu terjadi ketika kesenjangan makin lebar,” Yudi mengingatkan.

Singkat kata, gotong royong dalam Pancasila menghendaki kita mengembangkan budaya keluarga yang inklusif, politik dan tata pemerintahan yang inklusif, dan pengembangan ekonomi yang inklusif. “Itulah gotong royong yang disebut dengan spirit inklusif. Makanya Pancasila secara ringkas kita sebut sebagai *the grand ideology of social inclusion* yang bisa menjamin kebahagiaan atau *wellbeing*, baik pada tingkat individu maupun sebagai entitas bangsa,” Yudi menjelaskan. ■



Langkah- langkah yang diperlukan untuk menopang gerakan ke arah perubahan ialah kesetaraan gender, kebebasan media, demokrasi, serta kebebasan individu.”

**Yose Rizal**  
Komisaris Telkomsel

## 4 Posisi Cukup Baik

**Y**OSE Rizal, Komisaris Telkomsel, membuka paparannya dengan menyatakan, *“The first agenda are improving the wellbeing of Indonesia. What is wellbeing? There are two aspects of wellbeing; national wellbeing and personal wellbeing (Agenda pertama ialah peningkatan kesejahteraan Indonesia. Apa itu kesejahteraan? Ada dua aspek kesejahteraan; kesejahteraan nasional dan kesejahteraan pribadi).”*

Ia menjelaskan kesejahteraan nasional ialah peningkatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan bangsa pada tahap pembangunan. Kesejahteraan pribadi ialah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada tahap perkembangan yang mereka capai.

Apa itu kesejahteraan nasional? Untuk menjawab pertanyaan itu, menurutnya, kita perlu memulai dengan melihat kesejahteraan nasional di Indonesia. Semua negara di dunia menyadari bahwa kunci kemajuan ekonomi yang berkelanjutan ialah meningkatkan kesejahteraan warga.

Berbagai studi menemukan sejumlah model yang dinilai dapat dipakai untuk mewujudkan harapan peningkatan kesejahteraan. Itu, antara lain, memiliki kelayakan kinerja ekonomi, infrastruktur yang memadai, kesehatan yang baik, serta kemajuan dalam pemberantasan korupsi.

“Selain itu, langkah-langkah yang diperlukan untuk menopang gerakan ke arah perubahan ialah kesetaraan gender, kebebasan media, demokrasi, serta kebebasan individu,” jelas Rizal.

Lalu pertanyaan berikutnya, apa syarat untuk mencapai pertumbuhan? Pertumbuhan dapat berjalan baik dan lancar bila ditopang modal sosial yang terdiri dari kemajuan sosial, perlindungan lingkungan, kualitas lingkungan, kekuatan bersama, serta stabilitas bangsa. “Jadi, inilah beberapa ukuran yang menjadi dasar perbandingan global dalam menentukan skor terhadap 145 negara.”

Negara dengan skor tertinggi ialah Denmark dengan indikator kesejahteraan global 598. Skor terendah ialah Afghanistan dengan indikator *global walkability index* (GWI) 190. Itu berdasarkan data pada 2020. Rata-rata *global score* ialah 405.

Skor Indonesia ialah 413, atau di atas rata-rata skor global. Se-



Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutannya di sela event G-20 di Nusa Dua Bali, Senin (15/11/2022). Tahun lalu Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 yang dilaksanakan pada 15-16 November 2022 di Bali. Sebanyak 17 kepala negara/pemerintahan turut hadir dalam gelaran G-20 tersebut.

lanjutnya rata-rata skor di negara-negara G-20 ialah 456. Dengan begitu, Indonesia berada di bawah rata-rata skor G-20 tersebut.

Meski begitu, modal sosial Indonesia menempati urutan pertama di G-20 dan urutan keenam di dunia dari 145 negara. Itu merupakan hal luar biasa yang kita miliki, yakni semangat gotong

royong. “Oleh karena itu, kita patut bersyukur karena dalam hal modal sosial kita berada di nomor enam dunia dan nomor satu di antara negara-negara G-20,” paparnya.

Level tertinggi berikutnya yang ditempati Indonesia di G-20 ialah perdamaian. Kita berada di nomor sembilan peringkat G-20 dan nomor 47 dunia. “Sekali lagi ini menegaskan bahwa kita memiliki peringkat yang sangat bagus,” ucap Rizal.

Selanjutnya mengenai keselamatan pribadi, Indonesia menempati urutan ke-11 di G-20 dan peringkat ke-68 di dunia. Dari segi kualitas lingkungan, Indonesia menempati peringkat ke-12 di kelompok G-20 dan peringkat ke-62 di dunia. Kekuatan dan stabilitas bangsa berada di peringkat ke-13 di kelompok G-20 dan peringkat ke-72 di dunia.

Dalam hal dukungan bisnis, Indonesia menempati urutan ke-13 di kelompok G-20 dan urutan ke-60 di dunia. Di bidang kesetaraan gender, Indonesia menempati peringkat ke-13 di kelompok G-20 dan peringkat ke-77 di dunia.

Selain itu, dalam hal demokrasi, Indonesia menempati urutan ke-15 di kelompok G-20 dan urutan ke-61 di dunia. Kebebasan individu menempati urutan ke-15 di G-20 dan nomor 92 di dunia, kinerja ekonomi menempati peringkat ke-15 di G-20 dan urutan ke-56 di dunia.

Selanjutnya dalam bidang pendidikan, Indonesia menempati peringkat ke-16 di G-20 dan nomor 80 di dunia. Berikutnya di bidang kebebasan media, Indonesia di peringkat ke-16 di G-20 dan

peringkat ke-75 di dunia.

Dari sisi kemajuan sosial, kita berada di peringkat ke-16 di G-20 dan urutan ke-78 di dunia. Dalam hal kebahagiaan, kita di peringkat ke-16 di G-20 dan ke-79 di dunia. Dalam hal korupsi, Indonesia berada di peringkat ke-18 di G-20 dan peringkat ke-85 di dunia. “Ini jelas menjadi masalah yang perlu segera dibenahi,” tegas Rizal.

Secara keseluruhan, kata dia, posisi Indonesia cukup baik di tingkat G-20 dan global, terutama di bidang modal sosial dan perdamaian. Karena itu, kita harus terus membangun kekuatan modal sosial di bawah payung semangat gotong royong, terus menjaga dan merawat perdamaian, serta terus berupaya melindungi hak-hak individual setiap warga negara. ■



Sekarang tinggal peran kita sebagai masyarakat yang harus memonitor nilai-nilai yang terbentuk dengan hadirnya digitalisasi. Saya yakin bahwa jika perempuan berdaya, Indonesia akan maju.”

**Hadriani Uli Silalahi**  
Chair Women 20

## 5 Pemberdayaan Perempuan

**H**ADRIANI Uli Silalahi, Chair Women 20 (W-20), menjelaskan konstruksi masyarakat yang dapat dipengaruhi peran perempuan dalam menanamkan nilai-nilai di masyarakat. Pasalnya, kehidupan bermasyarakat terbentuk dalam konstruksi sosial yang dibangun di antara manusia.

“Manusia-manusia itu pun dibentuk dari nilai-nilai yang diadopsi dirinya sendiri. Nilai-nilai itulah yang dipengaruhi keluarga, teman, lingkungan, sekolah, adat istiadat, agama, ras, suku, media, dan pekerjaan,” ulas Uli.

Ia merujuk salah satu artikel yang mengulas perspektif masyarakat terhadap peran gender, menyatakan bahwa didikan keluarga saat seseorang dibesarkan merupakan faktor terbesar

dalam membangun kehidupan seseorang. Pandangan itu bukan hanya tentang nilai gender, melainkan juga nilai kesetaraan lainnya, tentang bagaimana menjadi manusia seutuhnya yang menghargai makhluk hidup di muka bumi.

Orang tua di rumah, kata Uli, harus memperkenalkan prinsip kesetaraan sejak dini sekaligus menjadi anutan nyata bagi anak-anak mereka. Ibu memiliki peran penting dan strategis dalam keluarga, terutama dalam menyiapkan generasi penerus.

Oleh karena itu, perempuan perlu mendapatkan pemberdayaan hak dan kewajiban, pendidikan, ekonomi, dan kebebasan. “Nilai-nilai yang ia milikilah yang akan diteruskan ke generasi selanjutnya,” jelas Uli.

Menurutnya, kualitas nilai sangat penting dan perlu disadari bahwa pemberdayaan dan inklusi ekonomi perempuan ialah kunci dalam mencapai agenda 2030 untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Selaras dengan prioritas di W-20 yang menjunjung prinsip inklusivitas dengan perempuan dari berbagai latar belakang dan kondisi ekonomi serta sosial harus bersama-sama berdaya.

“Salah satu hal yang saya tangkap dalam proses W-20 selama ini adalah perempuan yang maju menjadi sosok inspiratif seperti Wakil Ketua MPR RI Ibu Lestari Moerdijat yang memiliki peran besar dalam menginspirasi anak-anak perempuan supaya merasa yakin bahwa mereka pun bisa dan berdaya untuk menjadi sosok yang inspiratif,” ungkap Uli.

Lebih lanjut dijelaskan, salah satu benang merah yang dapat mendukung percepatan ialah teknologi digitalisasi. Digitalisasi di berbagai bidang membawa potensi besar untuk mempercepat pemberdayaan perempuan. Digitalisasi memiliki peran untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat dengan informasi yang terdepan.

“Sekarang tinggal peran kita sebagai masyarakat yang harus memonitor nilai-nilai yang terbentuk dengan hadirnya digitalisasi. Saya yakin bahwa jika perempuan berdaya, Indonesia akan maju,” Uli optimistis. ■



Perlu terapi sosial yang menyejukkan agar orang menyampaikan pikiran dan pendapat di ruang publik dengan cara-cara santun dan berakhlak.”

**Bachtiar Ali**

Anggota DPR RI periode 2014-2019  
Fraksi Partai NasDem

## 6 Jangan Terjebak Romantisme Masa Lalu

**D**ALAM menanggapi pandangan para narasumber, Direktur Operasional Pertamina Foundation, Yulio S. Bulu, mengatakan, bila kita kembali kepada kontemplasi tentang Hari Kebangkitan Nasional, kita mengingat adanya siklus 700 tahunan bahwa kita pernah menjadi bangsa yang berjaya di zaman Sriwijaya dan Majapahit. “Saya senang mengajak kita melihat ke belakang, tetapi tidak bermaksud untuk membuat kita terbawa kepada romantisme masa lalu,” ucapnya.

Kejayaan Sriwijaya dan Majapahit, menurutnya, tidak hanya untuk dikenang dari masa ke masa, tetapi juga yang lebih penting ialah digunakan untuk menangkap nilai-nilai perjuangan dan kejayaan yang pernah kita capai untuk membangun masa depan

yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih adil.

Semangat kejayaan itu secara kontekstual dapat menjadi pemicu dan pemicu semangat segenap anak bangsa untuk mempersiapkan diri menyambut datangnya era Indonesia emas pada 2045. “Era Indonesia emas tidak akan punya makna apa-apa bila kita tidak mempersiapkan diri secara baik, tidak menyiapkan generasi masa depan yang berkualitas untuk mengisi masa itu menuju kejayaan Indonesia,” tegas Yulio.

Najeela Shihab, pendiri Sekolah Cikal dan Sekolah.mu, yang juga menjadi penanggap dalam diskusi tersebut, mengingatkan bahwa berbicara tentang pendidikan bukan hanya dalam bentuk persekolahan formal, melainkan juga harus ditempatkan pada perspektif pendidikan yang lebih luas, yakni pendidikan yang melibatkan keluarga dan rumah, serta terus menumbuhkan kompetensi-kompetensi yang ingin kita miliki dan ingin kita tumbuhkan pada anak-anak kita.

Selain itu, katanya, pembelajaran yang kolaboratif dan kontekstual sangat penting karena nilai-nilai yang ingin dikembangkan sesungguhnya bukan sesuatu yang berada di luar lingkaran anak. Banyak sekali keunikan, banyak sekali nilai mendasar, yang sebetulnya sudah dengan mudah dibawa ke dalam ruang keluarga, dibawa ke ruang kelas, dan bukan harus didapatkan atau dibawa dari luar lingkungan sehari-hari.

Persoalannya, menurut Najeela, bagaimana memastikan bahwa kita memberikan sebanyak mungkin kesempatan kepada anak-

anak untuk berdaya sejak dini. “Artinya, berdaya dalam mempraktikkan nilai-nilai secara konsisten sejak bangku sekolah dasar.”

Tanggapan terhadap para narasumber juga dilontarkan Tita Djumaryo, pendiri Ganara Ary-Mari Berbagi Seni dan Pengurus Koalisi Seni Indonesia.

Menurutnya, semangat kebangkitan yang perlu terus kita dorong ialah kebangkitan nasional untuk kembali memperkuat nilai-nilai dasar gotong royong, Pancasila, dan inklusi sosial. Nilai-nilai itu yang seharusnya menjadi penguat generasi muda sekarang untuk menghadapi globalisasi digital.

Mengenai pernyataan mengapa kita berbeda dengan Korsel, padahal usia kemerdekaan hanya terpaut dua hari, ia menilai itu terjadi karena Indonesia dan Korsel berbeda dalam hal penanaman *value* mengenai budaya. “Bagaimana cara menghargai seni dan budaya yang sudah ada sejak dulu sebagai sebuah kekayaan bangsa yang harus dilestarikan, antara lain melalui setiap lini pendidikan yang ada,” terang Tita.

Jika berbicara tentang kebangkitan, kata Tita, fokus perhatian kita mengarah kepada generasi muda karena merekalah pilar pembangunan masa depan. Intinya, pemuda harus dikuatkan agar dapat berpikir kritis dan memiliki inklusi sosial yang mumpuni. “Kemampuan itu antara lain dapat dicapai melalui pendidikan dan kegiatan seni yang teratur dan kontinu,” tukasnya.

Maria Kresentia, Direktur SPAK (Saya Perempuan Antikorupsi), mengawali tanggapannya dengan memperkenalkan gerakan

perempuan antikorupsi.

Menurutnya, gerakan itu lahir pada 2014 dan tujuannya menempatkan perempuan sebagai garda terdepan dalam pencegahan korupsi.

Perempuan dari berbagai latar belakang profesi dan berbagai daerah dikumpulkan, diberi pelatihan dan pengetahuan mengenai korupsi dan nilai-nilai antikorupsi guna membuka kesadaran mereka bahwa ternyata korupsi itu dekat sekali dengan keseharian kita. “Itulah sebabnya penting nilai-nilai antikorupsi itu menjadi pegangan dan benteng dalam menghadapi korupsi yang terjadi di keseharian kita,” jelas Maria.

Dengan kesadaran itu, mereka juga dibekali alat bantu berupa permainan. Melalui permainan, orang belajar tanpa merasa terintimidasi, tanpa merasa disuruh atau dilarang, bahkan sampai orang tua pun bisa terlibat dalam permainan itu. “Melalui permainan-permainan itu kemudian para perempuan menyebarkan pendidikan antikorupsi di keluarga, lingkungan, hingga kelompok masyarakat yang lebih luas.”

Gerakan tersebut, kata dia, tidak hanya berhenti di pendidikan antikorupsi, tapi juga advokasi kebijakan yang mengarah ke praktik-praktik korupsi yang menyeret perempuan dan anak-anak menjadi korban. Misalnya, perkawinan anak, tindak pidana perdagangan orang dengan korupsi menjadi fasilitator atau mempermudah terjadinya tindak kriminal tersebut.

“Kita memotret perilaku koruptif sebagai sebuah pelanggaran



123RF

Pendidikan untuk anak bukan hanya dalam bentuk persekolahan formal, melainkan juga harus ditempatkan pada perspektif pendidikan yang lebih luas, yakni pendidikan yang melibatkan keluarga dan rumah, serta terus menumbuhkan kompetensi-kompetensi yang ingin kita miliki dan ingin kita tumbuhkan pada anak-anak kita.

terhadap nilai maka korupsi bukan hanya menjadi persoalan hukum, melainkan persoalan setiap orang atau setiap individu,” tutur Maria.

Penanggap lainnya, Endang Suraningsih, Direktur SDM ID Food, mengingatkan bahwa kebangkitan dan perubahan tidak boleh berimbas pada perubahan jati diri suatu bangsa.

Menurutnya, jati diri bangsa Indonesia ialah keberagaman yang menyatu dalam ikatan moral Pancasila, dengan perbedaan merupakan keindahan sekaligus pilar kekuatan bangsa. “Ini ada-

lah nilai keindonesiaan kita di mana keindahan justru dibangun oleh adanya perbedaan,” paparnya.

Nilai keindonesiaan itu harus terus kita jaga dan rawat sebagai modal bagi perjalanan bangsa ke depan karena ketika kita menuntut agar semua menjadi sama atau seragam di muka bumi, itu ialah tanda-tanda kematian.

Lebih lanjut dijelaskan, jati diri keberagaman tidak cukup hanya dipahami, tetapi harus diimplementasikan menjadi kekuatan nyata dalam berbagai bidang pembangunan. “Perbedaan bukan untuk dipertandingkan, melainkan untuk dipersandingkan menjadi sebuah kekuatan, termasuk penguatan kompetensi *managing diversity*, yaitu kemampuan mengelola dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada agar bernilai tambah dan berdaya saing.”

Niko Chandra, Kepala Divisi Institutional Relations Mind ID, sependapat dengan pandangan para narasumber bahwa *value* merupakan representasi jati diri dan jati diri berkaitan erat dengan pembentukan karakter.

Kalau kita lihat dalam spektrum yang lebih luas, jelasnya, karakter tidak hanya penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga diperlukan dalam tatanan korporasi atau bisnis yang namanya *corporate value*.

“Ini tidak bisa kita mungkiri karena hasil riset menunjukkan bahwa sebuah perusahaan yang memiliki *corporate value*, *growth*-nya lebih tinggi hampir dua kali lipat dari perusahaan yang

tidak punya *corporate value*.”

Oleh karena itu, harus kita sadari bahwa membangun *value* sangat penting sebagai alat yang menyatukan kita semua.

Prof. Bachtiar Ali, anggota DPR RI periode 2014-2019 Fraksi Partai NasDem, mengaku terkesan dengan paparan Yudi Latif tentang budi pekerti yang mulai mengalami krisis di masyarakat kita.

Perbedaan yang ada di masyarakat, menurutnya, tidak perlu terlalu dibesar-besarkan, terutama baik oleh media sosial maupun media *mainstream*, seolah-olah sedang terjadi konflik sosial yang luar biasa.

Ia mengutip pandangan Juergen Habermas, filsuf dan sosiolog Jerman, yang mengatakan salah satu ciri negara demokrasi ialah terbukanya ruang publik dan orang diberi kesempatan untuk berdiskusi. “Jadi, nilai-nilai demokrasi ada di situ. Orang bisa menyampaikan pendapatnya secara bebas,” tuturnya.

Masalahnya, kata Bachtiar, tanpa disadari ruang publik ternyata terbuka sedemikian lebarnya sehingga masyarakat dengan mudah mengekspresikan kebebasan yang melampaui batas sehingga kebebasan justru bertentangan dengan demokrasi dan budi pekerti. “Oleh karena itu, perlu terapi sosial yang menyejukkan agar orang menyampaikan pikiran dan pendapat di ruang publik dengan cara-cara santun dan berakhlak.”

Sementara itu, Dr. Muhammad Rahmat Yananda, Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni), menjelaskan bahwa dalam bidang ekonomi, produk yang kompleks atau beragam nilainya



MIBRIYANBODO HENDRO

Pimpinan umat Islam, Kristen, dan Hindu di Desa Tanampulu, Banawa Selatan, Donggala, Sulawesi Tengah, berswafoto di depan Pura Agung Giriwangun, Tanampulu, Selasa (27/7/2021). Jati diri bangsa Indonesia ialah keberagaman yang menyatu dalam ikatan moral Pancasila, dengan perbedaan merupakan keindahan sekaligus pilar kekuatan bangsa.

lebih tinggi. Produk teknologi pasti lebih mahal daripada produk pertanian. “Apa yang beragam, apa yang lebih kompleks, akan melibatkan banyak partisipan dan kolaborasi sehingga nilainya lebih tinggi,” katanya memberikan ilustrasi tentang kekuatan dan keunggulan keberagaman masyarakat suatu negara.

Kuncinya, apakah keragaman yang kita miliki dapat menjadi modal untuk memajukan Indonesia ke depan atau tidak? Membawa kita pada suatu kemajuan untuk kebaruan atau tidak?

Pertanyaan berikutnya, kalau keberagaman menjadi konsep yang statis, bagaimana menjadikannya dinamis? Bagaimana di-

operasionalisasikan? “Itu yang menjadi tantangan ke depan bagi kita,” tuturnya.

Masa pandemi covid-19, menurut Rahmat, sebenarnya memberikan kita ruang untuk menguji dan memvalidasi ilai-nilai keindonesiaan yang kita miliki.

Bagaimana cara mengaktualisasikan yang namanya kebinekaan dan gotong royong, misalnya. Ternyata, keragaman tidak menjadi modal sosial kita karena polarisasi semakin tajam. “Mungkin kita terlalu sibuk bicara masa lalu, sejarah identitas, karena tidak punya cerita tentang masa depan,” tandasnya.

Di penghujung diskusi yang berlangsung secara daring dan luring itu, wartawan senior Saur Hutabarat mengingatkan bahwa masalah besar yang dihadapi dalam merekonstruksi nilai-nilai menuju Indonesia bangkit ialah menyelesaikan kontradiksi. Contohnya, gotong royong berhadapan dengan korupsi berkelompok; di rumah ditanamkan kejujuran, di ruang publik mencuri uang negara.

Pertanyaannya kenapa *social capital* hebat, tapi korupsinya juga hebat? Kiranya yang kita perlukan memang harus bisa keluar dari jeratan nilai-nilai yang kontradiktif itu. Caranya, kata Saur, seperti yang diuraikan para narasumber dalam diskusi kali ini, antara lain memperluas keteladanan kolektif, keteladanan kepublikan, yaitu manusia-manusia Indonesia yang berjati diri, yang punya kedalaman batin sejalan dengan keluasan pikiran mereka, dan searah dengan tindakan mereka. ■



# Catatan Moderator

## Outlook Economy

---

Oleh: **Atang Irawan**

**C**ORONAVIRUS disease 2019 (covid-19) telah menghantam seluruh dimensi kehidupan hingga menimbulkan dampak sangat akut dan luar biasa (*extraordinary*). Selain mengakibatkan krisis kesehatan, bahkan krisis kemanusiaan, covid-19 tidak terkecuali berdampak pada perekonomian global dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi kontraktif yang merata di berbagai belahan dunia.

Berbagai kebijakan untuk mengurangi dan menanggulangi penyebaran covid-19 berakibat terjadinya pembatasan mobilitas antardaerah dan wilayah, termasuk antarnegara. Akibatnya, aktivitas ekonomi menurun secara tajam yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian perekonomian dunia yang berpotensi terjadinya krisis ekonomi sehingga timbul kekhawatiran pada stabilitas sistem keuangan domestik, korporasi, dan negara.

Berbagai negara berusaha menghindari krisis kemanusiaan dan ekonomi melalui kebijakan fiskal ekspansif. Tujuan mereka memberikan stimulus bagi perekonomian sekaligus mencegah krisis kesehatan untuk memastikan berjalannya perekonomian serta stabilitas keuangan. Misalnya saja melalui penurunan suku bunga dan baik kebijakan maupun pelanggaran likuiditas, termasuk relaksasi keuangan. Bahkan juga stimulus pada sektor usaha

melalui upaya restrukturisasi bagi UMKM dan korporasi untuk menjaga fungsi intermediasi pembiayaan. Dalam rangka stimulus keuangan tersebut juga dilakukan berbagai akses terhadap pembiayaan dalam bentuk pinjaman dari lembaga internasional/multilateral.

Turbulensi ekonomi itu juga terjadi di Indonesia. Gelombang serangan covid-19 memporandakan ekonomi bangsa sehingga dibutuhkan serangkaian kebijakan fiskal, moneter. Kebijakan-kebijakan tersebut secara substansial dapat membantu kebutuhan domestik rumah tangga dan bisnis yang terkena oleh dampak covid-19 untuk memenuhi kebutuhan dan bisnis mereka. Dengan demikian, mereka tetap bisa bertahan sehingga tidak berakibat pada turbulensi ekonomi yang semakin parah berakibat pada krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Ekonomi Indonesia dikhawatirkan akan tumbuh negatif, lalu angka pengangguran dan kemiskinan meningkat, sehingga menunjukkan adanya pelemahan dengan hanya mencapai 2,97% jika dibandingkan dengan capaian triwulan pertama 2019 yang sebesar 5,07%. Data triwulan kedua juga kurang bersahabat dengan menunjukkan kemunduran yang dalam sebesar -5,32%, terburuk sejak 1999. Data triwulan ketiga mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,49%, sedangkan pada triwulan keempat mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19%.

Dampak menurunnya persentase pertumbuhan ekonomi Indonesia, salah satunya, ialah peningkatan angka pengangguran

dan penduduk miskin yang disebabkan PHK selama masa pandemi covid-19.

Penyebaran covid-19 yang masif dan tidak ada satu pun pihak yang dapat memprediksi kapan akan berakhir, yang menimbulkan potensi terjadinya krisis berkepanjangan, tentunya telah meresahkan berbagai kalangan.

Berdasarkan hal tersebut, Forum Diskusi Denpasar 12 (FDD 12) yang diinisiasi Ibu Lestari Moerdijat selaku Wakil Ketua MPR RI Bidang Aspirasi Masyarakat mengajak kita semua membangun paradigma berpikir kreatif untuk mengurai dan mencari solusi permasalahan kebangsaan. ■

## Antisipasi Gelombang Baru Covid-19

Oleh: **Atang Irawan**

**C** OVID-19 telah mengakibatkan krisis multidimensional yang dapat mengancam seluruh aspek kehidupan. Sejak ditemukan pertama kali di Wuhan, Tiongkok, pada Desember 2019, kasus covid-19 dalam waktu cepat telah menyebar secara masif di seluruh negara dunia. Kebijakan pembatasan sosial telah diterapkan di Indonesia, tetapi kasus covid-19 terus meningkat di hampir semua daerah.

Dampak paling berat akibat penerapan pembatasan sosial, termasuk beragam penutupan sementara tempat kerja dan berkurangnya jam kerja, ialah pengurangan pekerja.

Beberapa provinsi di Indonesia telah menunjukkan cara-cara penerapan pembatasan sosial skala besar. Adaptasi penerapan kenormalan baru oleh pemerintah Indonesia itu bertujuan menjaga pertumbuhan ekonomi di seluruh area.

Meskipun langkah cepat respons terkait dengan penerapan vaksinasi telah dimulai pemerintah Indonesia, laju penyebaran virus dan mutasi varian baru covid-19 masih menjadi tantangan.

Setelah pengumuman adanya kasus pertama di Indonesia, pemerintah mengimbau warga untuk tidak panik, termasuk tidak melakukan *panic buying*. Fakta lapangan menunjukkan penularan virus korona terjadi dengan sangat cepat. Penanganan cepat

diupayakan pemerintah dengan membentuk Tim Satuan Tugas Penanggulangan Covid-19 yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengoordinasi tim reaksi cepat. Pada 13 Maret 2020 Presiden Jokowi menandatangani Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Untuk mengantisipasi penyebaran masif covid-19, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan mulai berlaku sejak 1 April 2020. Mekanisme dan indikator penerapan PSBB di tingkat daerah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9/2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Provinsi pertama yang mengajukan PSBB ialah DKI Jakarta, yang menjadi wilayah terdampak oleh virus korona paling tinggi.

Pembatasan aktivitas masyarakat telah berimplikasi pada penurunan pertumbuhan ekonomi, bahkan cenderung stagnasi. Awal Juni 2020, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia ialah 0% pada 2020. Bahkan, dalam skenario terburuk pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa minus 3,5%.

Untuk memperkuat pedoman bagi masyarakat dalam situasi kenormalan baru, Kementerian Kesehatan menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas

Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Kebijakan pemerintah untuk menerapkan kenormalan baru itu diharapkan berbarengan dengan kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat sebab covid-19 belum sepenuhnya sirna.

Memasuki Mei, penanganan covid-19 mendapat tantangan besar. Pasalnya, 24-25 Mei 2020 merupakan Hari Raya Idul Fitri. Momentum Idul Fitri di Indonesia telah mentradisikan mudik. Tradisi itu tidak hanya dikenal bagi masyarakat muslim, tetapi secara *sociocultural* sudah diyakini sebagai bagian dari perilaku bangsa Indonesia. Padahal, kasus covid-19 belum memperlihatkan penurunan yang signifikan, apalagi banyak daerah belum menerapkan PSBB, sedangkan seruan tidak mudik banyak menjadi perdebatan di ruang publik. Pasalnya, mudik dikhawatirkan akan memicu penularan covid 19 menjadi kian masif di daerah-daerah yang menjadi zona mudik.

Meskipun pada Maret 2020, pemerintah membentuk Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk memperkuat koordinasi, surveilans, dan deteksi dini dengan melibatkan tim gerak cepat yang ada di seluruh kabupaten/kota, unit pelaksana teknis dan rumah sakit, serta pemenuhan anggaran layanan kesehatan, logistik, SDM, dan informasi dan komunikasi, tanpa adanya kesadaran masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran covid-19, upaya-upaya pemerintah akan sulit berhasil.

Untuk menghadapi lonjakan kasus covid-19 akibat mudik,

perlu adanya koordinasi, surveilansi, deteksi dini, pelayanan kesehatan, logistik, SDM, informasi, dan komunikasi dengan masyarakat agar secara terbuka masyarakat mengetahui bagaimana dampak mudik terhadap penyebaran covid-19.

Dengan demikian, dalam Forum Diskusi Denpasar 12 ini diharapkan kita dapat memberikan catatan-catatan terhadapantisipasi penyebaran covid-19 di masa mudik baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat agar terbangun kesadaran kolektif untuk mencegah masifnya penyebaran covid di saat mudik Idul Fitri. ■

## Industri Kreatif dan Pemulihan Ekonomi Nasional

---

Oleh: **Luthfi Assyaukanie**

**P**EMULIHAN ekonomi nasional ialah salah satu tema yang paling sering diangkat forum-forum diskusi selama dan setelah menurunnya wabah covid-19. Sebagian besar negara di dunia mengalami dampak buruk akibat pandemi itu. Selain kesehatan yang merupakan dampak langsung dari covid-19, ekonomi merupakan dampak yang paling terasa akibat wabah itu. Bahkan setelah pandemi dinyatakan berakhir, dampak ekonomi di sebagian besar negara belum sepenuhnya teratasi. Upaya pemulihan menjadi prioritas di banyak negara, termasuk Indonesia.

Pemerintah Indonesia sudah menyiapkan langkah-langkah pemulihan sejak Mei 2020, ketika pandemi semakin luas menyebar. Lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23/2020, program pemulihan ekonomi nasional akibat covid-19 mulai dijalankan. Prioritas utamanya ialah menyelamatkan badan usaha negara, sektor perbankan, dan dunia usaha secara umum.

Pelaksanaan program itu dilakukan lewat empat cara, yakni penyertaan modal negara (PMN), penempatan dana, investasi pemerintah, dan penjaminan. Selain itu, jika dirasa perlu, pemerintah juga bisa mengeluarkan kebijakan yang bersifat afirmatif lewat belanja negara. Dana untuk program itu diambil dari anggaran

an pendapatan dan belanja negara (APBN) atau sumber-sumber lain yang ditentukan undang-undang.

Program itu berjalan cukup efektif. Meski pemerintah mendapatkan kritik dari sana-sini, terutama terkait dengan kebijakan pergerakan manusia selama pandemi, program pemulihan ekonomi berjalan lancar. Pada 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi hingga -2,07%. Itu ialah penurunan terburuk sejak krisis 1998, ketika ekonomi Indonesia mengalami pelambanan hingga -13,13%.

Pada 2021, ekonomi Indonesia mengalami pembalikan dengan tumbuh secara positif, yakni sebesar 3,69%. Angka itu belum kembali ke tren normal pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rata-rata sebesar 5%. Angka itu juga berada di bawah rata-rata pertumbuhan dunia yang mencapai 5,8%. Meski banyak negara di dunia mengalami pertumbuhan rendah, tingginya angka pertumbuhan global ditopang dua negara berekonomi besar, yakni Amerika Serikat dan Tiongkok. Selama 2021, ekonomi Tiongkok tumbuh 8,1%, sementara Amerika tumbuh 5,7%.

Namun, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 mencapai 5,3%, atau setara dengan tren pertumbuhan sebelum datangnya covid-19. Jika proyeksi tersebut bisa terealisasi, itu sudah cukup baik mengingat ekonomi dunia masih terus bergejolak, khususnya akibat perang Rusia-Ukraina.

Beberapa lembaga keuangan dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada 2022 tidak akan melampaui

4%. International Monetary Fund (IMF), misalnya, memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia akan mencapai 3,2% saja. Kecilnya angka itu, lagi-lagi, sangat dipengaruhi pertumbuhan dua raksasa ekonomi, yakni Amerika dan Tiongkok, yang masing-masing diproyeksikan tumbuh 2,8% dan 3,2%.

Pemulihan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada sektor-sektor yang selama ini memberikan sumbangan besar bagi pertumbuhan ekonomi, seperti industri, perdagangan, dan pertanian. Pada masa-masa awal pandemi (2020), dari ketiga sektor itu, hanya pertanian yang tumbuh positif, yakni sebesar 1,75%. Namun, ada beberapa sektor lain yang mengalami peningkatan, seperti informasi dan komunikasi (tumbuh 10,58%) dan jasa kesehatan yang tumbuh 11,6%.

Sektor yang paling terpukul selama pandemi ialah transportasi dan perdagangan yang tumbuh negatif sebesar -15,04% dan makanan yang berkontraksi sebesar -10,22%. Kedua sektor itu terkait dengan pariwisata, yang juga mengalami penurunan parah.

Pada 2022, sektor pariwisata mengalami pertumbuhan pesat dan salah satu sektor yang mengalami pemulihan cukup cepat. Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), pada pertengahan 2022, kunjungan wisatawan asing ke Indonesia mengalami kenaikan 2.000% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang menggembirakan, kenaikan sektor wisata juga diiringi sektor-sektor pendukungnya seperti akomodasi (hotel) dan makanan.

Ekonomi kreatif yang berada di bawah Kemenparekraf juga mengalami proses pemulihan yang cukup baik. Pada 2021, nilai ekspor sektor itu mengalami peningkatan menjadi US\$23,9 miliar dari US\$18,78 miliar pada 2020. Kontribusi terbesar berasal dari komoditas pakaian (61,6%), kerajinan tangan (31,3%), dan kuliner (6,9%).

Kemenparekraf memproyeksikan, pada 2022, angka ekspor ekonomi kreatif akan mencapai 25,24%. Beberapa bidang lain dalam ekonomi kreatif mengalami pukulan keras. Industri musik, misalnya, praktis mati selama pandemi. Larangan untuk mengadakan acara yang mengundang orang banyak berdampak langsung bagi pertunjukan hiburan. Yang terimbas oleh dampaknya bukan hanya para musikus dan artis, tapi juga seluruh rantai produksi dari sektor itu, seperti transportasi, akomodasi, penyelenggaraan *event*, hingga usaha rental.

Salah satu bidang dalam ekonomi kreatif yang tumbuh pesat selama pandemi ialah usaha digital. Aturan pembatasan pergerakan manusia mendorong mereka untuk tinggal di rumah. Dampaknya sebagian besar aktivitas mereka dilakukan secara *online*, baik untuk tujuan transaksi (belanja), belajar (sekolah/kuliah), maupun hiburan (*video streaming*).

Beberapa *startup* yang mengandalkan interaksi digital mengalami lonjakan pengguna. Salah satu yang paling diuntungkan ialah usaha *online*. Sektor usaha mikro (UMKM) yang runtuh di terpa pandemi beralih ke digital. Banyak dari pengusaha kecil

terpaksa belajar bagaimana memanfaatkan internet untuk bisnis mereka. Hasilnya, terjadi lonjakan jumlah gerai *online* di berbagai *marketplace*.

Sayangnya, yang mendapatkan banyak keuntungan dari bonus digital itu bukanlah pengusaha dalam negeri. Platform-platform besar yang banyak digunakan orang selama pandemi bukan milik Indonesia. *Zoom*, misalnya, platform yang paling banyak digunakan untuk kebutuhan pendidikan dan *meeting* selama pandemi, mengalami peningkatan 28 ribu kali lipat. Seperti kita tahu, *Zoom* ialah perusahaan teknologi yang berbasis di Amerika Serikat.

Begitu juga kalau kita bicara industri hiburan *online*. Selama pandemi, pengguna *Youtube* dan *Netflix* mengalami lonjakan luar biasa. Sebagiannya dari Indonesia. Sayangnya, berkah digital itu tidak berdampak bagi ekonomi Indonesia. Justru sebaliknya, yang menikmati keuntungan ialah perusahaan-perusahaan asing. Beberapa platform belanja *online*, seperti *Shopee*, juga bukan milik Indonesia sehingga keuntungan yang didapat darinya akan lari ke luar negeri.

Ekonomi digital tumbuh dengan sangat baik, khususnya selama pandemi. Meski pada 2022 mengalami penurunan secara global, khususnya karena tumbangannya saham-saham teknologi di pasar modal Amerika Serikat, di masa depan, ekonomi digital bakal terus tumbuh. Kemenparekraf memprediksi, pada 2025, ekonomi digital Indonesia bakal mencapai US\$150-an miliar, atau hampir 10% dari GDP kita. Angka itu sedikit lebih tinggi daripada

proyeksi *Google-Temasek*, sebesar US\$120 miliar.

Perlu diingat bahwa angka itu ialah perputaran uang dari ekonomi digital di Indonesia, terlepas dari siapa pemilik usahanya. Dengan kata lain, belum tentu Indonesia yang akan mendapatkan manfaat dari jumlah uang yang besar itu. Ambil contoh, *Google* dan *Youtube*. Siapa yang paling banyak mendapatkan keuntungan dari kue iklan di dua platform itu? Sudah pasti bukan Indonesia karena Alphabet, perusahaan yang menaungi dua platform itu, bukan milik Indonesia. Sebagian besar uangnya lari ke Amerika Serikat. Iklan digital didominasi *Google* dan *Facebook*. Mereka menguasai sekitar 80% pasar iklan di Indonesia. Sisanya yang 20% diperebutkan media-media lokal seperti *Kompas*, *Detik.com*, dan *IDN Times*.

Pemulihan ekonomi nasional akan terus berlangsung. Ekonomi dunia pada 2023 diperkirakan masih akan mengalami tekanan. Inflasi global serta resesi menjadi pembicaraan utama di awal tahun baru ini. Bursa saham Eropa diperkirakan bakal stagnan, sementara pasar modal di Amerika juga akan jalan di tempat atau naik sedikit. Ekonomi Indonesia sendiri diperkirakan bakal tumbuh sekitar 5%.

Di tengah ketidakpastian dunia, pemerintah Indonesia sebaiknya memberikan prioritas pada sektor-sektor yang bisa menjaga pertumbuhan ekonomi nasional serta memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah. ■



# **Biodata Tim Ahli**



**Arief Adi Wibowo, S.Si., M.T.** lahir di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Memegang gelar master teknik dan manajemen industri dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, sebelumnya lulus sebagai sarjana sains bidang fisika teoretis dari Universitas Airlangga. Sebagai aktivis, Arief aktif sebagai Wakil Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) dan Ketua PP Ikatan Alumni Universitas Airlangga. Memiliki rekam kerja di banyak perusahaan media nasional seperti *TV One*, *Trans TV/7*, *CNN Indonesia*, dan *Metro TV*. Saat ini menjabat staf khusus di Chairman Office Media Group. ■



**Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum.** lahir di Wonosobo, 10 Juli 1975. Ia merupakan dosen Fakultas Hukum di Universitas Pasundan Bandung, Universitas Parahyangan (2000-2007), dan Dewan Penasihat DPD Kongres Avokata Indonesia Jawa Barat. Bidang kajiannya ialah hukum tata negara. Meraih gelar S-3 ilmu hukum di Universitas Padjadjaran pada 2011 dan mengenyam sejumlah pendidikan keterampilan seperti bidang jurnalistik dan pelatihan *public learning services* (PLS) di Payap University Chiang May, Thailand. Atang juga menjadi dosen luar biasa di Unikom (2003), Universitas Maranata (2010), Staf Ahli DPR RI 2009-2019, Staf Ahli DPD RI 2009-2019, dan staf khusus pimpinan MPR RI (2019-sekarang). ■



**Drs. Muchtar Luthfi Mutty, M.Si.** lahir di Masamba, 1 September 1956. Pendidikan terakhir S-2 administrasi negara. Pengalaman kerjanya dari Camat Wotu, Kabupaten Luwu (1986-1989), dosen IIP/IPDN (1989-2014), Bupati Luwu Utara (1999-2009), Staf Khusus Wakil Presiden RI (2009-2014), anggota DPR RI (2014-2019), Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang), serta anggota TGUPP Provinsi Sulawesi Selatan (2021-sekarang). Luthfi mendapat tanda penghargaan Bintang Jasa Utama pada 1999, tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun (2005), dan Satyalancana Karya Satya 30 Tahun (2008). ■



**Arimbi Heroepoetri** lahir di Jakarta, 19 September 1966. Perempuan ini meraih gelar LL.M. dengan *major* lingkungan hidup di Dalhousie Law School, Halifax, Kanada, 1992. Gelar S.H. juga dalam *major* lingkungan hidup diperoleh di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.

Dia mengikuti berbagai pendalaman, antara lain pendalaman mengenai transisi menuju demokrasi (Jerman, 1994), hak asasi perempuan (Bangladesh; Sao Paulo, Brasil; dan Tanzania, 2003), transisi keadilan (New York, 2007), dan kepemimpinan inovatif untuk berkelanjutan (IDEAS Indonesia 5.0, Massachusetts Institute of Technology Sloan School of Management, 2015). Arimbi juga merupakan aktivis Walhi, menjadi salah satu komisioner Komnas Perempuan (2007–2014), dan masuk Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang). ■



**Luthfi Assyaukanie, Ph.D.** adalah Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang). Ia juga seorang peneliti dan dosen di Universitas Paramadina, Jakarta. Meraih gelar Ph.D. di Universitas Melbourne, Australia, dalam bidang sejarah politik. Ia pernah bekerja sebagai peneliti di Singapura, Belanda, dan Amerika Serikat. Luthfi sudah menulis sejumlah buku dan puluhan artikel yang diterbitkan di media dalam dan luar negeri. Salah satu bukunya, *Islam and the Secular State*, diterbitkan oleh ISEAS, Singapura (2009). Dia pernah menjabat Direktur Freedom Institute dan peneliti di SMRC, Jakarta. ■



**Sadyo Kristiarto, S.P.** lahir di Jakarta pada 25 Juni 1968, merupakan alumnus Jurusan Agronomi IPB Bogor. Sejak 1996 hingga 2014 menjadi wartawan di *HU Media Indonesia* antara lain menangani Desk Polhukam, Ekonomi, Metropolitan, dan Suplemen. Pada 2014 selama kurang lebih setahun bertugas sebagai Pemimpin Redaksi *Borneo News* di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Sebelum menjadi jurnalis sempat berkarier sebagai asisten kepala divisi di perkebunan kelapa sawit PT Tania Selatan, Palembang, Sumatra Selatan, dan sebagai supervisor data di PT Pillar, kantor konsultan teknik. Saat ini tergabung dalam Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang). ■



**Anggiasari Puji Aryatie, S.S.** merupakan sosok yang sangat berpengalaman dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas dan kesetaraan gender serta upaya mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Perempuan kelahiran Jakarta itu juga memiliki keahlian dalam pelatihan dan berbicara di depan umum. Keterampilan kepemimpinannya ditopang bakat dalam menganalisis masalah masyarakat, meninjau kebijakan publik, mengembangkan dan menyederhanakan prosedur, serta menemukan solusi yang inovatif.

Sarjana sastra Inggris dari Sekolah Bahasa Asing LIA, Yogyakarta, 2007, itu pada Januari 2016 hingga Oktober 2016 menjadi Koordinator Komunikasi Indonesia dan Filipina untuk Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), salah satu organisasi tertua di Jerman yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial. Selain itu, sejak September 2019 sampai sekarang ia menjadi konsultan bidang penelitian dan pengumpulan data pandemi yang bekerja sama dengan Asia University, Jepang. Kini, menjadi Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang). ■



**Dr. Irwansyah, S.Sos., M.A.** memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos.) dari Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU) 1991-1994; *master of arts* (M.A.) dari School of Communication, College of Social Science, University of Hawaii at Manoa (UHM) Honolulu, Amerika Serikat (2003-2004); dan doktor (Dr.) dari Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) 2007-2010 (*cum laude*).

Pada 2021 menjadi staf pengajar Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI dan Magister Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan, anggota Senat Antar-fakultas FISIP UI, asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dan Ketua Bidang Keilmuan ISKI Pusat, Ketua Litbang *Media Indonesia*, dan Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Dr. Lestari Moerdijat, S.S., M.M. (2019-sekarang). ■



**Dr. Radityo Fajar Arianto, S.E., M.B.A.** lahir di Surabaya pada 4 Juni 1975. Memperoleh gelar sarjana dari Universitas Airlangga Surabaya di bidang manajemen dan menamatkan pendidikan MBA dari University of Hertfordshire Inggris. Radityo aktif mengajar sebagai dosen di Universitas Pelita Harapan (UPH) sejak 2008 dan mendapatkan gelar doktor dari UPH pada 2021, pernah menjabat Direktur Inkubator Bisnis UPH Sparklabs. Saat ini Radityo juga aktif dalam kegiatan FDD12 sebagai Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI. ■



**MEDIA  
INDONESIA  
PUBLISHING**

ISBN 978-623-6165-15-7



9 786236 165157